KAJIAN BUDAYA MASYARAKAT PANTAI UTARA DAN KESENJANGAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

OLEH:

Herien Puspitawati
Tin Herawati
Hanny Harashani

SUB-DINAS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 2007

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada pendiri Bangsa Indonesia memberikan amanat mengenai perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 Ayat 2, bahwa : " Tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 28 Huruf H Ayat 3, bahwa :"Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat"; dan Pasal 34 Ayat 2 bahwa : "Negara mengembangkan sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan bukti dikeluarkannya INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang menginstruksikan kepada seluruh pejabat negara, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUG di seluruh wilayah Indonesia. PUG yang dimaksudkan adalah melakukan seluruh proses pembangunan mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang berperspektif gender dengan melibatkan peranserta warga negara baik laki-laki maupun perempuan.

Desain Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia tercermin dari Visi dan Misinya. VISI Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 diarahkan untuk mencapai: (1) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; (2) Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; dan (3) Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan VISI Pembangunan Nasional tersebut ditetapkan 3 (tiga) MISI Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 yang meliputi: (1) Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; (2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan (3) Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera.

Secara khusus, PUG di Bidang Pendidikan diwujudkan dalam kebijakan "Pendidikan Untuk Semua atau PUS (*Education for All*)", yang di dalamnya mencanangkan beberapa hal penting berkenaan dengan kesetaraan gender dalam pendidikan, diantaranya menghapus kesenjangan atau disparitas gender di Pendidikan Dasar dan Menengah menjelang tahun 2005, dan mencapai persamaan pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang sama dalam Pendidikan Dasar yang berkualitas baik. Menindaklanjuti kesepakatan Dakar dan merespon Inpres No. 9 Tahun 2000 tersebut, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) "Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan" di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Di dalam rangka melaksanakan RAN-PUG di Bidang Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderral Pendidikan Luar Sekolah (PLS) perlu mencanangkan Program Pendidikan Perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) di Bidang Pendidikan.

Seiring dengan era globalisasi total, maka isu kesetaraan gender menjadi isu global yang sangat relevan menyangkut keterpaduan antara kerjasama laki-laki dan perempuan di segala bidang. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan dari delapan tujuan global negara-negara sedunia yang berkomitmen dalam *Millenium Development Goals (MDGs)*. Target MDGs sampai dengan tahun 2015, yaitu: (1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan, (2) Mewujudkan pendidikan dasar, (3) Meningkatkan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) Mengurangi angka kematian bayi, (5) Meningkatkan kesehatan ibu, (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, (7) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan (8) Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.

Kembali lagi pada aspek pendidikan yaitu bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan jaminan undang-undang mempunyai akses terhadap pendidikan dan mendapatkan manfaat dari pelayanan-pelayanan semua jenjang pendidikan dalam rangka menguasai IPTEK. Akan tetapi berdasarkan data statistik, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Depdiknas, Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun hasil studi dan pengamatan sistim pendidikan nasional, memperlihatkan kesenjangan gender dalam bidang pendidikan yang cukup signifikan. Kesenjangan gender ini antara lain diperlihatkan dari angka partisipasi sekolah. Memang pada tingkat SD kesenjangan gender relatif kecil, akan tetapi di tingkat-tingkat pendidikan yang lebih tinggi (SLTP, SLTA dan perguruan Tinggi), kesenjangan gender cukup berarti. Secara umum partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu masih ada segregasi gender dalam pemilihan jurusan, yang banyak dipengaruhi oleh stereotipi gender. Perbaikan dan investasi bidang pendidikan bagi perempuan bukan saja akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (lebih dari separuh sumberdaya manusia adalah perempuan), akan tetapi juga merupakan kunci bagi mencapai pembangunan bidang-bidang lainnya (antara lain kesehatan, gizi, ekonomi, politik), serta pembangunan berkelanjutan pada umumnya. Karena "ibu yang cerdas, mencerdaskan bangsa".

Dengan demikian, jelaslah sudah betapa pentingnya pemberdayaan perempuan di segala bidang, dimulai dari bidang pendidikan. Peran kaum perempuan Indonesia di semua bidang kehidupan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, mulai dari peran politik, peran ekonomi, peran birokrasi, peran seni budaya, dan peran pendidikan. Oleh karena itu kesiapan perempuan untuk maju mengambil setiap kesempatan yang diberikan berdasarkan jaminan undang-undang harus segera diartikulasikan dan dikokohkan. Tuntutan kepada setiap perempuan Indonesia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan tehnologi semakin tinggi dan menjadi suatu keharusan, apalagi mengingat tuntutan di Era Globalisasi. Namun demikian, program-program pemberdayaan perempuan masih menghadapi kendala sosial budaya setempat yang akhirnya berkontribusi pada kesenjangan gender di sektor pendidikan yang semakin meningkat.

Gambar 1 berikut ini memberikan gambaran bahwa lingkungan ekologi berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya manusia (SDM) perempuan yang diantaranya terwujud dalam prestasi pendidikannya. Lingkungan awal yang paling berpengaruh adalah lingkungan keluarga intinya (*nuclear family*) dan keluarga besarnya (*extended family*) serta lingkungan budaya tempat dia dibesarkan.

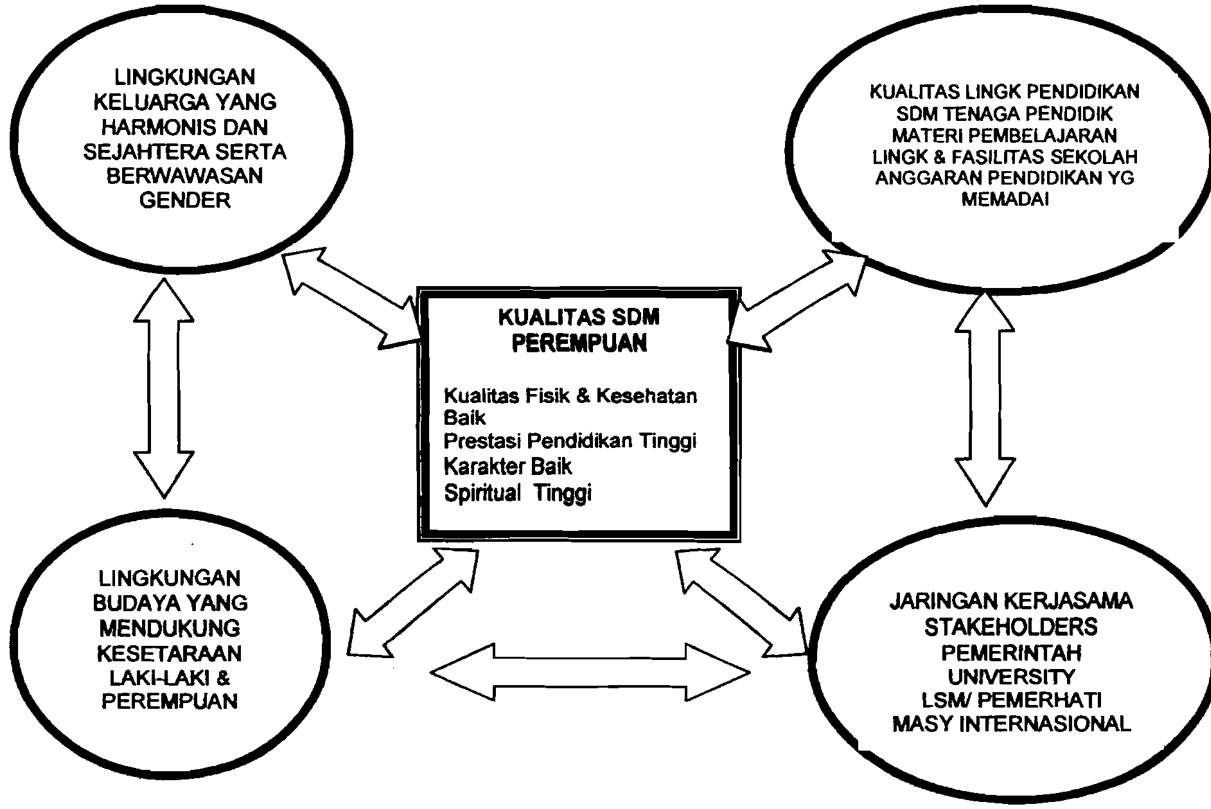

Gambar 1. Lingkungan yang Berpengaruh pada Kualitas SDM dan Prestasi Pendidikan Perempuan.

Lingkungan sosial-budaya setempat inilah yang melandasi keluarga dan masyarakat untuk membentuk identitas dan jati diri seorang perempuan yang secara simultan membentuk kualitas SDM perempuan. Kualitas pendidikan formal yang terdiri atas sistem pendidikan dan gapembelajaran dari para pendidik membentuk etos kerja dan cara berpikir yang sistematis yang akhirnya menghasilkan prestasi di bidang pendidikan bagi kaum perempuan. Hal yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi kualitas SDM perempuan adalah perjuangan yang tak henti-hentinya dari para stakeholder (yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah, universitas, dan LSM) dalam memberikan jaminan hukum dan penyusunan kebijakan yang responsif gender dalam rangka meningkatkan kualitas SDM perempuan.

Selanjutnya, sehubungan dengan permasalahan masih adanya ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan di Indonesia pada umumnya, Indonesia sebagai salah satu negara anggota UNESCO telah menandatangani Kesepakatan Dakar mengenai

Kebijakan Pendidikan Untuk Semua atau PUS (*Education for All),* yang didalamnya mencanangkan beberapa hal penting berkenaan kesetaraan gender dalam pendidikan, diantaranya yaitu:

1. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit, dan mereka yang termasuk minoritas etnik mempunyai akses dalam menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik.
2. Mencapai perbaikan 50 persen pada tingkat melek huruf (*literacy)* orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.
3. Menghapus disparitas gender di pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005, dan mencapai persamaan pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang sama dalam pendidikan dasar yang berkualitas baik.

Kebijakan Pendidikan di Jawa Barat tertulis dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2007. Rencana strategis Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ditetapkan untuk Periode 2006-2008 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor 188.34/SK.6280-BP/2005.

Arah kebijakan, tujuan, strategi program dan rencana aksi program pendidikan yang responsif gender di Jawa Barat merupakan kelanjutan dan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Visi Jawa Barat yang tertulis " **Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara Tahun 2010**" merupakan pemacu bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk berkiprah secara optimal menata seluruh tatanan yang ada agar menjadi potensi yang mempau mendukung terhadap upaya perwujudan visi tersebut. Untuk itu Pemerintahan Jawa Barat telah merumuskan visinya "**Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendukung Pencapaian Visi Jawa Barat 2010**", yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia (SDM) Jawa Barat.

2. Mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh
3. Memantapkan kinerja pemerintah daerah.
4. Meningkatkan implementasi pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama dan budaya daerah.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selaku perangkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tanggungjawab besar dalam merealisasikan visi yang dimaksud dengan mewujudkan misi ke satu, yaitu : "Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia (SDM) Jawa Barat" melalui pembinaan yang terbaik terhadap pendidikan sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat dapat terwujud. Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat. Maju mundurnya pendidikan sangat tergantung kepada kepedulian dan kiprah pemerintah dan masyarakatnya. Pembangunan, peningkatan dan pemberdayaan pendidikan sebagai komposit peningkatan kesejahteraan rakyat Jawa Barat membutuhkan upaya-upaya terobosan baru yang strategis. Dengan demikian perlu program yang sinergis antara unsur-unsur penyelenggara pendidikan baik pada tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kota. Hal ini mengingat bahwa APS dan APK untuk semua jenjang pendidikan masih menunjukkan disparitas yang cukup tinggi.

Tersusunnya kebijakan tersebut dilatarbelakangi adanya permasalahan bidang pendidikan yang difokuskan pada dua isu pokok, yaitu (1) Rendahnya pencapaian angka Indeks Pendidikan (IP) yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia, dan (2) Belum tuntasnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Permasalahan umum yang masih ditemui adalah antara lain (1) Belum meratanya mutu pendidikan di setiap sekolah, (2) Masih tingginya angka kekurangan jumlah guru, (3) Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap perlunya peningkatan mutu pendidikan, (4) Tidak lengkapnya sarana penunjang pembelajaran di sekolah-sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium, (5) Masih rendahnya kinerja manajemen birokrasi pendidikan, dan (6) Kurang tersedianya data pendidikan yang mutakhir dan akuntabel dan terpilah berdasarkan jenis kelamin yang dapat dijadikan acuan bagi perencanaan dan pengendalian program pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan pembangunan bidang pendidikan yang tertuang pada Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2006-2008 diarahkan untuk: (a) Melaksanakan koordinasi yang efektif pada seluruh jajaran pendidikan untuk membangun sinergitas pembangunan pendidikan, (b) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka menciptakan suasana pendidikan yang kondusif, (b) Menggali dan memberdayakan seluruh potensi internal maupun eksternal guna menghasilkan pendidikan yang efektif, dan (d) meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur pendidikan, guru dan tenaga kependidikan lainnya serta institusi pendidikan. Adapun implementasi kebijakan-kebijakan tersebut terbagi ke dalam program pembangunan pendidikan sebagai berikut: (a) Program Misi 1: Membangun koordinasi dan sinergitas antar lini, unit dan institusi dalam pengelolaan pendidikan di Jawa Barat yang terintegrasi berdasarkan tugas, fungsi dan peran masing-masing, (b) Program Misi 2: Menciptakan suasana kondusif di dunia pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, (c) Program Misi 3: meningkatkan kinerja aparatur dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam kerangka pembangunan pendidikan di Jawa Barat terdapat dua isu pokok, yaitu (a) Rendahnya pencapaian angka Indeks Pendidikan (IP) yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (b) Belum tuntasnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Sebagai gambaran umum berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan Tahun 2004, ternyata Jawa Barat hanya mampu mencapai angka Indeks Pendidikan (IP) 79,75, Angka Melek Huruf (AMH) 95,05 dan rata-rata lama sekolah (RLS) 7,38 yang masih jauh dari target yang diharapkan. Begitu besar tantangan yang harus dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sehingga Gubernur Jawa Barat telah menetapkan bahwa periode 2004-2008 sebagai tahun-tahun akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pendidikan. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BAPEDA telah menerbitkan dokumen "Akselerasi Pembangunan Pendidikan Jawa Barat 2004-2008" yang harus menjadi acuan bagi upaya perencanaan pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan (IP) serta penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun.

Kebijakan Strategis Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2005-2008 yang tertulis dalam *Position Paper* Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Tahun 2006 adalah:

1. Kebijakan diprioritaskan pada program dan kegiatan pembangunan menginvestasikan secara langsung utk indikator RLS dan AMH.
2. Program dan kegiatan pembangunan ditempuh melalui jalur pendidikan formal (SD, SLTP, SLTA).
3. Program dan kegiatan pembangunan ditempuh melalui jalur pendidikan non formal.
4. Melibatkan peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan masalah pemerataan pendidikan.
5. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan dewan pendidikan Kab/Kota, komite sekolah, dan " Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan" dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan.
6. Menggunakan indikator proses berupa APK/APM dalam mengukur kinerja pembangunan pendidikan dalam rangka evaluasi tahunan, sementara indikator outcome digunakan pada akhir proses.
7. Melakukan orientasi pendataan dan cara perhitungan dalam mengukur rata-rata lama sekolah di Jawa Barat dgn mengikutsertakan data tentang lama sekolah penduduk pada satu jenjang pendidikan walaupun tidak sampai tamat belajar.

Berkaitan dengan permasalahan kesenjangan gender bidang pendidikan di masyarakat daerah pantura Jawa Barat, maka diperlukan suatu informasi yang menjelaskan kaitan-kaitan antara aspek sosial, ekonomi dan budaya terhadap permasalahan kesenjangan gender bidang pendidikan tersebut. Informasi dan data yang akurat dituangkan dalam bentuk buku diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan, para pendidik, dan masyarakat luas dalam memahami permasalahan di bidang pendidikan secara umum dan permasalahan kesenjangan gender secara khusus.

Tujuan Penulisan Buku

Tujuan penulisan buku ini adalah memberikan gambaran garis besar tentang karakteristik budaya masyarakat Pantai Utara Jawa Barat dalam kaitannya dengan kesenjangan gender bidang pendidikan. Manfaat penulisan buku ini diharapkan dapat:

1. Memberikan masukan bagi Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dalam menyusun strategi/ kebijakan/ program pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, terutama dalam melakukan penguatan kelembagaan (*capacity building*) kepada semua stakeholder pendidikan.
2. Dokumentasi berbentuk buku dapat dijadikan sebagai bahan ajar di sekolah maupun sebagai penambah pengetahuan bagi masyarakat luas.

Sepintas Isi Buku

Buku ini menguraikan secara detil bagaimana proses pembentukan sosial budaya terhadap nilai-nilai yang melandasi kehidupan keluarga yang berkaitan dengan peran dan nilai gender yang akhirnya berkontribusi terhadap kesenjangan gender bidang pendidikan di masyarakat pantai utara Jawa Barat. Selain faktor-faktor sosial budaya yang menjadi kendala perempuan dalam mengakses pendidikan, faktor keterbatasan kemampuan ekonomi juga secara simultan berkontribusi pada kesenjangan gender bidang pendidikan. Terakhir, buku ini memberikan rekomendasi dalam menanggulangi kesenjangan gender bidang pendidikan melalui cara pendekatan sosial budaya keluarga dan masyarakat dan pendekatan pengarusutamaan gender (PUG).

Metode Penulisan

Penulisan buku ini didasarkan pada kajian di tiga Kabupaten di Pantai Utara Jawa Barat, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten subang, dan Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat. Kajian dan penulisan dilakukan selama enam bulan, yaitu pada bulan Mei-November 2007. Langkah-langkah kajian adalah sebagai berikut:

1. Mendokumenkan karakteristik Budaya di Pesisir Pantai Utara Jawa secara umum.
2. Mendokumenkan hasil penelitian mengenai kasus-kasus lokal dan spesifik berkenaan dengan pengarusutamaan gender di daerah pantai utara Jawa Barat.

3. Mendokumenkan karakteristik Budaya di Pesisir Pantai Utara Jawa secara yang berkaitan dengan gender di bidang pendidikan.

Metode pengumpulan data/ informasi yang diterapkan pada penulisan buku ini adalah bervariasi sebagai berikut:

1. *In desk study* untuk mendapatkan berbagai informasi dari media cetak, elektronik, maupun Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten.
2. Diskusi Fokus Grup pada kelompok kepala sekolah, guru, komite sekolah dan kantor dinas setempat untuk menggali informasi mengenai karakteristik sosial budaya setempat dalam kaitannya dengan gender di bidang pendidikan.
3. Pemberian angket pada kelompok kepala sekolah, guru, komite sekolah dan kantor dinas setempat dengan menggunakan kuesioner terstruktur untuk mengetahui pendapat dan komentar tentang nilai-nilai keluarga dan norma-norma sosial-budaya setempat dalam kaitannya dengan gender di bidang pendidikan.
4. *In dept interview* dengan siswa dan orangtua yang mempunyai masalah pendidikan anaknya tentang alasan mengeluarkan anak dari sistem sekolah (6 keluarga dari siswa dan siswi pada masing-masing jenjang sekolah SLTP dan SLTA).

Data yang diambil meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi:

1. Data Angka Partisipasi Sekolah (SD, SLTP, dan SLTA) terpilah berdasarkan jenis kelamin.
2. Data/ Informasi perkumpulan social budaya di masyarakat.

Data primer yang diambil meliputi:

1. Data/ Informasi permasalahan social-budaya yang berkaitan dengan gender di bidang pendidikan.
2. Melalui pemberian angket diperoleh informasi:
   a. Nilai-nilai keluarga dalam kaitannya dengan preferensi gender dalam pendidikan anak.
   b. Norma-norma sosial-budaya setempat dalam kaitannya dengan gender secara umum.

c. Norma-norma sosial-budaya setempat dalam kaitannya dengan gender di bidang pendidikan.

3. Melalui *In dept interview* diperoleh informasi:

   a. Norma-norma masyarakat yang mendorong anak laki-laki dan perempuan dalam melanjutkan sekolah.

   b. Norma-norma masyarakat yang menghalangi anak laki-laki dan perempuan dalam melanjutkan sekolah.

   c. Nilai-nilai keluarga terhadap preferensi anak dalam memperoleh akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

      - Nilai anak laki-laki.
      - Nilai anak perempuan.
      - Apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan / didapatkan oleh anak laki-laki.
      - Apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan / didapatkan oleh anak perempuan.

   d. Alasan sosial-ekonomi-budaya yang menyebabkan anak dikeluarkan dari sistem sekolah.

   e. Karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi keluarga/ responden

   f. Permasalahan kehidupan Keluarga

      - Identifikasi masalah
      - Penyebab masalah
      - Strategi pemecahan masalah / *coping survival strategies/ practical strategies*)

   g. Pembagian peran dan tanggungjawab anggota keluarga,

   h. Peran danTanggung Jawab Anggota Rumahtangga dalam Menjalankan Fungsi Ekonomi

      - Siapa yang memegang dan mengontrol keuangan keluarga (*gender roles in resources' access and control*),
      - Siapa yang memutuskan dalam penggunaan keuangan, pendidikan anak, dll.

LANDASAN HUKUM DAN ALASAN RASIONAL KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Landasan Hukum

Landasan hukum bagi peran gender dan keluarga serta perlindungan anak dalam Pembangunan Nasional adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan pasal 33.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menjamin Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang intinya mengenai pembentukan lembaga setingkat lembaga negara yang terutama bertugas memantau dan memediasi masalah HAM di Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Delapan Fungsi Keluarga
6. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
8. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal (1): Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, dibentuk Komisi yang bersifat nasional yang diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO No, 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk/ Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Pustaka Yustisia. Jogyakarta.
10. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang pada intinya mengenai instruksi Presiden kepada seluruh Menteri; Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian RI; Jaksa Agung; Gubernur; dan Bupati/ Walikota

untuk melaksanakan PUG, dan memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman PUG.

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) khususnya Butir 22-c mengenai penetapan pedoman dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan Butir 22-e mengenai penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja.
12. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan anomor 23/SK/MENEG.PP/VI/2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberdayaan Perempuan di Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom.
13. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak.
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
15. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
16. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah yang menginstruksikan setiap institusi pemerintah melaksanakan PUG dengan cara memasukkan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan: Perencanaan, pelaksanaan, mnitoring dan evaluasi kebijakannya.
18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:
    a. Pasal 26 Ayat (1), pada intinya mengenai salah satu tugas Kepala Daerah yaitu untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan.
    b. Pasal 150 Ayat (3) Butir (d), pada intinya menyatakan bahwa dalam perumusan dan pelaksanaan Rencana Verja Pembangunan Daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat.
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang pada intinya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
22. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, bahwa:
    a. Bab 12:
    (1) Bagian b (1), tentang "Terjaminnya Keadilan Gender dalam berbagai Perundangan, Program Pembangunan, dan Kebijakan Publik".
    (2) Bagian c (2), tentang "Meningkatkan Taraf Pendidikan dan Layanan Kesehatan serta Bidang Pembangunan lainnya, untuk Mempertinggi Kualitas Hidup dan Sumberdaya Kaum Perempuan.
    b. Bab 27:
    (1) Pengantar: tentang "Pendidikan Sebagai Salah Satu Cara untuk Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan Gender, Pemahaman Nilai-nilai Budaya dan Multikulturalisme, serta Keadilan Sosial".
    (2) Bagian c (7), tentang Arah kebijakan "Menurunkan Kesenjangan Partisipasi Pendidikan antar Kelompok Masyarakat dengan Memberikan Akses yang Lebih Besar kepada Kelompok Masyarakat yang selama ini Kurang dapat Terjangkau oleh Layanan Pendidikan".
23. Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2006, Bab 26 (C) bahwa Pembangunan pendidikan dibedakan pada dua kerangka arah kebijakan, yaitu kerangka anggaran dan kerangka regulasi dengan tetap memperhatikan kesepakatan-kesepakatan internasional, seperti *Education For All, Convention on The Right of Child, Millenium Development Goals,World Summit on Sustainable Development.*
24. Target Dakar bahwa:
    a. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan yang sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai akses pada dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik.
    b. Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa..

c. Penghapusan *kesenjangan gender* pada Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 dengan fokus pada kepastian sepenuhnya bagi anak perempuan terhadap akses dalam memperoleh Pendidikan Dasar yang bermutu.

25. *Millenium Development Goals (MDGs)* sampai dengan Tahun 2015, ada 8 tujuan utama yang akan dicapai, yaitu: (1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan, (2) Mewujudkan pendidikan dasar, (3) **Meningkatkan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan**, (4) Mengurangi angka kematian bayi, (5) Meningkatkan kesehatan ibu, (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, (7) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan (8) Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan. Jadi sebagai landasan hukum Bidang Pendidikan adalah) terutama tujuan nomor:
    a. Goal 2: yaitu mencapai pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar .
    b. Goal 3: yaitu mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun 2015.
26. Undang-Undang Tentang HAM Internasional.

Landasan Pemikiran Rasional: Mendidik Perempuan Sama Dengan Mendidik Bangsa

Merujuk pada kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) atau mutu manusia, maka ada dua segi pandangan, yaitu dari segi pendidikan adalah afeksi, kognisi, dan psikomotor, sedangkan mutu manusia dari segi kecerdasan adalah kecerdasan nalar atau daya pikir (IQ), kecerdasan emosional atau daya hati/ kalbu (EI), kecerdasan adversity (AQ), kecerdasan finansial (FQ), dan kecerdasan emosional-spiritual (ESQ) (Salim 1996; Soesarsono dan Sarma 2002). Menurut filsafat Platonik yang dikembangkan oleh Socrates dan diteruskan oleh muridnya, Plato, manusia terbagi menjadi tiga bagian : kepala, dada dan perut (simbol dari akal, ambisi dan nafsu) yang harus diseimbangkan menjadi harmoni sehingga terbentuklah manusia yang sempurna (Megawangi, 1999). Voydanoff (Bowen dan Pittman 1995) dan Puspitawati (2006) menyebutkan bahwa yang dinamakan *outcome* suatu manusia adalah terdiri atas kesehatan fisik, kesejahteraan psikologi psiko-sosial terdiri atas keadaan psikologi (penghargaan diriemosi / stres, dan kecerdasan emosi), masalah perilaku (agresifitas dan perilaku penyimpangan/ kenakalan), aspirasi dan prestasinya.

Kualitas SDM perempuan berarti secara fisik, mental, psikologis dan talenta adalah dalam kondisi yang sangat baik. Apabila prestasi pendidikan perempuan dalam kualitas yang baik, maka produktivitas perempuan di dalam bidang ekonomi dapat ditingkatkan sehingga perempuan mampu memberdayakan dirinya sendiri dan keluarganya secara lebih mandiri serta mampu menyejahterakan kehidupan secara optimal.

Kualitas perempuan sebagai ibu sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak-anaknyanya. Perempuan juga sangat dominan dalam mewujudkan Keluarga yang Berkualitas melalui fungsi pemeliharaan dan pengasuhan atau "*caring ang parenthing*". Perempuan yang mempunyai prestasi pendidikan yang tinggi ditambah dengan kepribadian yang baik, maka akan berpengaruh pada kualitas pengasuhan yang baik terhadap anak-anaknya. Melalui pengasuhan yang baik, anak akan merasa lebih percaya diri, anak merasa dilindungi dan akhirnya mengakibatkan tumbuh kembang anak yang baik pula, yaitu meliputi perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan mental, dan perkembangan kognitif. Menurut teori perkembangan anak dikatakan bahwa 5 tahun pertama merupakan masa yang sangat kritis bagi anak untuk membentuk kematangan fisik dan psikologisnya. Selanjutnya, memasuki usia sekolah sampai dengan umur 12 tahun, anak mengalami proses kematangan sosial, mental, psikologis dan moral (Harris & Liebert, 1992; Santrock, 1997).

Berkaitan dengan kualitas SDM di atas, ada pembenaran tentang pandangan Gary S Becker (1975) bahwa investasi di bidang pendidikan diharuskan untuk dilaksanakan karena telah memberikan keuntungan secara makro dan jangka panjang berupa keuntungan yang tidak hanya didapat dari pemuda yang berpendidikan sebagai hasil dari investasi yang ditanamkan saja (*private rate of returns*), namun juga keuntungan yang dinikmati oleh masyarakat di lingkungan sekitar (*social rate of returns*). Pendekatan "*Rate-of-Return*" ini adalah pendekatan yang disebut *cost-benefit* yang mempunyai prinsip rasional yaitu prinsip yang mengutamakan hasil yang melebihi biaya yang dikeluarkan meskipun membutuhkan waktu menunggu sampai periode tertentu.

Berkaitan dengan prestasi pendidikan anak yang merupakan salah satu kualitas SDM, maka dalam teori keluarga disebutkan bahwa peran keluarga (*family roles*) merupakan sumber institusi paling awal dan paling kuat dalam mensosialisaikan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan nilai-nilai keluarga dan norma masyarakat yang dianut. Pengasuhan yang dilakukan oleh ayah dan ibu memberi pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada outcome anak (Simons 1996). Hasil temuan yang lebih spesifik menyatakan bahwa kontribusi peran pengasuhan yang dilakukan oleh ibu (*mother's parenting roles*) mempunyai keistimewaan yang lebih besar dibandingkan dengan peran pengasuhan yang dilakukan oleh ayah (*father's parenting roles*) (Conger dan Elder 1994; Puspitawati, 2006). Sepertinya lingkungan keluarga yang dimotori oleh peran ibu sebagai agen utama dan pertama bagi pendidikan dan sosialisai bagi anak-anaknya akan menghasilkan prestasi akademik yang tinggi.

Meskipun ditemukan hasil adanya peran ibu yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan peran ayah dalam meningkatkan prestasi akademik anak dan mencegah perilaku kenakalan pelajar, namun berdasarkan konsep kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang sudah menjadi kebijakan negara (dalam hal ini dibawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia), maka perlu ada kesetaraan pula dalam hal pengasuhan remaja di dalam keluarga. Melalui kerjasama yang baik dan erat antara ayah dan ibu dalam pengasuhan remaja, maka akan memberikan *role model* yang saling melengkapi (komplementer) bagi remaja. Ciri-ciri yang khas dalam hal pengasuhan, pendekatan individual, cara berkomunikasi dan pendekatan interpersonal antara ayah dan ibu serta remaja memberikan variasi bonding dan interaksi triadik yang saling melengkapi satu sama lain. Apabila interaksi antar anggota ini berjalan dengan baik sehingga tercapai kestabilan lingkungan keluarga, maka remaja akan berpeluang besar dalam meningkatkan prestasi akademiknya dan terhindar dari perilaku kenakalan.

Tantangan mengenai prestasi pendidikan perempuan dalam menyongsong era globalisasi adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

   Ukuran kinerja: *Human Development Index* (HDI) Indonesia

2. Meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta mempersempit kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, kontrol, partisipasi, serta penerimaan manfaat dalam pembangunan.

   Ukuran Kinerja:

   a. *Gender-related Development Index* (GDI) Indonesia

   b. *Gender Empowerment Measurement* (GEM) Indonesia

Dengan demikian, secara garis besar ada beberapa alasan penting, mengenai makna kalimat " Mendidik Perempuan sama dengan Mendidik Bangsa", yaitu:

1. Ada korelasi yang positif antara meningkatnya pendidikan perempuan dengan tercapainya sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga, yaitu terkendalinya pertumbuhan penduduk.
   - Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin tinggi rata-rata umur melahirkan anak pertama.
   - Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin rendah angka fertilitas total penduduk perempuan usia 15-49 tahun.
   - Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin rendah jumlah rata-rata anak yang pernah dilahirkan perempuan usia 40-49 tahun.
   - Semakin tinggi pendidikan perempuan menikah, semakin tinggi permintaan terhadap alat/obat kontrasepsi (KB).

   Kesimpulan: Dengan semakin tingginya taraf pendidikan perempuan, mereka akan cenderung menikah dalam usia yang relatif lebih dewasa. Di samping itu, mereka cenderung menggunakan alat/obat kontrasepsi untuk memperpanjang jarak kelahiran anak dan dengan sendirinya membatasi jumlah anak yang pernah dilahirkan. Mereka juga cenderung bekerja di luar rumah (pendapatan yang memadai dan exposure to media/informasi lebih luas).

2. Ada korelasi yang positif antara meningkatnya pendidikan perempuan dengan tercapainya sasaran pembangunan kesehatan, yaitu meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita.

- Sebagai dampak dari semakin tinggi rata-rata umur melahirkan anak pertama, maka relatif semakin rendah resiko kehamilan dan kematian bayi atau kematian ibu melahirkan.
- Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, semakin tinggi persentase anak yang diimunisasi (data internasional).
- Secara umum, semakin tinggi pendidikan (lama sekolah) penduduk, semakin tinggi umur harapan hidup (data provinsi).
- Semakin tinggi pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas (laki-laki dan perempuan), semakin rendah angka kematian bayi (data provinsi).

Kesimpulan: Perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan kesehatan dan gizi yang lebih baik, termasuk untuk merawat anak.

3. Secara umum (laki-laki dan perempuan) terdapat korelasi positif dan signifikan antara tingkat ekonomi (pengeluaran per kapita) dengan tingkat kesehatan dan tingkat pengetahuan (melek aksara) serta pendidikan.
    - Permasalahan penduduk dalam mengakses pelayanan kesehatan adalah faktor kemiskinan (34%).
    - Semakin tinggi pengeluaran per kapita, semakin tinggi persentase penduduk yang melek aksara.
    - Kesenjangan angka melek aksara antara perempuan dari kelompok pengeluaran tinggi dan pengeluaran rendah lebih besar dari pada kesenjangan yang sama pada penduduk laki-laki. Hal ini menandakan bahwa pengaruh tingkat ekonomi kepada rendahnya tingkat pengetahuan (melek aksara) lebih besar terjadi pada penduduk perempuan daripada penduduk laki-laki.
    - Permasalahan utama penduduk (laki-laki dan perempuan) usia 7-18 tahun tidak melanjutkan sekolah adalah masalah kemampuan untuk membiayai.

Kesimpulan: Semakin meningkatnya pendapatan/ekonomi penduduk (laki-laki dan perempuan), maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mampu mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sangat tergantung pada faktor manusia dan sumber daya alam di sekitarnya serta hubungan antara keduanya. Secara garis besar, manusia yang berkualitas dan arif serta bijaksana akan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumberdaya alam, agar nilai tambah dari sumberdaya alam itu akan memungkinkan peningkatan penyediaan pangan bagi konsumsi manusia dan akhirnya dapat mewujudkan kualitas hidup yang berkelanjutan. Untuk itu prestasi baik laki-laki dan perempuan sebagai warga negara sangat dibutuhkan dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Dengan demikian, dari segi kebijakan makro disarankan agar kinerja pembangunan dapat bersifat responsif gender.

Dalam melengkapi landasan rasional pentingnya peran perempuan dalam pembangunan suatu bangsa, maka berikut ini disajikan penjelasan tentang isu-isu gender pada skala makro di Indonesia, dan permasalahan umum yang dihadapi oleh para keluarga Indonesia (Gambar 2):

1. Gender merupakan suatu konsep berkaitan dengan peran antara laki-laki dan perempuan (baik anak cacat/ normal; maupun anak berdasarkan perkembangannya apakah balita, anak, remaja, dewasa, atau Lansia).

2. Relasi gender adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan pembagian peran yang dijalankan masing-masing pada berbagai tipe dan struktur keluarga (keluarga miskin/ kaya, keluarga desa/ kota, keluarga lengkap/ tunggal, keluarga punya anak/ tidak punya anak, keluarga pada berbagai tahapan *life cycle* dan keluarga petani/ nelayan). Bahkan relasi gender ini juga diperluas secara bertahap berdasarkan luasan ekologi, mulai dari mikro, meso, ekso dan makro (keluarga inti, keluarga besar, masyarakat regional, masyarakat nasional, bangsa dan negara dan masyarakat internasional).

3. Sebagai warga negara baik laki-laki maupun perempuan dibawah lindungan Hukum baik nasional maupun internasional, maka setiap orang dijamin mempunyai kesamaan hak; keadilan; dan kesetaraan (partisipasi, akes/ kesempatan, kontrol & manfaat).

4. Namun demikian, kenyataan di lapangan, masih banyak ditemui adanya kesenjangan gender di segala bidang (Sosial Budaya, Ekonomi, Hukum, Hankam, Teknologi, Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Kepemilikan Properti) yang akar permasalahannya berasal dari kesenjangan sosiologis kultural di tingkat keluarga dan masyarakat lokal (adanya marjinalisasi, ketidakadilan dalam pembagian peran, pelabelan pada kaum perempuan, beban ganda pada perempuan, dan penyalahgunaan arti dan pengertian kodrati untuk memagari kaum perempuan agar tidak terlalu banyak berpartisipasi di sektor publik).

5. Dampak dari kesenjangan gender tersebut, tampak pada kehidupan keluarga yaitu adanya bias gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja serta ekonomi yang semuanya membawa ketertinggalan kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki; meningkatkan aktivitas trafficking yang sebagian besar merugukan kaum perempuan dan anak-anak, meningkatkan frekuensi *Domestic Violence* (kekerasan dalam rumah tangga) yang kasusnya lebih besar menimpa kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dan masih adanya pengasuhan Bias Gender yang lebih menguntungkan anak laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

6. Dampak dari kesenjangan gender di tingkat keluarga akan meluas ke tingkat makro dengan kenyataan bahwa Bangsa Indonesia masih mengalami kualitas HDI yang rendah; pertumbuhan ekonomi yang terhambat; kualitas pendidikan rendah (APS, APK, APM rendah; Angka Buta Aksara tinggi), kualitas kesehatan rendah (AKI/AKB tinggi); masalah sosial yang tinggi (pengangguran, kriminalitas, *trafficking*), kualitas kesejahteraan keluarga dan Masyarakat Rendah atau kemiskinan struktural meningkat dan regeneratif, kualitas pemeliharaan lingkungan rendah (kerusakan hutan dan erosi serta polusi yang tinggi; transfer ketidakadilan dari generasi ke generasi konstan/ meningkat; dan urbanisasi/ migrasi yang tinggi.

7. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan intervensi pihak pemerintah dalam merumuskan Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (PUGA) Di Tingkat Nasional/ Propinsi/ Kab/Kota melalui berbagai program dan kegiatan yang bersinergis antar stakeholder di berbagai jenjang pemerintahan untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) mulai dari tingkat keluarga, masyarakat dan negara dengan memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Permasalahan umum keluarga yang ada saat ini didominasi oleh adanya masalah sosial ekonomi (*social economics problems*) atau kemiskinan yang mengakibatkan masalah keluarga lainnya seperti perceraian, konflik antar anggota keluarga, kekerasan dalam rumahtangga, kenakalan remaja, dan lain-lain. Pembangunan ekonomi nasional selama ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Indikator utamanya adalah tingginya ketimpangan dan kemiskinan. Ketimpangan gender yang masih terjadi di Indonesia diantaranya ada pada pasar kerja, yaitu adanya akses perempuan terhadap kesempatan yang mendatangkan pendapatan lebih rendah daripada akses lelaki. Perempuan lebih kecil kemungkinannya untuk bekerja, dan sebaliknya lebih besar kemungkinannya untuk tidak dipekerjakan. Perempuan cenderung mendapatkan upah lebih kecil daripada laki-laki.

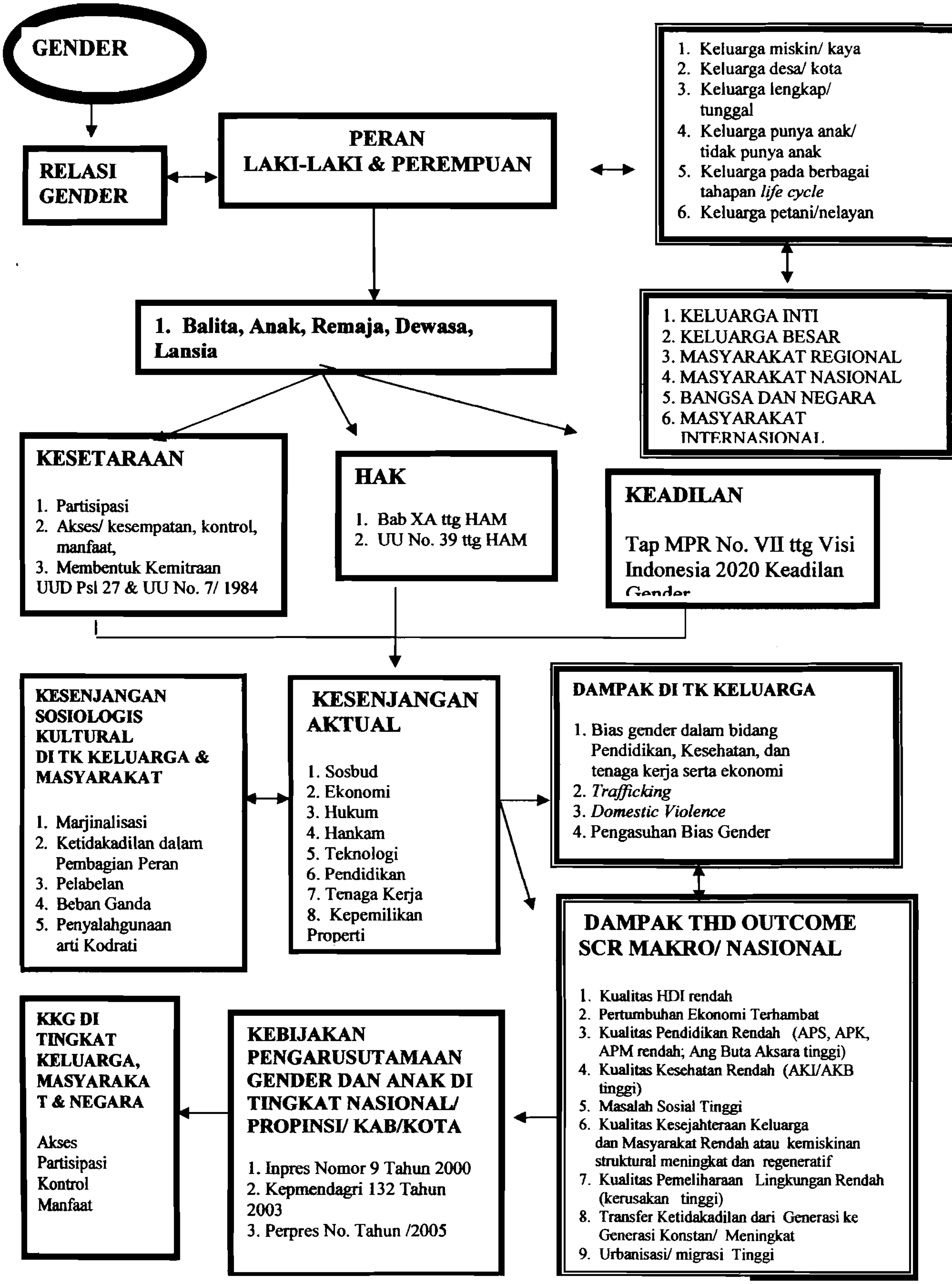

Gambar 2. *Cross Cutting Gender and Family Issues*

Rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat terlihat pula dari masih meluasnya masalah kemiskinan. Selama kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara drastis dari mulai 40,1 persen menjadi 11,3 persen. Namun demikian, jumlah penduduk miskin meningkat setelah krisis ekonomi nasional sejak pertengahan Tahun 1997. Perkembangan penduduk miskin Indonesia adalah 37.3 juta (18.9%) pada tahun 2000, 37.1 juta (18.4%) pada tahun 2001, 38.4 juta (18.2%) pada tahun 2002, dan 37.3 juta (17.4%) pada tahun 2003. (Menkokesra, 2004). Pada tahun 2004 dan 2005 persentase penduduk miskin mengalami penurunan yaitu menjadi 16,7 % dan 16,0 %. Namun menurut BPS (2007), penduduk miskin pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi 17,8%.

Angka kemiskinan ini akan lebih besar lagi jika dalam kategori kemiskinan dimasukkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta orang. PMKS meliputi gelandangan, pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo terlantar, dan penyandang cacat yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum kondisi PMKS lebih memprihatinkan ketimbang orang miskin. Selain memiliki kekurangan pangan, sandang dan papan, kelompok rentan (*vulnerable group*) ini mengalami pula ketelantaran psikologis, sosial dan politik (Suharto, 2004).

Saat ini, semakin banyak kelompok perempuan yang semakin kuat dan kompak, baik dari segi organisasi maupun produktivitas, untuk meningkatkan partisipasinya di sektor publik. Kelompok usaha ekonomi produktif perempuan ini akan dapat menyumbang kemajuan perekonomian daerah dengan signifikan. Untuk itu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah menetapkan kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) sebagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak ekonomi perempuan dengan melakukan koordinasi dan sinergi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dari sektor-sektor terkait. Perempuan mempunyai hak untuk melaksanakan pemenuhan hak ekonomi sebagai salah satu kebutuhan dasar khususnya guna meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga di samping untuk menyetarakan posisi dan kondisi perempuan dengan laki-laki. Perempuan telah berperan serta dalam kegiatan ekonomi namun pada umumnya mereka masuk di sektor informal, sehingga kontribusi perempuan pengusaha mikro dan kecil sering tidak diperhitungkan (Swasono, 2005).

Menteri Pemberdayaan Perempuan mengajak seluruh unsur, sektor pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan perbankan untuk bersama-sama membina dan mengembangkan para perempuan pengusaha agar menjadi pengusaha yang tangguh yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, tanpa mengingkari adanya peran ganda perempuan, maka harus ada strategi penguatan perempuan dan sekaligus penguatan keluarga agar dapat mewujudkan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat secara bersama-sama dengan mengedepankan kemitraan dan keharmonisan keluarga Indonesia. Dengan demikian semakin penting langkah-langkah untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam semua kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Sesuai dengan kesepakatan dunia tentang Delapan Tujuan Utama *Millenium Development Goals (MDGs),* maka Indonesia telah mencanangkan berbagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan penduduk yang semakin terpuruk sejak adanya krisis ekonomi nasional yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Salah satu dari tujuan utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan suatu bangsa, yang dicerminkan dari *Gender Related Development Index (GDI)* dan *Gender Empowerment Measures (GEM)*.

ISU-ISU KESENJANGAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN DI DAERAH PANTURA PROPINSI JAWA BARAT

Kondisi Kesenjangan Gender Bidang Pendidikan Di Jawa Barat

Kenyataan yang ada di Propinsi Jawa Barat menunjukkan adanya kesenjangan gender di bidang pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK), ditemukan kesenjangan gender di Jawa Barat yang konsisten dengan keadaan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dengan kesenjangan gender yang semakin menurun dengan semakin tingginya jenjang sekolah (disparitas gender APK pada Sekolah Menengah (-3,42%) adalah lebih rendah dibandingkan dengan disparitas gender APK pada SMP (-4,77%) dan lebih rendah daripada disparitas gender pada APK SD (-10,95%).

   Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan pada setiap jenjang sekolah yang menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh, apakah SD/MI, SLTP/MTs, atau SLTA dengan rumus:

$$\textbf{APK SD/MI} = \frac{\textbf{Jumlah Siswa SD+ MI}}{\textbf{Jumlah Penduduk 7-12 tahun}} \times 100\%$$

$$\textbf{APK SLTP/MTs} = \frac{\textbf{Jumlah Siswa SLTP+ MTs}}{\textbf{Jumlah Penduduk 13-15 tahun}} \times 100\%$$

$$\textbf{APK SLTA/MA} = \frac{\textbf{Jumlah Siswa SLTA+ MA}}{\textbf{Jumlah Penduduk 16-18 tahun}} \times 100\%$$

   Untuk mengetahui kesenjangan gender bidang pendidikan yang berhubungan dengan akses pendidikan, maka analisis dilakukan dengan membandingkan masing-masing APK pada setiap jenjang pendidikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

2. Berdasarkan angka putus sekolah, didapatkan hasil adanya kesenjangan gender yang relatif kecil pada proporsi siswa putus sekolah pada kelompok umur (7-12 tahun) , dengan proporsi laki-laki adalah 0,49% dan proporsi perempuan adalah 0,45%. Namun ditemui adanya kesenjangan gender yang sangat kecil pada proporsi siswa putus sekolah pada kelompok umur 13-15 tahun, dan 16-18 tahun dengan posisi proporsi perempuan sedikit lebih besar putus sekolah dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Proporsi perempuan berturut-turut untuk kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun yaitu 1,04%, dan 1,17%, sedangkan proporsi laki-laki berturut-turut yaitu 0,91%, dan 0,92% dengan disparitas yang relatif sangat kecil yaitu berturut-turut -0,04%, 0,13%, dan 0,25%.

Kondisi Kesenjangan Gender Bidang Pendidikan Di Pantai Utara Jawa Barat

1. Berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK), secara umum ditemukan kesenjangan gender di Kabupaten Karawang, Subang dan Indramayu dengan keadaan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dengan kesenjangan gender yang semakin meningkat dengan semakin tingginya jenjang sekolah (disparitas gender APK pada Sekolah Menengah (-3,42%) adalah lebih rendah dibandingkan dengan disparitas gender APK pada SMP (-4,77%) dan lebih rendah daripada disparitas gender pada APK SD (-10,95%) (Gambar 3-6 dan Lampiran 1). Namun demikian, apabila dikaji secara detil diketahui bahwa

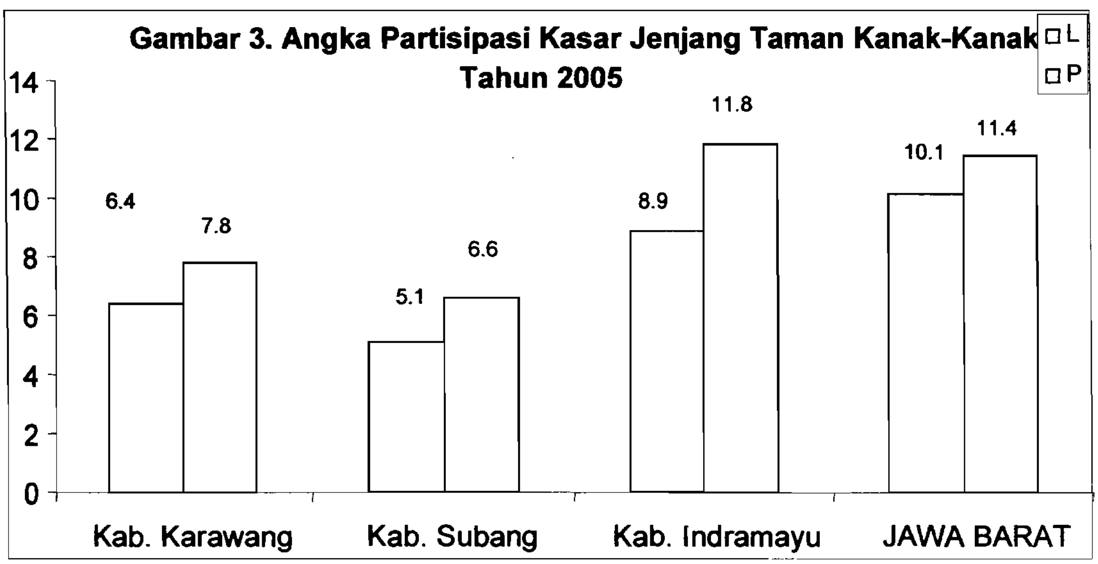

Gambar 3. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Taman Kanak-Kanak Tahun 2005

Angka Partisipasi Kasar jenjang taman kanak-kanak menunjukkan posisi perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki di ketiga kabupaten (Karawang, Subang dan Indramayu) serta di tingkat Provinsi Jawa Barat (Gambar 3). Sepertinya para keluarga lebih menyekolahkan anak perempuannya terlebih dahulu dibandingkan dengan anak laki-lakinya. Angka Partisipasi Kasar jenjang Sekolah Dasar (SD) menunjukkan posisi laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan di tiga Kabupaten (Karawang, Subang dan Indramayu) serta di tingkat Provinsi Jawa Barat (Gambar 4).

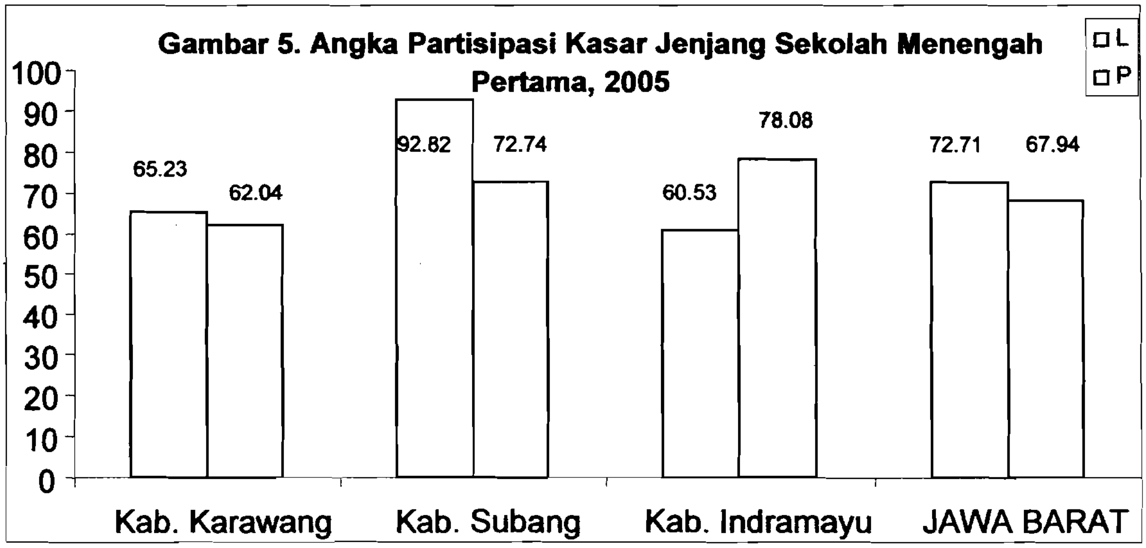

Gambar 5. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Menengah Pertama, 2005

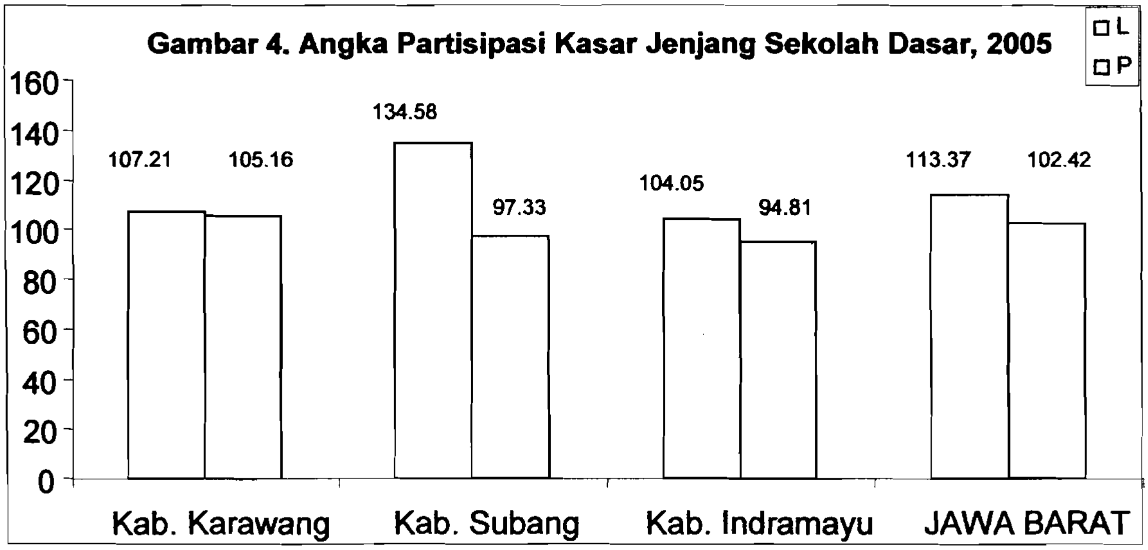

Gambar 4. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Dasar, 2005

Angka Partisipasi Kasar jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Gambar 5) dan Sekolah Menengah (Gambar 6) menunjukkan posisi yang bervariasi, yaitu posisi laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan di Kabupaten Karawang dan Subang serta di tingkat Provinsi Jawa Barat, namun menunjukkan posisi peempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki di Kabupaten Indramayu.

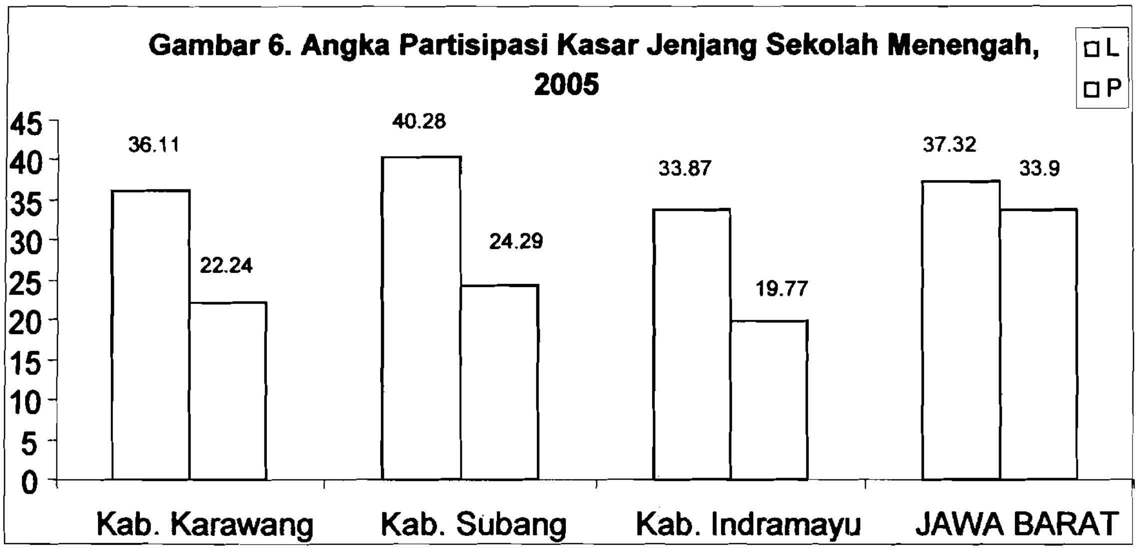

2. Berdasarkan Angka Tidak/ Belum Sekolah dan Angka Tidak Bersekolah lagi, pada penduduk usia 10 tahun ke atas, maka secara umum ditemukan kesenjangan gender di Kabupaten Karawang, Subang dan Indramayu dengan keadaan posisi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (Gambar 7-14 dan Lampiran 2-5). Pada kelompok umur 7-12 tahun, proporsi perempuan yang tidak/ belum sekolah adalah lebih banyak dibandingkan dengan proporsi laki-laki di Kabupaten Karawang dan Subang, namun posisi laki-laki dan perempuan sama di Kabupaten Indramayu, sedangkan di tingkat propinsi Jawa Barat posisi laki-laki yang tidak/belum sekolah adalah lebih banyak dibandingkan dengan perempuan (Gambar 8).

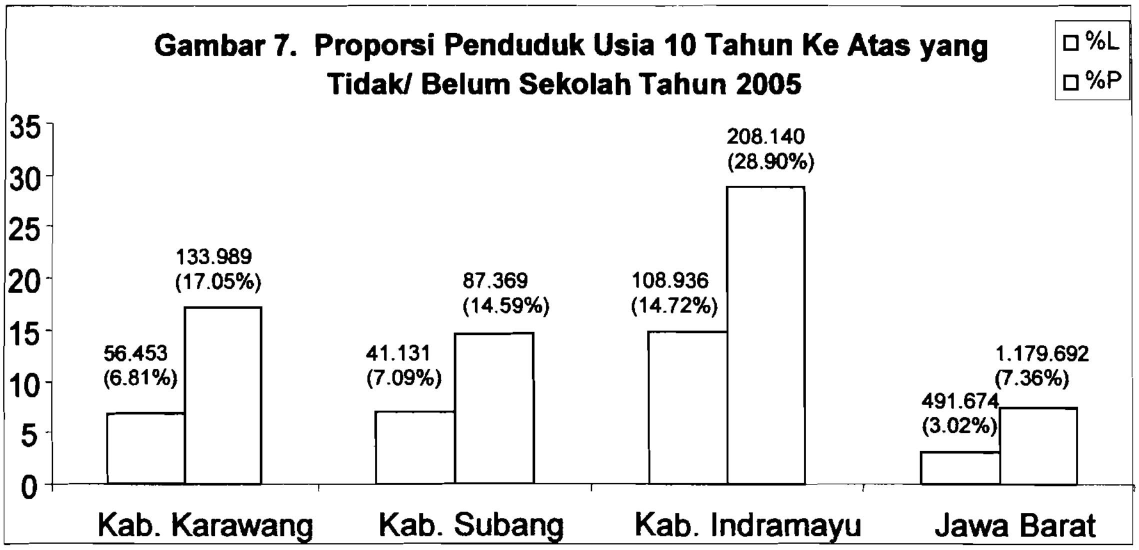

% = Persentase yang tidak/belum sekolah terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas terpilah berdasarkan jenis kelamin

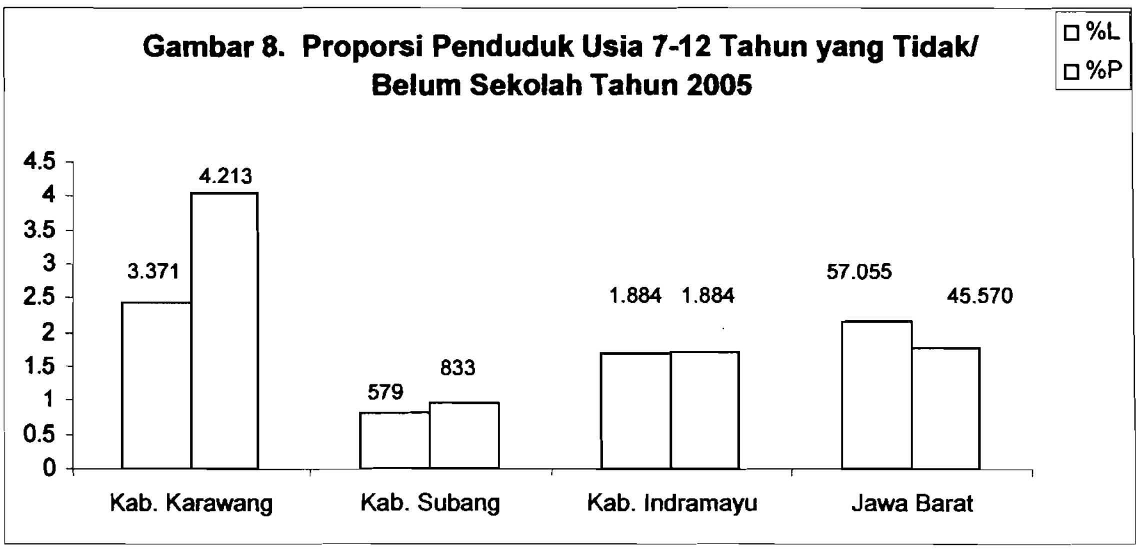

% = Persentase yang tidak/ belum sekolah terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun terpilah berdasarkan jenis kelamin

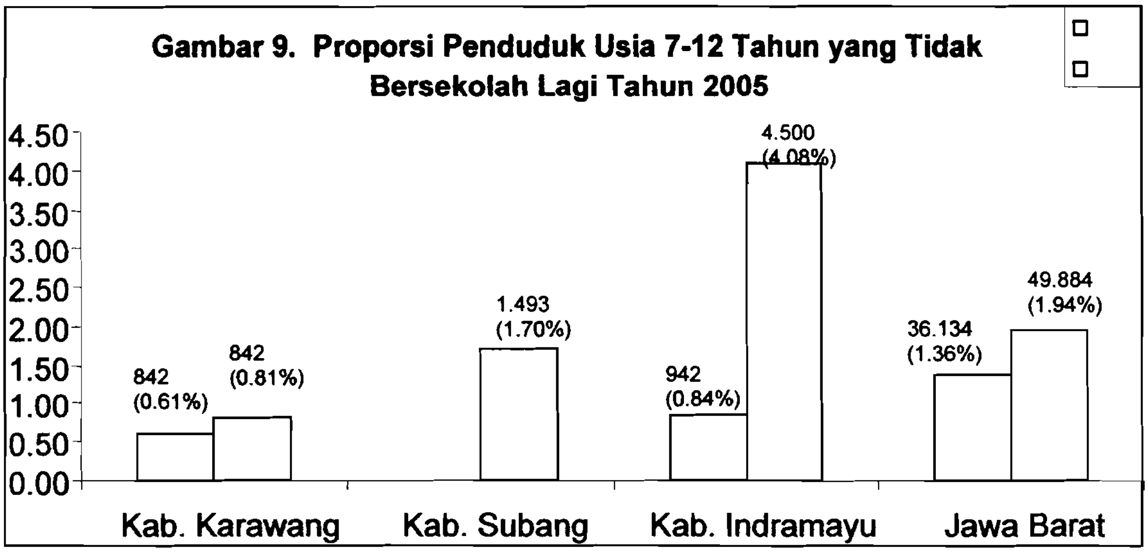

% = Persentase yang tidak bersekolah lagi terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun terpilah berdasarkan jenis kelamin

Pada kelompok umur 7-12 tahun, proporsi perempuan yang tidak bersekolah lagi adalah lebih banyak dibandingkan dengan proporsi laki-laki di Kabupaten Karawang, Subang dan Indramayu, serta Propinsi Jawa Barat (Gambar 9).

Pada kelompok umur 13-15 tahun, proporsi perempuan yang tidak/ belum bersekolah adalah lebih banyak dibandingkan dengan proporsi laki-laki di Kabupaten Subang dan di tingkat propinsi Jawa Barat, sedangkan posisi laki-laki yang tidak/ belum bersekolah lebih besar dibandingkan dengan perempuan terjadi di Kabupaten Indramayu (Gambar 10).

Pada kelompok umur yang sama (13-15 tahun), proporsi laki-laki yang tidak bersekolah lagi adalah lebih banyak dibandingkan dengan proporsi perempuan di Kabupaten Karawang dan Indramayu serta tingkat Propinsi Jawa Barat, sedangkan posisi perempuan yang tidak bersekolah lagi adalah sedikit lebih besar dibandingkan dengan laki-laki terjadi di Kabupaten Subang (Gambar 11).

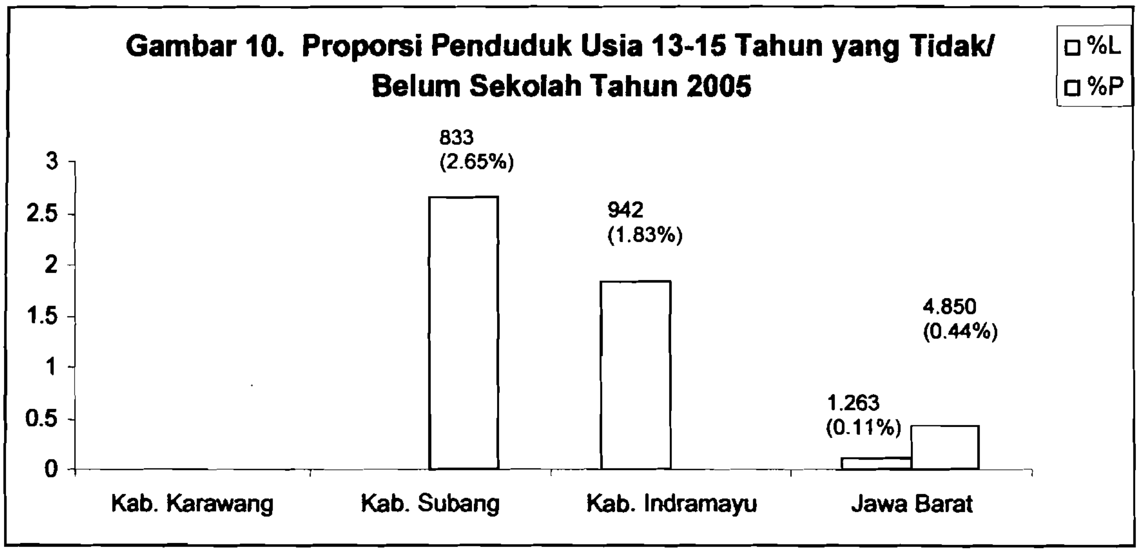

% = Persentase yang tidak/belum sekolah terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun terpilah berdasarkan jenis kelamin

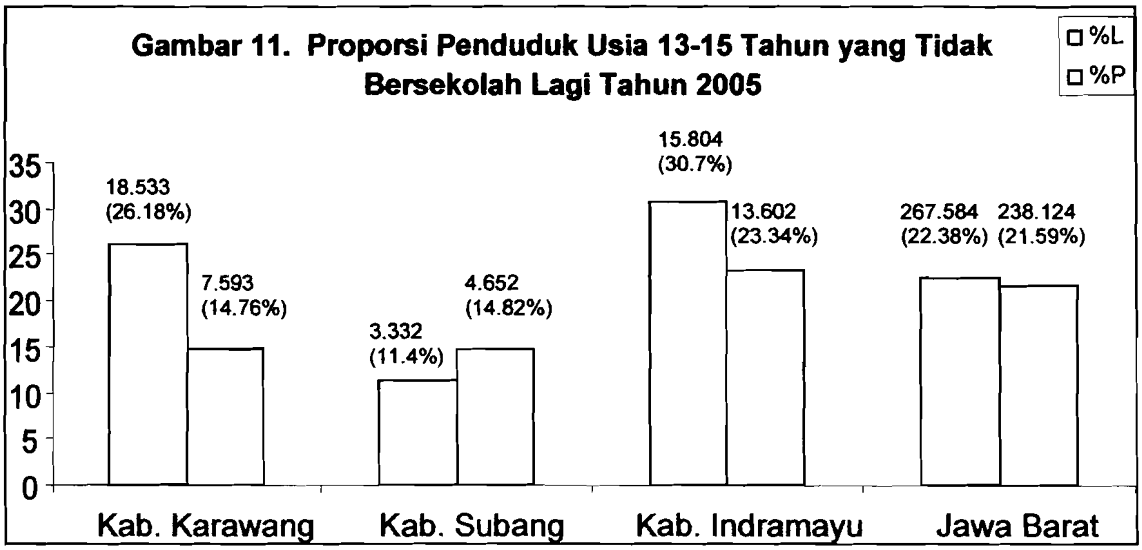

% = Persentase yang tidak bersekolah lagi terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun terpilah berdasarkan jenis kelamin

Pada kelompok umur 16-18 tahun, tidak ada penduduk perempuan dan laki-laki yang tidak/ belum bersekolah di Kabupaten Karawang, Subang, dan Indramayu. Namun di tingkat propinsi Jawa Barat, kelompok umur 16-18 tahun yang tidak/ belum bersekolah berjumlah kurang dari satu persen (Lampiran 5).

Pada kelompok umur yang sama (16-18 tahun), proporsi laki-laki yang tidak bersekolah lagi adalah lebih banyak dibandingkan dengan proporsi perempuan di Kabupaten Indramayu, sedangkan proporsi laki-laki dan perempuan berimbang terjadi di Kabupaten Karawang dan Subang. Untuk Propinsi Jawa Barat didapatkan hasil bahwa proporsi perempuan yang tidak bersekolah lagi sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki untuk selang umur 16-18 tahun (Gambar 12).

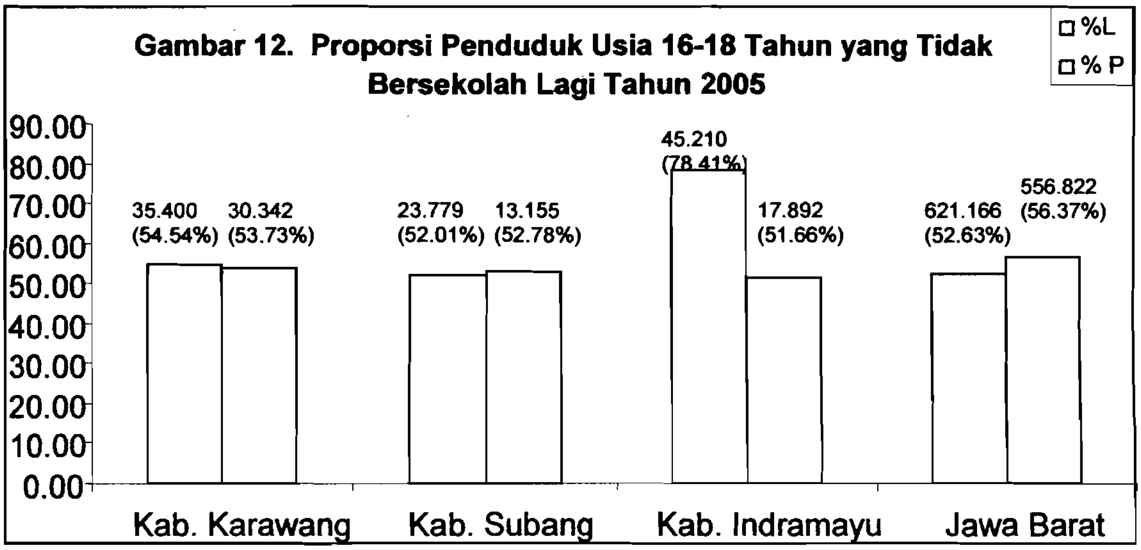

Gambar 12. Proporsi Penduduk Usia 16-18 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi Tahun 2005

% = Persentase yang tidak bersekolah lagi terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun terpilah berdasarkan jenis kelamin

Pada kelompok umur 19-24 tahun, proporsi perempuan yang tidak/ belum bersekolah adalah lebih banyak dibandingkan dengan proporsi laki-laki terjadi di Kabupaten Indramayu, sedangkan proporsi laki-laki yang tidak/ belum bersekolah adalah lebih banyak dibandingkan dengan proporsi perempuan di Kabupaten Karawang dan di tingkat propinsi Jawa Barat. Di Kabupaten Subang, tidak ada penduduk baik laki-laki maupun perempuan pada selang umur yang sama yang tidak/ belum bersekolah (Gambar 13).

Pada kelompok umur yang sama (19-24 tahun), proporsi perempuan yang tidak bersekolah lagi adalah lebih banyak dibandingkan dengan proporsi laki-laki di Kabupaten Karawang dan di tingkat Propinsi Jawa Barat, sedangkan posisi laki-laki yang tidak bersekolah lagi sedikit lebih besar dibandingkan dengan perempuan terjadi di Kabupaten Indramayu. Untuk Kabupaten Subang, proporsi perempuan yang tidak bersekolah lagi adalah sama dengan proporsi laki-laki (Gambar 14).

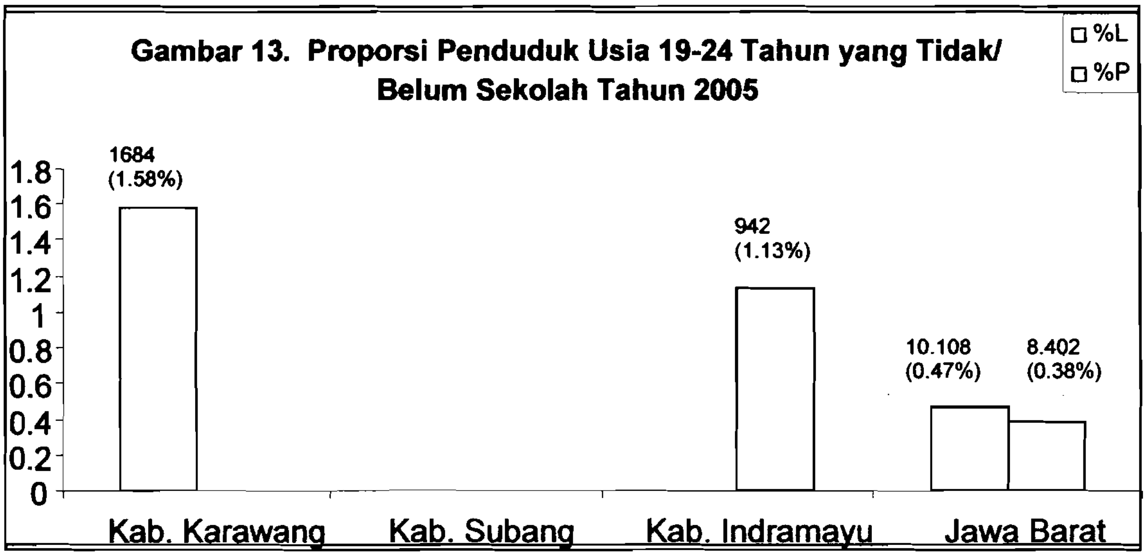

% = Persentase yang tidak/belum sekolah terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun terpilah berdasarkan jenis kelamin

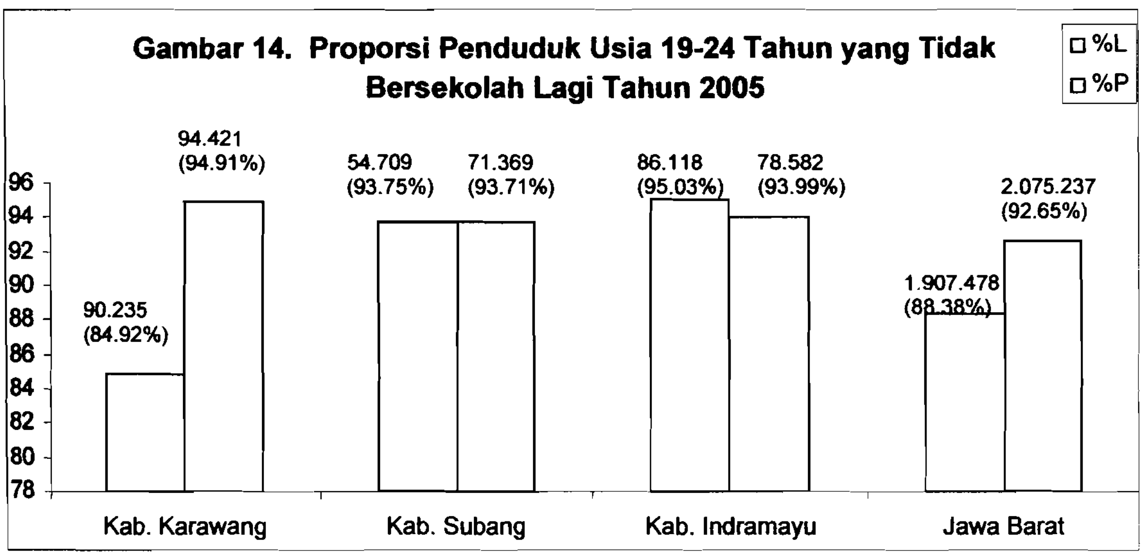

% = Persentase yang tidak bersekolah lagi terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun terpilah berdasarkan jenis kelamin

3. Berdasarkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta aksara, maka dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan gender pada posisi perempuan buta aksara yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki di Kabupaten Karawang, Subang dan Indramayu dan di tingkat Propinsi Jawa Barat (Gambar 15 dan Lampiran 7). Proporsi penduduk yang buta aksara ternyata sekitar dua-pertiganya adalah perempuan dan sepertiganya adalah laki-laki. Dengan demikian terlihat adanya indikasi kendala sosial budaya pada pada masa lampau yang diteruskan hingga masa kini sehingga menghasilkan keadaan kesenjangan gender di pihak perempuan di Jawa Barat.

Gambar 15. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Buta Aksara Tahun 2006

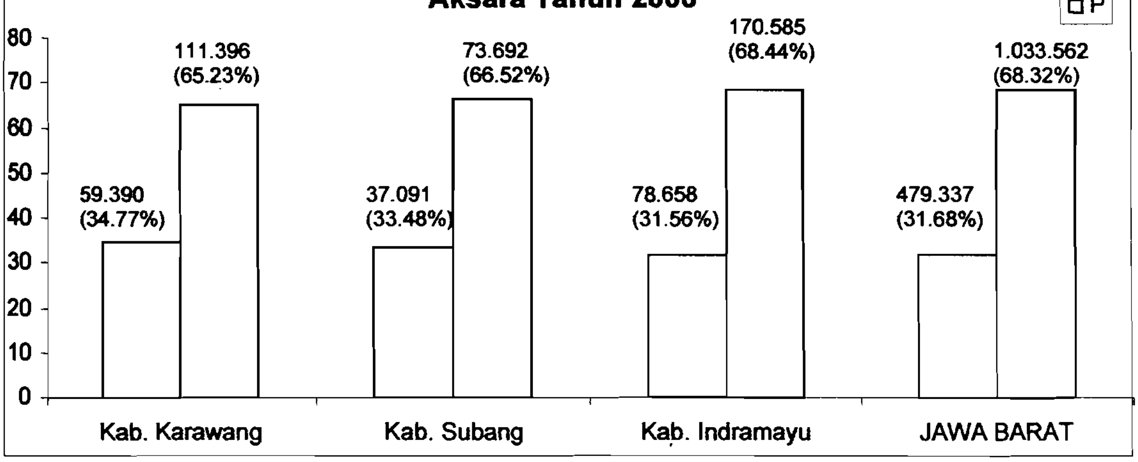

% = Persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas secara total terpilah berdasarkan jenis kelamin

4. Diketahui bahwa persentase penduduk perempuan yang umur perkawinan pertamanya kurang dari atau sampai dengan 18 Tahun adalah sekitar dua-pertiga dari jumlah penduduk perempuan yang menikah di Jawa Barat (Lampiran 8). Lebih menarik lagi apabila dikaji lebih lanjut bahwa terdapat praktek menikah di bawah umur yang terjadi di daerah Jawa Barat dengan proporsi di bawah 15 , 16 , dan 17 serta 18 tahun baik di Kabupaten Karawang (Gambar 16), Subang (Gambar 17), Indramayu (Gambar 18) maupun Propinsi Jawa Barat (Gambar 19).

Persentase Penduduk Perempuan yang Umur Perkawinan Pertama Kurang dari 18 Tahun

Gambar 16. Kabupaten Karawang Tahun 2005

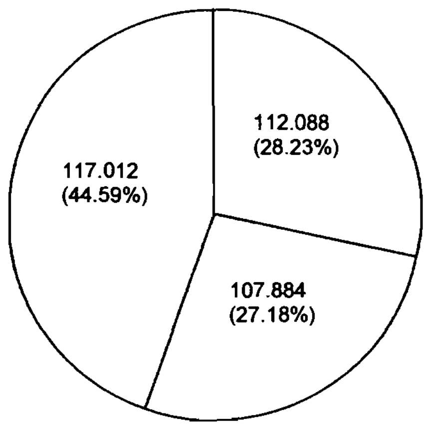

Gambar 17. Kabupaten Subang Tahun 2005

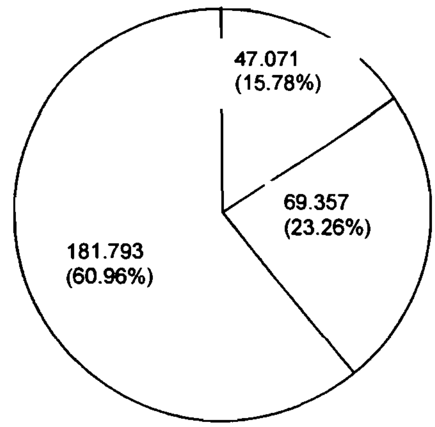

Gambar 18. Kabupaten Indramayu Tahun 2005

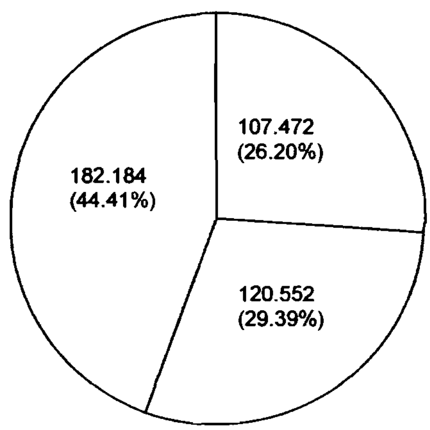

Gambar 19. Propinsi Jawa Barat Tahun 2005

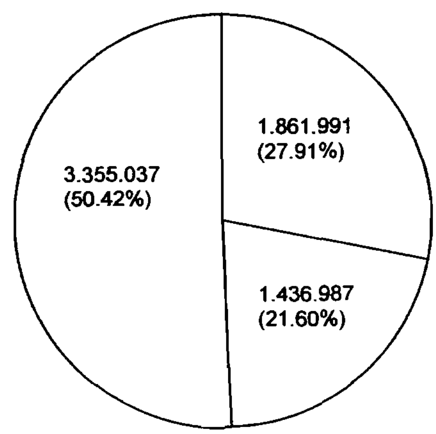

□ <= 15
□ 16
□ 17-18

Total Pemikahan <= 18 tahun di Karawang = 396.984 (67.26%)
Total Pemikahan <= 18 tahun di Subang = 298.221 (63.76%)
Total Pemikahan <= 18 tahun di Indramayu = 410.208 (76.19%)
Total Pemikahan <= 18 tahun di Jawa Barat = 6.654.015 (58.19%)

% = Persentase penduduk perempuan yang umur perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun terhadap jumlah penduduk perempuan yang menikah secara total

Berdasarkan penyajian gambar di atas, diketahui bahwa betapa besar proporsi penduduk perempuan yang umur perkawinan pertamanya kurang dari atau sampai dengan 18 Tahun (sekitar dua-pertiga) dari pada proporsi penduduk perempuan yang menikah di atas umur 18 tahun (sepertiga). Fenomena ini mengindikasikan bahwa perempuan diberikan keterbatasan oleh sisi sosial-budaya keluarga dan masyarakat dalam mengakses haknya di bidang pendidikan. Dengan dalih keterbatasan ekonomi, sebagian besar perempuan ini dikeluarkan dari sistem pendidikan untuk dinikahkan sehingga beban ekonomi keluarga menjadi berkurang.

Berdasarkan data kuantitatif yang tersaji di Lampiran, maka dapat disimpulkan secara garis besar bahwa terdapat isu kesenjangan gender yang bervariasi di Kabupaten Karawang, Subang, dan Indramayu berkaitan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), proporsi penduduk tidak/ belum sekolah dan yang tidak bersekolah lagi, proporsi penduduk yang buta aksara, dan proporsi perempuan yang kawin pertama kali di bawah umur 18 tahun dimana posisi perempuan lebih rendah dalam partisipasi bidang pendidikan dibandingkan dengan posisi laki-laki.

Mengingat proporsi buta aksara perempuan mencapai dua-pertiga dari jumlah penduduk buta aksara di Jawa Barat, maka merupakan suatu indikasi kuat adanya kesenjangan gender di pihak perempuan di bidang pendidikan yang diakibatkan oleh adanya marjinalisasi sosial budaya yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Kendala sosial budaya inilah yang menjadi akar permasalahan kesenjangan gender bidang pendidikan. Untuk itu cara pemecahannya adalah sinergisme berbagai pihak dalam merubah pola pikir masyarakat bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses, control, partisipasi dan manfaat bidang pendidikan secara umum dan bidang pendidikan formal secara khusus.

KEADAAN SOSIAL-EKONOMI DAERAH PANTURA JAWA BARAT

Kabupaten Karawang

Berdasarkan kondisi geografisnya, Kabupaten Karawang dijadikan penyangga pangan untuk wilayah Banten, DKI dan Jawa Barat sejak jaman dahulu kala. Pada Tahun 1962 Karawang bersama Bekasi, Serang, Tangerang, Purwakarta, Subang, Indramayu (sekarang semuanya disebut daerah Pantai Utara atau Pantura pulau Jawa) dijadikan sebagai daerah penghasil berasa yang utama dan dijadikan sebagai pilot Proyek-Proyek Nasional Daerah Swasembada Beras.

Kabupaten Karawang memiliki 12 buah Kecamatan pada tahun 1994, masing-masing Kecamatan : Cikampek, Cilamaya, Rawamerta, Pedes, Batujaya, Karawang, Rengasdengklok, Telukjambe, Klari, Pangkalan, Jatisari dan Telagasari. Kemudian akibat pemekaran wilayah maka tahun 2003 telah terjadi penambahan kecamatan sampai 25 buah masing-masing:

1. Kecamatan Pangkalan
2. Kecamatan Ciampel
3. Kecamatan Telukjambe
4. Kecamatan Klari I
5. Kecamatan Cikampek
6. Kecamatan Tirtamulya
7. Kecamatan Jatisari
8. Kecamatan Cilamaya Wetan
9. Kecamatan Lemahabang
10. Kecamatan Telagasari
11. Kecamatan Karawang
12. Kecamatan Majalaya
13. Kecamatan Rawamerta
14. Kecamatan Temparan
15. Kecamatan Rengasdengklok

16. Kecamatan Kutawalayu
17. Kecamatan Jayakerta
18. Kecamatan Pedes
19. Kecamatan Cibuaya
20. Kecamatan Batujaya
21. Kecamatan Tirtajaya
22. Kecamatan Pakisjaya
23. Kecamatan Kota Baru
24. Kecamatan Banyusari
25. Kecamatan Cilamaya Kulon

Diantara kecamatan-kematan yang ada, nama Rengasdengklok memiliki kenangan sejarah karena dalam wilayah inilah Soekarno dan Hatta pernah "ditahan" pada tanggal 16 Agustus 1945, setelah "diculik" oleh para pemuda karena enggan memproklamirkan Kemerdekaan RI. Sebagian pendapat mengemukakan Pemindahan Bung Karno dan Bung Hatta dar Pegangsaaan Timur ke Rengasdengklok adalah upaya pemuda untuk "mengamankan" mereka dari kekuatiran atas semangat rakyat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan setelah diketahui secara luas bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu, yang bisa saja memancing pertumpahan darah dengan pasukan Jepang yang juga mengancam jiwa keduanya. Demikian juga nama Kecamatan Rawamerta yang terkena dengan peristiwa Rawagede yang terjadi pada tahun 1947 ketika tentara Belanda membanta rakyat di sana. Kehidupan sosial, ekonomi budaya dan politik Kabupaten Karawang mendapat pengaruh langsung dari daerah-daerah sekitarnya yang memiliki jarak cukup deka seperti DKI sejauh ± 70 Km, Bandung ± 100 Km dan Cirebon ± 200 Km.

Keadaan Penduduk

Secara demografi, penduduk Karawang pada tahun 2001 berjumlah 1.789.525 jiwa terdir atas laki-laki 916.554 jiwa dan perempuan 872.971 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,12% serta kepadatan penduduk 1.021 jiwa perkilometer persegi. Jumlah penduduk ini mendiami 12,51% luas daratan yang merupakan areal pemukiman di seluruh wilayah Karawang. Kemudian seiring dengan kondisi fotografinya, maka 83,72% penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani yang memanfaatkan luas lahan pertanian/perkebunan adalah 68,71% yang meliputi luas sawah 59,60%, kebun campuran 8,39% dan perkebunan 0,7%

Sesuai dengan perkembangan penduduknya dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kabupaten Karawang secara dinamis selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan jaman. Pembangunan industrialisasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang senantiasa diimbangi dengan upaya mempertahankan dan mengembangkan Teknologi di bidang pertanian, sehingga status daerah lumbung padi penghasil beras terbesar di Jawa Barat dan penyangga stabilitas pangan nasional tetap dapat dipertahankan. Usaha serius pemerintah Kabupaten Karawang dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya tercermin dari kebijakan program pebangunan daerah di bidang industri dan pertanian yang diimbangi dengan kebijakan pengembangan wilayah administrasi pemerintahan dengan membentuk kecamatn-kecmatn baru disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan rasio kecukpan dan perkembangan penduduk

Sebagai daerah yang startegis pada masa perjuangan, Kabupaten Karawang juga dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para pejuang dari berbagai daerah, Karawang dijadikan markas perjuangan oleh laskar-laskar dan badan-badan perjuangan yang ada di daerah Jawa Barat dan Jakarta, bahkan tidak sedikit para pejuang yang gugur di Karawang dalam rangka memperjuangkan dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia seperti **Letkol Soeroto Koento** yang gugur setelah melakukan perundingan dengan laskar-laskar sebagai persiapan dan mengumpulkan bahan untuk menghadapi perundingan dengan pihak Belanda. Dan sebagai tanda penghormatan dan penghargaan atas gugurnya Soeroto Koento, masyarakat Karawang mengabadikannya dengan membuat monumen yang bertempat di Rawagabus dan diabadikan sebagai nama jalan untuk mengenang perjuangannya.

Agama

Kehidupan beragama di Kabupaten Karawang senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina umat dalam upaya mengatasi masalah-masalah sosial dan upaya yang akan menghambat kemajuan bangsa. Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Karawang seperti mesjid, langgar, mushola, gereja, klenteng, dan vihara, sedangkan banyaknya penduduk berdasarkan agama yang dipeluk adalah sebagai berikut: Islam sebesar 98,69%, Katolik 0,26%, Protestan 0,65%, Budha 0,29% dan Hindu 0,09%dari total penduduk Kabupaten Karawang. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Aliyah mengalami kenaikan masing-masing 0,83% dan 7,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah jamaah haji yang diberangkatkan pada tahun 2001 mencapai 1.142 jamaah. Bila dibandingkan pada tahun 2000 yang hanya 987 jamaah, maka keadaan tahun 2001 mengalami kenaikan 15,70% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal utama dalam mewujudkan kecerdasan dan juga sebagai salah satu indikator dalam rangka meningkatkan status sosial masyarakat. Peningkatan partisipasi bersekolah penduduk tentunya harus diimbangi oleh tersedianya sarana fisik pendidikan dan tenaga pengajar/pendidik. Untuk memberikan suatu gambaran yang cukup jelas tentang banyaknya sekolah, murid dan guru pada tahun 2001, dari seluruh jenjang pendidikan (mulai dari TK hingga perguruan tinggi) yang ada di Kabupaten Karawang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pada jenjang pendidikan dasar di tahun 2001, banyaknya sekolah mengalami penurunan sebesar 0,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun jumlah muridnya justru mengalami kenaikan hingga 1,59%. Sehingga jika kita lihat besarnya rasio murid terhadap sekolah meningkat menjadi 210,33 murid/sekolah. Adapun di tingkat SLTP, baik jumlah sekolah maupun murid mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,25% dan 0,19% dibanding tahun 2000.

Pada jenjang pendidikan SLTA, jumlah sekolah mengalami kenaikan hingga 29,54% dengan jumlah murid juga mengalami kenaikan 17,35%. Sehingga bila dilihat dari rasio murid terhadap sekolah pada jenjang pendidikan SLTA, terjadi penurunan yaitu dari 622,11 pada tahun 2000 menjadi 563,56 pada tahun 2001.

Bidang Pemerintahan

Terbentuknya pemerintahan di Kabupaten Karawang dapat ditentukan terjadi pada abad ke-17 ketika Kerajaan Mataram diperintahkan oleh Sultan Agung, yakni ketika Sultan Agung mengangkat Adipati Kertabumi III menjadi wedana setelah sukses mengusir pasukan Banten di wilayah Karawang. Peristiwa ini masih serangkaian ambisi sultan untuk menguasai Batavia dan Kerajaan Banten.

Pada masa itu diangkat 2 orang wedana yaitu Singaperbangsa dan Aria Wirasaba. Aria Wirasaba diangkat sebagai wedana di Waringinpitu, tampaknya dilatarbelakangi oleh hasil ekspedisi yang pernah dilakukan pada tahun 1630, setahun setelah kegagalan pasukan Mataram menyerang VOC di Batavia. Pada waktu itu Arawirasaba mendapat perintah dari Sultan Agung untuk mengusir pasuka Banten yang bercokol disekitar sungai Citarum dalam wilayah Karawang, sedangkan wialyah Karawang merupakan koloni Mataram setelah kerajaan Sumedanglarang mengaku takluk kepada Mataram pada tahun 1595.

Kabupaten Subang

Kabupaten Subang merupakan daerah yang dilintasi jalur pantura, namun ibukota Kabupaten Subang tidak terletak di jalur ini. Jalur pantura di Kabupaten Subang merupakan salah satu yang paling sibuk di Pulau Jawa. Kota kecamatan yang berada di jalur ini diantaranya Ciasem dan Pamanukan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Indramayu di timur, Kabupaten Sumedang di tenggara, Kabupaten Bandung di selatan, serta Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang di barat. Kabupaten Subang terdiri atas 22 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Nama kecamatan yang ada di Kabupaten Subang adalah Binong, Blanakan, Ciasem, Cibogo, Cijambe, Cikaum, Cipeundeuy, Cipunagara, Cisalak, Compreng, Jalan Cagak, Kalijati, Legon Kulon, Pabuaran, Pagaden, Pamanukan, Patok Beusi, Purwadadi, Pusakanagara, Sagalaherang, Subang dan Tanjung Siang. Pusat pemerintahan di Kecamatan Subang. Penduduk Subang pada umumnya adalah Suku Sunda, yang menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari. Namun demikian sebagian kawasan di pesisir penduduknya menggunakan Bahasa Jawa Dialek Cirebon.

Keadaan Penduduk dan Topografi

Mayoritas penduduk Kabupaten Subang terdiri atas Suku Sunda, yang sebagian besar beragama Islam. Jumlah penduduk pada tahun 2003 adalah 1.407.000 orang dengan kepadatan 686 jiwa/km^2. Luas Kabupaten Subang adalah 2.051,76 km^2. Bagian selatan wilayah Kabupaten SUbang adalah dataran tinggi/pegunungan, sedangkan bagian Utara merupakan dataran rendah yang mengarah langsung ke Laut Jawa.

Transportasi

Kabupaten Subang dilewati jalur utama pada wilayah utaranya dan dimanfaatkan juga sebagai jalur alternatif untuk ke Bandung, Cirebon atau Tasikmalaya. Lintas Subang - Bandung melalui Kalijati semakin diminati para pengemudi karena jalannya yang halus dan bebas hambatan apalagi setelah dibukanya Gerbang Tol Keluar di daerah Sadang. Persimpangan Jalancagak merupakan persimpangan strategis karena dari persimpangan tersebut dapat menjangkau Bandung - Sumedang - Sadang melalui Wanayasa dan Kota Subang sendiri.

Perekonomian

Sebagian besar penduduknya masih berpenghasilan utama sebagai petani dan buruh perkebunan. Oleh karena itu perekonomian Subang masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Subang wilayah Selatan banyak terdapat area perkebunan, seperti karet pada bagian Barat Laut dan kebun Tehnya yang sangat luas. Subang terkenal sebagai salah satu daerah penghasil buah nenas yang umumnya kita kenal dengan nama Nenas Madu. Nenas Madu dapat kita temui di sepanjang Jalancagak yang merupakan persimpangan antara Wanayasa - Bandung - Sumedang dan Kota Subang sendiri. Dodol nenas, keripik singkong dan selai yang merupakan hasil *home industry* yang dapat dijadikan makanan oleh-oleh. Melalui program binaan dibawah naungan Yayasan Kandaga, para petani sedang membudidayakan jamur tiram, ikan nilam di desa Cipunagara.

Pendidikan

Kabupaten Subang sebagian besar penduduknya yang telah beruasia diatas 40 tahun hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar, sehingga untuk menggerakan perekonomian rakyat perlu ditunjang dengan keterampilan. Untuk meningkatkan pembangunan saat ini lebih ditekankan pada generasi dibawah 40 tahun. Sebanyak 10 % warga Subang berada diluar Subang untuk sekolah dan bekerja.

Pariwisata

Di antara rimbunnya perkebunan Teh, diwilayah Selatan, Kabupaten Subang memiliki sumber mata air panas yang terus mengalir didaerah Ciater. Sari Ater merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal karena ke-khasan-nya dan ramai pada saat liburan terutama pada saat liburan Hari Raya Lebaran. Sari Ater selain menyediakan kolam pemandian air panas juga memiliki penginapan - penginapan yang dikenal dengan Saung Kabayan. Selain itu Kabupaten Subang memiliki tujuan wisata alam air terjun yang memiliki pemandangan yang cukup indah dimana hingga saat ini belum dikelola secara serius yaitu Curug Cijalu yang terletak didaerah Sagalaherang dan Curug Cileat yang berada di Kecamatan Cisalak.

Kabupaten Indramayu

Keadaan Penduduk

Pada tahun 2004 jumlah penduduk di Kabupaten Indramayu sebanyak 1.686.582 jiwa dan meningkat pada tahun 2005 menjadi 1.697.546 jiwa. Dengan demikian terjadi peningkatan sebanyak 10.964 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,65 persen. Sedangkan angka kepadatan penduduk Kabupaten Indramayu adalah 844.415 jiwa/km^2. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Karangampel yaitu sebesar 2.022.988 jiwa/km^2, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Terisi yaitu 275,82 jiwa/km^2. Adapun komposisi jumlah penduduk Kabupaten Indramayu terdiri dari laki-laki 858.837 jiwa dan perempuan 836.709 jiwa dengan angka rasio jenis kelamin sebesar 103 yang berarti dari setiap 100 perempuan terdapat 103 laki-laki. Pada dasarnya masyarakat Indramayu merupakan masyarakat yang agamis dan religius dengan keragaman agama yang dianut. Agama Islam adalah agama yang memiliki jumlah penganut sebesar (98,77%), kemudian Protestan (0,16%), Katolik (0,10%), Hindu (0,014%), Budha (0,013%).

Kabupaten Indramayu memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat yang religius, maju, mandiri dan sejahtera.

Religiu : Diartikan bahwa masyarakat Indramayu diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama secara baik dan benar, sehingga dapat tercermin dalam pola berfikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai Agama yang diyakininya.

Maju : Diartikan bahwa masyarakat Indramayu cerdas terampil, bergerak dinamis, kreatif inovasi serta tangguh menghadpi tantangan.

Mandiri : Diartikan bahwa segala sumberdaya yang dimiliki sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indramayu, sehingga sesuai dengan nafas dan tujuan hakiki penyelenggaraan otonomi

Sejahtera : Diartikan bahwa masyarakat Indramayu memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesehatan yang baik, sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.

Visi tersebut dijabarkan dalam tujuh langkah operasional yang telah ditetapkan dalam bentuk misi yang dikenal dengan "Sapta Karya Mulih Harja" yaitu melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia berbasis nilai agama dan budaya, peningkatan kinerja pemerintah daerah yang mandiri dan bebas KKN, pemantapan struktur perekonomian masyarakat dan pengembangan potensi daerah, pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar pemukiman, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan ketentraman dan ketertiban.

Untuk menuju masyarakat yang religius, maju, mandiri dan sejahtera tidak bisa terlepas dari kualitas sumberdaya manusia yang ada. Hal itu membuktikan bahwa masyarakat Indramayu, meskipun indeks pendidikan masih berada diposisi bawah di Jawa Barat, tetapi menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Indramayu saat ini telah bertahap melakukan berbagai upaya pembenahan dan peningkatan sumberdaya manusianya.

Pendidikan

Saat ini telah berkembang 9 lembaga pendidikan tinggi yang ada di Indramayu diantaranya adalah Universitas Wiralodra (UNWIR), Akper Pemda Indramayu, Akamigas, Amik Purnama Niaga, dan lain-lain. Meskipun masih berskala lokal dan belum terlalu dikenal di Indonesia tetapi telah banyak memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan sumberdaya manusia di Kabupaten Indramayu melalui peningkatan kemampuan intelektual dan komunikasi. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah berkembang sedemikian rupa sebagai pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan serta teknologi dan memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat secara luas.

Indeks Pembangunan Manusia

Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan secara makro, maka capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2005 adalah 67,00 dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) adalah 68,57%, sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) adalah 69,63 tahun serta Angka Daya Beli Masyarakat adalah 62,81.

Dalam rangka mendukung pencapaian IPM 80 di Jawa Barat dan agar dapat lebih meningkatkan akselerasi IPM di Indramayu, Pemerintaha Daerah secara konsisten telah memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berimplikasi lamgsung terhadap peningkatan IPM serta secara serius membuat suatu program kegiatan yang inovatif dan kreatif dalam rangka akselerasi IPM tersebut. Hal ini ditandai dengan terpilihnya Indramayu sebagai salah satu dari sembilan Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang menerima dana stimulant dari propinsi dalam Program Pendanaan Kompetisi (PPK) untuk akselerasi pencapaian IPM 80 Jawa Barat pada tahun 2010.

Mata Pencaharian

Penduduk pedalaman Indramayu termasuk golongan petani. Setelah berlangsung proses Javanisasi, maka kehidupan berladang itu berangsur-angsur beralih kepada pola hidup bersawah. Prosesnya panjang, dimulai lebih dahulu di delta sungai Cimanuk yang tanahnya subur, baru kemudian di zaman Mataram kehidupan bersawah yang dikerjakan oleh orang-orang dari Jawa semakin meluas, terutama dalam hubungannya dengan kebutuhan perbekalan pasukan Sultan Agung yang akan menyerang Betawi.

Adapun penduduk pesisir Indramayu sesuai dengan lingkungannya, sebagian besar hidup sebagai nelayan yang mata pencariannya menangkap ikan di laut. Malahan penghidupan sebagai nelayan bagi penduduk Indramayu jauh lebih tua dari pada penghidupan berladang dan bersawah.

Pelayaran Dan Perdagangan

Berdasarkan laporan orang Protugis diketahui bahwa pada awal abad ke XVI M di Indramayu sudah ada pelabuhan yang cukup besar dan banyak pedagang asing dari berbagai negeri bermukim di pelabuhan Cimanuk dan berdagang dengan penduduk setempat. Selain bergerak dalam bidang perdagangan, ada pula diantaranya yang bergerak dalam bidang jasa angkutan laut yang dalam dunia business modern sekarang disebut Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). Mereka berlayar dari Indramayu ke Sunda Kepala, Banten, Jepara, Tuban, Madura, Kalimantan, bahkan sampai ke Malaka dan Philipina.

Perumahan Dan Pakaian

Sifat yang paling menonjol dari masyarakat lading ialah kebiasaan berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain mengikuti ladangnya. Pengaruh langsung dari kebiasaan itu tentulah dalam hal bangunan rumah harus sederhana bentuknya, sehinga mudah dibongkar dan dipasang kembali dan biasanya terdiri dari bangunan berkolong (panggung). Pada umumnya rumah-rumah masyarakat lading beratapkan rumbia. Sampai dengan tahun 1670 rumah-rumah di Indramayu masih terdiri dari bambo dan kayu, tetapi seperti dikatakan Valentijn, cukup baik.

Adapun mengenai pakaian, berhubung pada masa itu kapal dagang asing sudah banyak yang masuk ke Indramayu yang antara lain membawa barang-barang tekstil, setidak-tidaknya penduduk di sekitar pelabuhan sudah bisa membeli tekstil yang masuk ke pelabuhan Indramayu. Sementara penduduk pedalaman sudah pula memintal dan menenun pakaiannya sendiri.

Kain batik pada masa itu mungkin Indramayu belum memproduksinya sendiri, karena produksi batik di Indramayu diperkirakan baru dimulai sejak masa kerajaan Demak, karena banyak pengrajin dari Lasem yang hijrah ke Indramayu. Oleh karena itu batik Indramayu hampir sama motifnya dengan batik Lasem yang di dalamnya terdapat unsur-unsur Cina. Meskipun begitu batik dari Jawa Tengah itu sudah masuk ke Indramayu lewat para pedagang yang mondar-mandir antara Jepara dan Banten.

SEPINTAS TENTANG BUDAYA PANTAI UTARA JAWA BARAT

Sejarah Kabupaten Karawang

Sekitar abad XV Masehi, agama Islam masuk di Karawang dibawa oleh ulama besar Syeikh Hasanudin bin Yusuf Idofi dari Jampa yang terkenal dengan sebutan Syeikh Quro, sebab di samping ilmunya yang sangat tinggi, beliau merupakan seorang Hafidz Alquran yang bersuara merdu, kemudian ajaran agama Islam yang telah beliau syiarkan dilanjutkan penyebarannya oleh para wali yang dikenal dengan *WALI SANGA*. Setelah Syeikh Quro wafat, beliau dimakamkan di Kampung Pulo Bata, Desa Pulo Kalapa, Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang.

Pada masa itu daerah Karawang sebagian besarnya masih merupakan hutan belantara, serta daerah yang dikelilingi oleh rawa-rawa. Hal ini pula yang menjadikan dasar pemberian nama Karawang, yang berasal dari bahasa Sunda yaitu *KA-RAWA-AN*, yang memiliki arti tempat atau daerah yang berawa-rawa. Bukti lain yang dapat memperkuat pendapat tersebut adalah selain daerah rawa-rawanya yang juga masih tersisa hingga saat ini, banyak juga tempat di daerah Karawang ini yang penamaannya diawali dengan kata *RAWA*, seperti misalnya Rawasari, Rawagede, Rawamerta, Rawagempol dan lain-lain (Sejarah singkat hari jadi Kabupaten Karawang berikut silsilah dan urutan para bupatinya).

Dengan SK No 12 tanggal 29 Januari 1949, Wali Negara Pasundan memecah Karawang lama yang terdiri dari 8 Kawedanaan, yaitu Purwakarta (ibukota Kabupaten), Cikampek, Karawang, Rengasdengklok, Ciasem, Subang dan Sagalaherang menjadi dua, salah satunya Kabupaten Karawang, dengan ibukotanya Karawang, meliputi tiga wilayah kawedanaan, yaitu Kawedanaan Karawang, Kawedanaan Rengasdengklok, dan Kawedanaan Cikampek.

Nilai Sosial Budaya

Berbagai upacara dilakukan dan kesenian diciptakan oleh masyarakat karawang sebagai aktualisasi dari nilai-nilai sosial budayanya.

Hajat Bumi

Hajat bumi merupakan upacara adat tradisional di kalangan para petani baik itu petani palawija, maupun petani tanaman pangan (padi) yang sudah turun temurun dan keberadaannya masih dipertahankan. Upacara ini dilaksanakan satu tahun satu kali setiap menghadapi musim awal tanam. Oleh karenanya hajat bumi disebut juga selamatan bumi. Upacara ritualnya disebut babarit.

Upacara Nyalin

Upacara nyalin merupakan rangkaian upacara ritual yang masih dilaksanakan sebagian kecil para petani. Nyalin asal kata salin yang artinya mengganti oleh karena itu upacara ini dilaksanakan ketika tanaman hendak dipanen dan akan diganti dengan tanaman yang baru. Upacara ini dilaksanakan satu tahun satu kali dan dilaksanakan secara individu.

Upacara Nganyaran

Nganyaran asal kata anyar artinya baru oleh karena itu upacara ini dilaksanakan setelah selesai panen dan diselenggarakan secara individu. Maksud upacara ini bagi yang meyakininya sebagai penghormatan kepada Dewi Sri bahwa hasil panennya akan segera dinikmati. Upacara ini merupakan acara ritual petani di dalam bercocok tanam

Upacara Tradisional Nadran

Nadran adalah upacara tradisional pesta laut yang masih diselenggarakan oleh masyarakat nelayan Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang mereka menyebutnya kaulaun atau syukuran. Sebenarnya sebutan untuk upacara pesta laut atau nadran dalam agama Islam disebut nadar tapi kemudian timbul dialek masyarakat nelayan menjadi nadran dan nyadaran

Kesenian Ketuk Tilu

Kesenian ketuk tilu merupakan tari pergaulan yang dalam pertunjukannya terdapat kontak komunikasi antara pemain (penabuh), ronggeng/penari dan penonton. Pada mulanya tari ketuk tilu diduga kuat sebagi seni ritual yang difungsikan sebagai media dan pelengkap upacara, khususnya upacara penghormatan pada Dewi sri. Kedudukan ronggeng berperan sebagai saman atau pawang/pemimpin upacara. Bukti-bukti kearah itu dapat dilihat dari peristiwa ritus pertanian. Selain itu dibeberapa daerah, tari ketuk tilu masih dijadikan sarana upacara pada musim tanam. Ini menandakan bahwa tari ketuk tilu berawal dari seni upacara.

Bentuk pertunjukan seperti itu menurut keterangan sumber, diketahui telah ada sejak sekitar awal abad 20. Konon di Ujung Berung pada`waktu itu terdapat rombongan ketuk tilu yang dipimpin oleh Abah Aryani (Alm) dan sebagai centengnya Aki Sanapi (Alm) warga kampung Cijambe Ujung Berung, Kotamadya Bandung.

Rombongan ketuk tilu tersebut berkembang secara turun temurun. Pada perang Dunia I rombongan ketuk tilu Ujung Berung dipimpin oleh Abah Madro'i. Pada revolusi kemerdekaan aktivitas kesenian ketuk tilu terhenti dan pada pertengahan tahun 1973 persatuan seni sunda Sekar Famili Ujung Berung yang dipimpin oleh Yoyo Yohan membangkitkan kembali kesenian itu yang digali dari para tokoh ketuk tilu eks rombongan Abah Madro'i

Kesenian Jaipongan

Kesenian jaipongan adalah kesenian yang berasal dari Karawang dan hasil kreasi para seniman Karawang. Istilah jaipongan itu sendiri berasal dari bunyi tepak (pukulan) kendang yang di refleksikan melalui mulut JA'IPONG...JA'IPONG BLAKTUK...BLAKTUK. Hal tersebut terus dilakukan karena selain iramanya enak di dengar juga mendorong orang yang mendengarnya untuk bergerak mengikuti irama gendang.

Jaipongan muncul sebagai fenomena hiburan yang menarik minat masyarakat. Para penari jaipongan bukan saja membawakan tarian jaipongan secara mandiri di atas panggung, namun juga melayani penggemar yang berminat menari jaipongan. Suasana kemudian berubah, karena kesenian jaipongan mampu membawa penonton untk ikut larut dalam menikmati kesenian itu sebagai penari.

Seni jaipongan yang berkembang di Karawang kemudian dikenal dengan jaipongan gaya kaleran sebutan muncul setelah seni jaipongan menyebar ke berbagai daerah di luar Karawang Hal ini mengandung arti bahwa jaipongan khas Karawang memiliki ciri tersendiri. Ciri khas jaipongan Karawang (gaya kaleran) ialah keceriaan, erotisme, humorisme, semangat, spontanitas dan kesederhanaannya. Hal in tercermin dalam pola penyajian tariannya, ada yang diberi pola-pola seperti seni jaipongan yang berkembang di Bandung, juga ada tarian yang tidak dipolakan yang biasa disebut ibing saka (saka-singkatan sakahayang-sekehendak)

Dalam penyanjiannya, jaipongan gaya kaleran secara kronologis sebagai berikut:

1. Tatalu (Gending pembuka)
2. Lagu-lagu pembuka seperti:
   - Kembang Gadung
   - Buah Kawung
3. Tarian pembuka (ibing pola) biasanya dibawakan oleh penari tunggal
4. Jeblokan dan jabanan, yang merupakan bagian pertunjukan ketika para penonton (bajidor) nyawer (memberikan) uang (jabanan) sambil salam antara sinden dengan seorang penonton/bajidor (Enceh Atma Subrata dkk, 206:80).

Kesenian Kliningan

Kliningan merupakan jenis kesenian yang berkembang di Karawang sebagai serapan kesenian yang datang dari wilayah Priangan. Kesenian ini pernah mencapai masa kejayaannya pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Pada saat itu kliningan menjadi aset kesenian yang paling diminati sehingga pada setiap kesempatan terutama pada musim hajatan kita mendapatkan kesenian kliningan sebagai hiburan alternatif.

Menurut Atik Sopandi, S.Kar dkk (1994:15) kliningan berasal dari kata klining yaitu salah satu waditra berupa gender pada gamelan Jawa. Namun pada kenyataannya waditra klining tidak digunakan dalam penyajian kliningan. Walaupun demikian nama kliningan tetap dipakai untuk jenis kesenian ini. Gamelan yang digunakan selengkapnya adalah gamelan berlaras salendro.

Dalam perkembangannya kliningan di Karawang mengalami pasang surut, dan bahkan kini mengalami masa-masa sulit. Hal ini disebabkan oleh perubahan minat masyarakat terhadap jenis hiburan. Upaya survive yang dilakukan kemudian adalah dengan menggabungkan kliningan dengan jaipong, sehingga pada penyajiannya selain lagu-lagu kliningan ditampilkan juga tari jaipongan, sehingga suasana menjadi lebih hidup.

Jenis kesenian gabungan ini berkembang sejak akhir tahun 1970-an dan berkembang hingga sekarang. Masyarakat Karawang kemudian menyebut jenis kesenian ini cukup dengan sebutan jaipongan tanpa menambahkan kata kliningan di depannya.

Aspek Budaya sebagai Daya Tarik Pariwisata

Kepariwisataan Kabupaten Karawang merupakan salah satu sub sektor pembangunan yang terus menerus diupayakan secara sungguh-sungguh sehingga pada gilirannya dapat didayagunakan sebgai salah satu andalan kegiatan perekonomian daerah maupun nasional. Berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu daerah akan memberikan pengaruh yang besar di dalam mendorong pembangunan sektor lain yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan.

Kabupaten Karawang sebagai salah satu kabupaten di propinsi Jawa Barat bagian utara, memiliki cukup banyak potensi wisata baik wisata alam maupun wisata budaya yang sangat memadai untuk dikembangkan menjadi daya tarik bagi kunjungan wisatawan, hanya saja penataan dan pengembangan berbagai potensi tersebut masih harus terus ditingkatkan sehingga mampu menjadi penyumbang bagi Pendapatan Asal Daerah (PAD) yang potensial.

Pembinaan, pengembangan dan pelestarian aspek kebudayaan di Kabupaten Karawang terus diintensifkan dalam rangka menunjang sektor kepariwisataan melalui kerja sama secara intern kelembagaan Dinas Penerangan Pariwisata dan Budaya Kabupaten Karawang maupun kimitraan dengan para seniman, budayawan, maupun dengan para pengguna jasa pariwisata. Melalui keprofesionalan para seniman dan budayawan, tentunya dapat diminta jasa dan kemampuannya untuk memperkenalkan seni dan budaya Karawang yang memadai untuk menunjang pembangunan kepariwisataan.

Demikian pula dimana seni dan budaya tersebut harus ditampilkan sesuai dengan minat para wisatawan. Karena itu tata cara peragaannya pun memerlukan seni dan budaya tersendiri, dan untuk itulah hanya para seniman dan budayawan yang dapat merekayasanya, termasuk bagaimana harus mendidik dan melatih para pemandunya yang sekarang ini belum ada pemandu wisata budaya atau lainnya yang betul-betul profesional. Sampai sekarang, belum ada para penglola kegiatan kepariwisataan yang mampu memperkenalkan kualitas dan kuantitas mutu dayaa tarik wisata berbagai benda peninggalan sejarah daan purbakala, museum, benda seni, maupun peragaan seni di Karawaang. Padahal benda peninggalan sejarah, benda hasil seni baik seni lukis, seni karya, maupun seni pertunjukkan tradisional khas Karawang sangat banyak diminati para wisatawan. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya kerjasama lintas sektoral untuyk memajukan seni dan budaya secara konsisten sehingga dapat dijadikan daya tarik kepariwisataan di Kabupaten Karawang.

Sejarah Kabupaten Subang

Subang terletak di sebelah utara Kota Bandung kira-kira 60 km yang terkenal dengan buah nanas madu. Jika dari arah Bandung untuk menuju Subang maka akan meliwati daerah objek wisata seperti Tangkuban Perahu dan Ciater yang penuh dengan mitos.

Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti sejarah nama Subang berasal, apakah Subang berasal dari *ASU-ABANG?*, sedangkan arti *SUBANG* adalah *SUWENG* dalam bahasa Sunda. Ku (Su) bang atau Subang Kualalumpur atau Dewi Subang Larang dan lain-lain.

Dalam buku Babad Siliwangi terdapat nama Dewi Subang Larang, sedangkan dalam buku sejarah Galuh terdapat nama Nyai Ratu Subang Karancang, dan semua ada hubungannya dengan nama-nama di atas. Jika catatan pribadi Rd. Kertadilaga (Demang Pamanukan almarhum) yang dikutip kembali oleh Bapak Rd. Barlen (pensiunan pegawai Djawatan Penerangan Kabupaten Subang) dihubungkan lagi dengan keterangan Dr. De Haan.

Proses pembentukan Subang dikaitkan dengan sejarah sejak P.W. Hoffland mulai memegang perusahaan P&T berdasarkan R.R. Pada tahun 1854, P.W. Hoffland mengangkat demang-demang yang bertugas baik dalam lapangan kepolisian, kesejahteraan umum, penarikan cukai maupun dalam soal tindak pidana/perdata, diantaranya terdapat demang yang berkedudukan di Ciherang di Gang Tua. Kademangan kemudian dipindahkan ke Wanareja dengan alasan-alasan yang kurang jelas.

P.W. Hoffland yang sudah menetap tidak jauh dari atelier, mulai membuka perusahaan tebu di Subang sekarang, sedangkan di luar daerah tersebut perusahaan kopi. Pendirian perusahaan tebu di daerah ini sebagai perluasan kebun tebu dari Cirebon ke arah sebelah barat. Karena pada waktu itu penduduk Subang masih jarang, maka P.W. Hoffland mendatangkan pekerja-pekerja dari luar untuk mengolah tebu, diantaranya dari Cirebon, Majalengka, Rajagaluh, Kuningan dan lain-lain. Pekerja-pekerja pendatang dari luar daerah ini menetap tidak jauh dari pabrik penggilingan tebu di sekitar atelier sekarang.

Ada cerita yang mengatakan bahwa perkampungan Subang dulunya berada di Cirebon sekarang, yaitu sebelah utara Cileudeuy. Cipanggilingan adalah selokan tempat-tempat pembuangan air dari pabrik tebu Tuan Hoffland tersebut. Pendatang baru pekerja tebu yang diantaranya ada yang berasal dari Subang Kuningan kemudian menamakan babakan barunya Subang dan juga babakan baru ini menjadi suatu perkampungan yang agak besar di samping Pasirkareumbi dan kampung Cigadung. Ternyata bahwa tuan tanah P&T menjadikan daerah di sekitar atelier itu sebagai pusat perkebunan. Ditambah oleh seringnya Wanareja menghadapi gangguan terutama dari binatang buas seperti harimau. Tuan tanah memindahkan pusat Kademangan dari Wanareja ke Subang. Berdirilah Kademangan Subang, dan kantor Demang Subang bertempat di Kantor Kewedanaan Subang yang letaknya hanya beberapa puluh meter di sebelah barat Tugu Kemerdekaan di depan Wisma Karya. Mengingat semakin pentingnya kedudukan Subang sebagai pusat P&T, Demang Subang berfungsi pula sebagai Hoofd Demang yang membawahi beberapa demang lainnya. Kesimpulannya bahwa nama Subang sampai saat ini belum jelas, walaupun dugaan sementara nama Subang baru ada abad pertengahan ke 19 (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Subang.2003:157-158).

Secara geografis Subang sebagai lintas sektoral jalur Jakarta sampai dengan Surabaya yang dikenal dengan istilah jalur Pantura. Otomatis daerah ini banyak diliwati oleh berbagai kendaraan dan orang-orang dari berbagai daerah yang memunculkan di lingkungan sekitarnya berbagai tempat untuk istirahat seperti restoran, warung remang-remang, penginapan dan lain-lain. Kota Subang memiliki slogan *SUBANG BERSERI (SUBANG BERSIH, SEHAT, RAPI, INDAH)*. Sekarang istilahnya lain lagi *RAKYAT*

SUBANG GOTONG ROYONG, SUBANG MAJU (Menurut Bapak Eep Hidayat sebagai Bupati Subang).

Sejarah Kabupaten Indramayu

Pendiri Indramayu adalah Raden Wiralodra yang berasal dari daerah Bagelen Jawa Tengah, putra dari seorang Tumenggung yang bernama Gagak Singalodra. Sejak masih kecil Raden Wiralodra memiliki cita-cita yang amat tinggi, yaitu ingin membangun sebuah negara untuk diwariskan kelak kepada cucu-cucunya. Oleh karena itu, untuk mencapai cita-citanya Raden Wiralodra gemar sekali melatih diri dalam olah kanuragan, tirakat dan bertapa sebagaimana lazimnya perikehidupan seseorang yang bercita-cita menjadi kesatria. Raden Wiralodra sedang menjalankan tapa brata dan semedi diperbukitan Melaya di kaki Gunung Sumbing. Setelah melampaui masa tiga tahun, ia mendapatkan wangsit/petunjuk yang berbunyi : "Hai Wiralodra, apabila ingin berbahagia serta keturunanmu di kemudian hari, pergilah merantau ke arah matahari terbenam dan carilah lembah sungai Cimanuk dan manakala engkau telah tiba di sana berhentilah dan tebanglah belukar secukupnya untuk mendirikan sebuah pedukuhan dan menetaplah di sana. Kelak itu akan menjadi subur dan makmur dan tujuh keturunanmu akan memerintah di sana".

Raden Wiralodra pergi kelembah Sungai Cimanuk untuk mendirikan padukuhan dengan berbekal senjata Cakra Undaksana dengan itemani Ki Tinggil dan tokoh-tokoh lain pendiri pendukuhan seperti Aria Kemuning (putra dari Ki Gede Lurah Agung yang diangkat putra oleh Putri Ong Tien dan isteri dari Sunan Gunung Jati), Ki Buyut Sidum dan Pangeran Guru. Pendukuhan itu berkembang dan oleh Raden Wiralodra diberi nama "Darma Ayu" yang diambil dari nama seorang wanita yang dikagumi karena kecantikan dan kesaktiannya yaitu Nyi Endang Darma Ayu juga dapat diartikan sebagai "Kewajiban yang Utama" atau "Tugas Suci". Pedukuhan Cimanuk tersebut., setelah terbebas dari kekuasaan Pajajaran, oleh Raaden Wiralodra, pada tahun 1527 berubah nama menjadi "INDRAMAYU" tepatnya pada hari Jumat Kliwon tanggal 1 Muharam 934 H atau 1 Sura 1449 dan jatuh pada tanggal 7 Oktober 1527. Tanggal tersebut sekarang resmi digunakan sebagai hari jadi Indramayu.

Kemudian nama Dharma Ayu diciptakan pula oleh Raden Wiralodra, sebagai kenangannya terhadap seorang wanita yang cantik dan dikaguminya yaitu Nyi Endang Dharma, yang akhirnya oleh masyarakat Indramayu dipanggil Nyi Dharma Ayu menjadi Dermayu, berarti "kewajiban yang utama" atau lebih populer sebagai "tugas suci". Nama Dermayu sudah dikenal dalam sejarah sejak akhir abad ke XVI, namun belum diketahui secara pasti tahun berapa nama Dermayu lahir, yang kemudian diberi dalam bahasa Belanda diberi imbuhan "IN" berarti DI, dan "DERMAYU" menjadi INDRAMAYU. Inilah suatu gambaran sekilas tentang Indramayu yang sekarang berada di daerah pesisir utara Jawa Barat.

Pernyataan bebas itu diumumkan oleh Wiralodra dalam suatu upara peresmian yang dihadiri oleh semua penduduk, dimana sekaligus diumumkan pula bahwa mulai saat itu nama Cimanuk diganti menjadi "DARMA AYU". Nama "Darma Ayu" berasal dari nama samaran Nyi Mas Gandasari ketika ia bermukim di Indramayu, yaitu "Endang Darma". Akan tetapi karena orangnya cantik, luwes dan ramah tamah, menyebabkan ia sangat dihormati dan disegani oleh rakyat Indramayu, sehingga mereka biasa memanggilnya dengan sebutan Nyi Darma Ayu.

Nyi Endang Darma alias Nyi Mas Gandasari itu kelak akan menjadi istri Wiralodra. Menurut dogeng rakyat, mereka telah memadu asmara di bukit Marongge, ketika Nyi Endang Darma dikejar-kejar oleh Wiralodra dalam suatu pertandingan mengadu kesakitan. Maka untuk mengenang masa lalu yang indah itu, ia mengabadikan nama "Darma Ayu" untuk daerah Cimanuk yang baru dibebaskannya dari kekuasaan Pajajaran.

Menurut penelitian Team Peneliti Sejarah Indramayu, peristiwa itu terjadi pada hari Jum'at kliwon tanggal 1 bulan Sura, tahun 1449 S, atau tanggal 1 bulan Muharram tahun 934 H, yang bertepatan dengan tanggal 7 bulan Oktober tahun 1527 M. Titimangsa itu (7 Oktober 1527) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dalam Sidang Paripurnanya pada tanggal 24 Juni 1977, sebagai "HARI JADI INDRAMAYU" (lihat lampiran)

Kata "Darma" menurut W.J.S. Purwadarminta berasal dari bahasa kawi, yang artinya:

1. Kewajiban, keutamaan, penggawe becik;
2. Wewarah, angger-angger;
3. Papan suci, candi, kuburan;

Sedangan arti kata "Ayu" berasal dari:

1. Kawi, berarti: becik, slamet, reja;
2. Jawa kuno, berarti; becik rupane,

Dengan demikian maka kata "darma-ayu" dapat diartikan "kewajiban yang utama atau lebih populer "tugas suci" . Demikianlah maka kata "Darmayu" berubah menjadi "Dermayu", seperti yang sampai sekarang masih dipakai oleh rakyat Indramayu dalam percakapan sehari-hari, dan masih ada desa di kecamatan Sindang yang bernama "Dermayu", mungkin disitulah lokasi kota Indramayu yang pertama.

Karena posisi wilayah yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, maka budaya Indramayu, merupakan akulturasi dari budaya Jawa dan sunda, sehingga memiliki keunikan-keunikan yang tidak dimiliki daerah lain. Selain itu, masyarakat Indramayu juga memiliki karakter yang keras akan tetapi tetap menjunjung tinggi sikap saling menghormati, mengasihi antar sesame serta bersikap dan berkata apa adanya tanpa ada tendesi lain dibelangnya.

Dengan keragaman yang ada, kehidupan antara umat beragama dalam berinteraksi tetap dapat berjalan dengan harmonis, dengan selalu menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Masyarakat Indramayu juga merupakan masyarakat yang terbuka akan perubahan dan pembaharuan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan serta transformasi nilai social dan budaya dalam era kompetisi global sekarang ini, yang dapat ditunjukkan dengan keberanian mereka untuk berinteraksi dengan dunia luar.

Dengan kondisi masyarakat yang heterogen dan terdapat banyaknya akulturasi social budaya yang terjadi, namun dalam hal keamanan, masyarakat Indramayu mampu mempertahankan stabilitas keamanan, serta menjaga suasana yang kondusif. Keadaan tersebut dapat dilihat pada saat proses demokratisasi yang baru saja dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dalam pemilihan kepala daerah dimana pemilihan tersebut dapat berlangsung secara aman, lancer, demokratis, jujur dan adil kendati terjadi banyak perbedaan aspirasi politik yang tajam di masyarakat.

Upacara Tradisional

Sedekah Bumi

Sedekah bumi adalah suatu bentuk upacara tradisional yang diselenggarakan oleh rakyat Kabupaten Indramayu. Sedekah bumi ini diselenggarakan di tiap-tiap desa menjelang para petani akan mengerjakan sawahnya. Biasanya berlangsung di pengujung musim kemarau dan menjelang musim hujan, yaitu di sekitar bulan September.

Seperti halnya upacara tradisional yang lain, sedekah bumi pun sesuai dengan namanya "**SEDEKAH**" yaitu selamatan menyambut datangnya musim penghujan, yng diselenggrakan di balai desa dengan nanggap wayang yang mengambil cerita khusus yaitu "**BUMI-LOKA**". Bumi – Loka adalah tokoh wayang yang menurut cerita Ki Dalang adalah putra Prabu Natakawaca.

Mapag Sri

Mapag Sri adalah suatu upacara tradisional yangn masih hidup subur di kalangan masyarakat petani Indramayu. *"Mapag"* dalam bahasa Indonesia berarti "menjemput". Sedang yang dimaksud dengan "Sri" ialah "Padi". Dengan demikian, maka mapag-sri berarti menjemput padi.

Mapag-Sri biasanya diselenggarakan menjelang musim panen sekitar bulan Maret atau April, karena panen besar di Indramayu berlangsung sekitar bulan Mei dan Juni. Namun demikian upacara mapag-sri itu tidak sama di semua desa. Bagi desa-desa yang musim panennya belakangan, maka upacara mapag sri nya pun akan diselenggarakan menjelang musim panen ditempat tersebut.

Upacara mapag sri diselenggarakan dalam bentuk selamatan yang dilangsungkan oleh desa dan bertempat di Balai Desa. (di Indramayu Balai Desa dinamakan Lebu. Mungkin berasal dari Palebon, yakni tempat menyimpan abu mayat setelah dibakar). Biayanya dikumpulkan dari patungan rakyat. Pada tiap-tiap diadakan upacara mapag-sri di Balai Desa diadakan pertunjukkan wayang kulit yang mengambil cerita "DEWI SRI".

Nadran

Nadran adalah pesta nelayan yang dilaksanakan sebagai suatu syukuran. Kata " "NADRAN" itu berasal dari bahasa Arab "NADZAR" yang artinya "SYUKURAN" atau dalam bahasa Jawa biasa disebut "PEKAULAN". Apabila seseorang hendak mengerjakan sesuatu usaha, dan berjanji pada dirinya sendiri, jika usahanya berhasil, maka ia akan mengadakan selamatn, itulah yang disebut "NADZAR" atau "KAUL".

Upacara Nadran itu biasanya diselenggarakan sekitar bulan Nopember tiap-tiap tahun sesuai dengan keputusan rapat Nelayan. Lamanya hanya sehari semalam. Pada puncak acara Nadran itu sekitar jam 10.00 dihidangkan sesajen berupa kepala kerbau yang dihanyutkan di tengah laut dalam suatu perahu kecil yang dibuat khusus keperluan upacara itu. Sesajen Kepala kerbau itu ditujukan kepada Dewa ikan yang konon bernama "BUDUG-BASUH".

Sebagai suatu keharusan dalam tradisi Nadran itu ialah adanya pertunjukkan wayang kulit yang diselenggarakan ditempat pelelangan ikan atau di Balai Desa, selama sehari semalam. Adapun lelakon yang dipentaskan pada malam hari, bebas sekehendak Ki Dalang atau menurut permintaan panitia. Akan tetapi lelakon yang dipentaskan di siang harinya harus mengambil cerita "BUDUG BASUH".

Jaringan

Jaringan adalah suatu cara mencari jodoh secara tradisional. Tradisi "Jaringan" ini hanya berlaku di daerah Kecamatan Kandanghaur yang terletak ± 35km. Sebelah barat kota Indramayu. Itupun hanya di dua desa saja yaitu Desa Parean Ilir dan desa Parean Girang. Bagaimana tradisi Jaringan itu berlangsung, yaitu setiap malam terang bulan, antara tanggal 7 s/d 17 (10 malam) bulan Hijriah, muda mudi dari kedua desa tersebut diatas keluar dari desanya dan berkumpul di alun-alun Kawedanan Kandanghaur.

Apabila seorang pemuda menaruh hati pada seorang pemudi atau sebaliknya, maka sipemuda atau kadang kala juga sipemudi menepuk badan lawan yang dipilihnya. Apabila lawan yang ditepuk badanya setuju satu sama lain maka yang ditepuk itu membalas menepuk lagi. Sesudah itu mereka memisahkan diri dari kawannya sehingga mereka tinggal berdua saja kemudian menyisihkan diri dari arena Jaringan yang penuh sesak dengan muda mudi itu.

Selanjutnya mereka berunding untuk melakukan perjodohannya. Biasanya pertemuan semacam itu tidak hanya berlangsung sekali saja, tetapi berulang-ulang beberapa kali, sehingga intim dan bebas berbicara. Baru kemudian sesudah tercapai kesepakatan sipemuda mengantar pacarnya atau lebih tepat katakanlah tunangannya pulang ke rumah orang tua si Gadis. Setibanya di rumah si Gadis mengetuk pintu yang dibalas dari dalam dengan ucapan "Jeung saha nyaneh ju???" (dengan siapa engkau nak).

Pertanyaan tersebut mengandung makna "sudahkah engkau mendapat calon suami"? "Dengan teman" jawabnya. Di situ orang tua si Gadis boleh memastikan bahwa anaknya telah mendapat jodoh. Maka dibukalah pintu dan si pemuda dipersilakahkan masuk.

Kemudian antara orang tua si gadis dengan pemuda calon menantunya itu diadakan perundingan, sudah barang tentu berkisar sekitar diselenggarakannya perkawinan anaknya. Yang terpenting diantaranya ialah mengenai masa bakti calon menantu itu kepada calon mertuanya.

Masa bakti ialah bahwa si menantu untuk selama jangka waktu yang telah disetujui oleh keduanya biasanya berkisar diantara 2 – 3 tahun diharuskan tinggal di rumah sang mertua dan membantu pekerjaan mertuanya baik di sawah maupun diladang atau mengurus ternak perahu dan sebagainya. Setelah dicapai persetujuan, dilain waktu fihak orang tua laki-laki melamar kepada fihak orang tua si Gadis. Upacara melamar itu biasa disebut "Pasrahan". Dalam upacara pasrahan itu fihak laki-laki biasanya membawa bajak, tempat tidur berikut kasurnya, pedaring (tempat menyimpan beras) berikut isinya, tikar, dua butir bibit kelapa, setandan pisang yang sudah matang, kayu bakar dan lain-lain, yang biasanya diantar oleh keluarga si laki. Banyak atau sedikitnya, sarana pasrahan itu, sudah barang tentu bergantung pada kedudukan sosial bakal suami atau orang tuanya. Antara kedua wali itu diadakan perundingan mengenai waktu dilangsungkannya upacara perkawian.

Ngarot

Kata "Ngarot" ada yang mengatakan berasal dari bahsa Sunda yang artinya minum. Ngarot adalah upacara tradisional rakyat Indramayu yang berlaku di beberapa desa dalam Kecamatan Lelea (kl. 20 km sebelah barat daya kota Indramayu), yaitu desa Lelea, Nunuk, Pangauban, Tegal Bedug dan lain-lain. Dan satu desa lagi di Kecamatan Cikedung yang berdampingan dengan Kecamatan Lelea, yaitu desa Jambak.

Apa sebab di Kecamatan Cikedung hanya berlaku di beberapa desa saja. karena desa-desa di Kecamatan Cikedung sebagain besar merupakan desa baru (desa transmigrasi) yang kebanyakan penduduknya berasal dari Jawa. Oleh karena itu mereka tidak mengenal bahasa Sunda dan upacara ngarotpun tidak dikenal disana.

Upacara ngarot itu diselenggarakan pada saat para petani hendak memulai tebar di sawah, jadi setelah upacara sedekah – bumi, tanpa mengindahkan tanggal dan bulannya, hanya mengenal harinya biasanya jatuh pada hari rabu. Adapun bulannya sekitar triwulan terakhir setiap tahun, yaitu bulan Oktober, Nopember dan Desember, dimana para petani memulai mengerjakan sawahnya.

Upacara ngarot itu unik sekali, yang diawali dengan berkumpulnya para remaja, muda-mudi di rumah Kepala Desa yang di Indramayu disebut cuwu. Yang dimaksud dengan remaja disini ialah muda-mudi yang belum pernah kawin (jaka-lara). Para pemuda berpakaian biasa saja, yakni pakaian harian petani. Hanya ada sedikit kelainan bahwa diantara mereka ada yang membawa keris pusaka yang tidak dipakai sebagaimana lazimnya orang memakai keris, tetapi hanya dijinjing saja.

Ngunjung

Ngunjung adalah suatu tradisi yang masih hidup di kalangan masyarakat Indramayu, walaupun dibeberapa tempat telah agak kendur bahkan sudah berobah caranya. Adapun yang dimaksud dengan ngunjung disini ialah bersiarah kemakam para leluhur (cakal-bakal) terutama yang mendirikan desa dan kuburan nenek-moyang, dengan membawa sesajen. Tradisi ngunjung itu adalah warisan kebudayaan pra Islam yang dahulunya disebut 'srada". Pesta srada diselenggarakan di kuburan dengan mengadakan selamatan (kenduri) dan diramaikan dengan pertunjukan wayang, topeng, berokan dan lain-lain.

Tiap-tiap penduduk desa datang ke kuburan dengan membawa sesajen. Setelah sesajen itu dibacakan oleh wiku atau pendeta, kemudian dipercikan "toya tirta" pada kuburan para leluhur, maka sajen-sajen itu dimakan di situ dan ada yang dibawa pulang untuk keluarga di rumah.

Ruwat

Kata "ruwat" berasal dari bahasa Jawa kuno yang mengandung arti membebaskan diri dari hukuman Dewa. Diruwat berarti disarati agar selamat dari kutukan Dewa. Ruwatan artinya selamatan untuk membebaskan diri dari kutukan Dewa. Dengan kata lain ruwat berarti "tolak-bala". Demikian lah arti kata ruwat itu yang bagi rakyat Indramayu sudah tidak asing lagi, karena ruwat merupakan tradisi yang sudah lama berjalan dan diwarisi turun temurun. Adapun asal usul ruwat itu menurut dogeng rakyat, bersumber pada tokoh wayang bernama Betaara Kala. Konon Betara Kala itu adalah putra Betara Guru yang mempnunyai watak sangat rakus. Kegemarannya hanyalah makan yang enak-enak dan tidak pernah merasa kenyang. Untuk melayani segala keperluannya mendapatkan makanan, Betara Kala diberi pembantu oleh Dewa guru sebanyak 40 orang. Di samping itu ia juga mempunyai seorang juru masak bernama Biang Durga. Setiap harinya Biang Durga bekerja memasak makanan Betara Kala yang tidak pernah merasa kenyang itu.

Kebudayaan adalah merupakan bentuk kreativitas dan pengetahuan manusia sebagai mahluk social untuk memahami lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya untuk dapat bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Seni dan budaya juga merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia berupa ungkapan nurani terhadap hubungan antar sesama manusia,lingkungan sekitarnya dan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Hal tersebut dapat dilihat dari ekspresi kesenian dan budaya yang banyak mengandung filosofi kehidupan dan spiritualitas berupa harapan dan wujud syukur atas segala anugerah dari Sang Pencipta. Sehingga kesenian dan kebudayaan merupakan cerminan dari seberapa tinggi peradaban manusia yang dimiliki.

Ekspresi seni dan budaya yang ada di Indramayu merupakan cerminan akulturasi yang merupakan proses interaksi nilai-nilai di masyarakat. Interaksi tersebut dapat dilihat dari kesenian tarling, dimana Indramayu merupakan tempat lahirnya kesenian tersebut pada abad ke 16. Tarling merupakan perpaduan seni musik dan lagu-lagu yang pada awalnya ditampilkan dalam bentuk nyanyian (kiser) yang hanya diiringi oleh gitar dan sulingsaja. Sejalan dengan perkembangan, kesenian tarling mengalami perkembangan dan perubahan yang cepat. Saat ini kesenian tarling sudah dilengkapi dengan alat-alat musik yang modern dengan tetap tidak meninggalkan ciri khas dari kesenian tarling itu sendiri.

Kabupaten Indramayu yang berada di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa, memiliki tradisi tahunan upacara adapt nadran. Upacara ini merupakan sebuah cerminan dari hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta berupa ungkapan rasa syukur akan hasil tangkapan ikan dan mengharapkan peningkatan hasil di tahun mendatang serta dijauhkan dari bencana dan marabahaya dalam mencari nafkah di laut. Umumnya upacara adapt nadran ini diselenggarakan antara bulan Oktober sampai Desember yang bertempat di Pantai Eretan, Dadap, Karangsong, Limbangan dan Glayem.

Upacara adapt ngarot atau kasinoman dilaksanakan setiap hari Rabu, minggu keempat bulan November, pesertanya adalah para muda-mudi dengan kostum yang khas dan aksesoris yang gemerlap. Pada upacara adapt ngarot ini, digelar bersamaan juga dengan kesenian tradisional lainnya seperti tari topeng dan ronggeng ketuk selain dimeriahkan juga dengan adanya pasar malam yang berlangsung selama seminggu.

Selanjutnya ekspresi seni masyarakat Indramayu dapat dilihat dari berkembangnya kesenian tari topeng deermayon yang memiliki komposisi gerak tari yang khas dan dengan kostum topeng yang berciri spesifik yang membedakannya dengan tari topeng dari daerah lain. Tari topeng deermayon ini telah mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat, baik domestic maupun mancanegara. Seorang Maestro tari topeng dari Indramayu yaitu Ibu Rasinah sudah sering tampil sampai kemancanegara.

Sintren atau lais merupakan salah satu kesenian rakyat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat pesisir terutama pantai utara. Selain itu di Indramayu juga berkembang jenis kesenian tradisional yaitu kesenian genjring acrobat. Kesenian *tradisional ini menampilkan* atraksi dengan media tangga, sepeda beroda 1 (satu) dengan diiringi alat musik genjring/rebana dengan dilengkapi tari rudat.

Ekspresi seni budaya Indramayu yang khas menggambarkan kedalaman filosofi kehidupan dan mencerminkan akulturasi budaya serta transformasi nilai-nilai global dapat dilihat pada batik Indramayu. Perpaduan antara kepercayaan, adapt istiadat, seni dan lingkungan kehidupan daerah pesisir, ditambah dengan adanya pengaruh dari luar seperti Cina, Arab-Timur Tengah, Hindu-Jawa serta Eropa ikut mempengaruhi terbentuknya motif dan karakter dari batik tulis pesisir maupun kerajinan-kerajinan yang ada di Indramayu lainnya. Pengaruh kebudayaan Cina pada batik Indramayu terlihat pada motif lokcan, banji (swastika) dan burung hong (rajawali). Dikalangan masyarakat Cina, motif-motif tersebut merupakan symbol dari kehidupan yang mengandung makna bahwa ada kesatuan antara jiwa dan alam semesta. Sedangkan pengaruh kebudayaan Arab dapat dilihat dari motif-motif berupa kaligrafi Arab dan Sawah Riweh ("riweh" berarti keringat).

Berhubung sangat kurangnya bahan penelitian, maka dalam membahas kesenian rakyat Indramayu di zaman kerajaan Pajajaran akan dibatasi hanya sampai kepada bidang seni suara dan seni tari saja. Babad-Dermayu menceritakan ketika Wiralodra meresmikan berdirinya Dermayu, diadakan keramaian antara lain calung dan angklung memang merupakan alat musik yang paling sederhana dan cocok untuk masyarakat ladang, karena selain bahannya mudah didapat disekitar tempat itu, juga mudah dibawa pindah kemana-mana. Akan tetapi sumber itu menerangkan lebih lanjut bahwa dalam pesta peresmian itu Ki Tinggil ikut menari dengan amat jenakanya. Untuk suatu tarian orang tidak akan merasa puas hanya dengan diiringi oleh suara angklung atau calung, akan tetapi paling sedikit diperlukan gendang dan gong atau mungkin juga gambang yang kesemuanya bisa dibuat dari bahan yang bisa dengan mudah diperoleh.

Berhubung dengan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa dipenghujung masa kerajaan Pajajaran rakyat Indramayu sudah mengenal adanya gamelan dan tarian-tarian

Sintren atau lais merupakan salah satu kesenian rakyat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat pesisir terutama pantai utara. Selain itu di Indramayu juga berkembang jenis kesenian tradisional yaitu kesenian genjring acrobat. Kesenian tradisional ini menampilkan atraksi dengan media tangga, sepeda beroda 1 (satu) dengan diiringi alat musik genjring/rebana dengan dilengkapi tari rudat.

Ekspresi seni budaya Indramayu yang khas menggambarkan kedalaman filosofi kehidupan dan mencerminkan akulturasi budaya serta transformasi nilai-nilai global dapat dilihat pada batik Indramayu. Perpaduan antara kepercayaan, adapt istiadat, seni dan lingkungan kehidupan daerah pesisir, ditambah dengan adanya pengaruh dari luar seperti Cina, Arab-Timur Tengah, Hindu-Jawa serta Eropa ikut mempengaruhi terbentuknya motif dan karakter dari batik tulis pesisir maupun kerajinan-kerajinan yang ada di Indramayu lainnya. Pengaruh kebudayaan Cina pada batik Indramayu terlihat pada motif lokcan, banji (swastika) dan burung hong (rajawali). Dikalangan masyarakat Cina, motif-motif tersebut merupakan symbol dari kehidupan yang mengandung makna bahwa ada kesatuan antara jiwa dan alam semesta. Sedangkan pengaruh kebudayaan Arab dapat dilihat dari motif-motif berupa kaligrafi Arab dan Sawah Riweh ("riweh" berarti keringat).

Berhubung sangat kurangnya bahan penelitian, maka dalam membahas kesenian rakyat Indramayu di zaman kerajaan Pajajaran akan dibatasi hanya sampai kepada bidang seni suara dan seni tari saja. Babad-Dermayu menceritakan ketika Wiralodra meresmikan berdirinya Dermayu, diadakan keramaian antara lain calung dan angklung memang merupakan alat musik yang paling sederhana dan cocok untuk masyarakat ladang, karena selain bahannya mudah didapat disekitar tempat itu, juga mudah dibawa pindah kemana-mana. Akan tetapi sumber itu menerangkan lebih lanjut bahwa dalam pesta peresmian itu Ki Tinggil ikut menari dengan amat jenakanya. Untuk suatu tarian orang tidak akan merasa puas hanya dengan diiringi oleh suara angklung atau calung, akan tetapi paling sedikit diperlukan gendang dan gong atau mungkin juga gambang yang kesemuanya bisa dibuat dari bahan yang bisa dengan mudah diperoleh.

Berhubung dengan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa dipenghujung masa kerajaan Pajajaran rakyat Indramayu sudah mengenal adanya gamelan dan tarian-tarian walaupun mungkin masih sangat sederhana dan belum ada yang dibuat dari logam seperti gamelan yang dipergunakan orang sekarang.

Sejarah Perkawinan

Saudagar-saudagar muslim yang tersebar di segenap pelosok dunia itu, datang tanpa membawa keluarga. Mereka membentuk keluarganya ditempat baru dimana mereka bermukim dan kawin dengan wanita pribumi. Orang Islam pada umumnya enggan kawin dengan wanita yang bukan Islam, maka wanita yang hendak dikawininya itu di Islamkan lebih dahulu dengan cara yang mudah dan sederhana sekali, yaitu cukup hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat tanpa segala macam upacara dan pentasbihan yang berbelit-belit. Maka terbentuklah sebuah rumah tangga Islam dengan anak-anaknya yang kemudian menjadi muslim sehingga terbentuklah keluarga Islam. Mereka seperti juga yang lain ikut mengambil bagian dalam penyebaran agama Islam secara aktip sehingga dengan cepat agama Islam tersebar dikalangan masyarakat.

Perkawinan itu lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara seorang Islam dengan putera bangsawan, Adipati atau Raja, karena kedudukan keluarga si isteri akan membantu mempercepat proses Islamisasi, seperti perkawinan Raden Rahmat sunan ampel dengan Nyi Gede Manila putri Tumengggung Wilatikta yang kemudian melahirkan Sunan Bonang, perkawinan Said Ishak dengan putri Raja Blambangan yang kemudian melahirkan Sunan Giri dan perkawinan Sunan Gunung Jati dengan putri Kawungantan adik Bupati Banten-Girang yang kemudian melahirkan Sultan Hasanuddin dan sebagainya dan sebagainya.

Mungkin sistem perkawinan itu bukan suatu kebetulan saja tetapi sudah direncanakan dari sebelumnya. Kedudukan sosial mereka yang jauh lebih baik merupakan pelicin untuk terjadinya perkawinan semacam itu. Dengan demikian maka masyarakat Islam berangsur-angsur meluas dari kalangan atas sampai ke lapisan masyarakat di desa-desa.

Kesenian

Hampir semua cabang kesenian selama tidak menjurus kepada kejahatan oleh para wali dipergunakan sebagai media da'wah Islam, mulai dari seni sastera, seni tari, seni lukis, sampai kepada arsitektur atau seni bangunan.

Konon diceritakan bahwasanya lagu "asmara dana" dan "Pucung" yang masih dipakai orang sampai sekarang adalah ciptaan Sunan Giri. Gamelan ikut pula mengambil peranan dalam proses Islamisasi. Sejak zaman Demak gamelan istana dinamakan "sekati" yang konon berasal dari "Syahadati". Sampai sekitar tahun empatpuluhan yang pernah penulis ketahui di Surakarta, setiap grebeg mulud banyak rakyat laki-laki dan perempuan berkumpul dialun-alun mesjid Agung menanti gong sekati dipalu orang di istana. Mereka yang perempuan siap dengan sirih dan yang laki-laki siap dengan pecut. Manakala gong sekati berbunyi ramai-ramai pecut dibunyikan dan orang-orang perempuan mulai mengucah sirihnya.

Demikian besarnya pengaruh gong sekati di hati rakyat Solo dan Jogya, seperti halnya pengaruh panjang jimat Cirebon. Kesemuanya itu mempunyai sejarahnya masing-masing yang jelas ada kaitannya dengan usaha penyebaran agama Islam di kalangan masyarakat. Di lain pihak, seni taripun ikut mengambil peranan dalam proses Islamisasi penduduk, dimulai dari "rudat" yang mengiringi irama rebana dalam melakukan dzikir kepada Tuhan sampai tari kuda lumping yang mengejawantahkan sikap kaveleri Sahabat Hussin ketika diserang musuh-musuhnya di medan Karbala, ulet, kebal, sakti dan sebagainya sehingga digambarkan dengan makan beling, makan padi, makan api dan yang menunjukkan betapa saktinya pasukan kavaleri sahabat Hussin itu.

Seni Drama, seni lukis dan seni pahat mengambil bagiannya dalam penampilan wayang golek, yang konon kabarnya diciptakan oleh Sunan Kalijaga untuk mengimbangi wayang kulit yang bermotif ke Hinduan. Wayang golek mengambil ceritanya dari sejarah Nabi, sejarah wali dan sebagainya, sehingga muncul dari cerita wayang golek tokoh-tokoh seperti Umar Maya (Amar bin Amaya = Abu Jahal), Umar Mahdi (Sahabat Umar) dan Menak Kambyah (Sahabat Hamzah) dan lain-lain. Perlu dicatat disini bahwa wayang golek Cirebon dan Indramayu berlainan dengan wayang golek Sunda yang mengambil lakon wayang Purwa seperti halnya wayang kulit di Jawa Tengah. Karena wayang golek Sunda itu muncul setelah proses Mataramisasi. Oleh sebab itu meskipun dalam percakapan wayangnya memakai bahasa Sunda, tetapi dalam uraiannya dituturkan dalam bahasa Jawa. Pengaruh wayang kulit (Purwa) dari Jawa yang ternyata tidak dapat dibendung dengan penampilan wayang golek (Islam), oleh Sunan Kalijaga diadakan perubahan, yaitu dengan jalan menambah jumlah keluarga Karang Tumaritis menjadi sembilan orang yang terdiri dari Semar, Gareng, Cungkring, Bagong, Duwala, Ceblok, Cemuris, Bagalbuntung dan Bitarota. Mengapa sembilan, konon disesuaikan dengan jumlah wali, malahan ditonjolkan, bahwasanya keluarga Karangtumaritis itu adalah penjelmaan dari wali-sanga, yang sudah barang tentu dalam percakapannya menyinggung-nyinggung soal ke Islaman antara lain misalnya soal Jimat Kalima-sada yang dikenal sebagai jimat Judistira (Ratu Pendawa), oleh Sunan Kalijaga diidentikkan dengan kalimat Syahadat dalam Islam. Layang Kalima-sada adalah sebuah buku tentang pengobatan. Itulah sebabnya maka para walipun menggunakan kalimat syahadat sebagai bahan pengobatan. Sunan Kalijaga agaknya mengerti betul sampai sejauh mana pengaruh wayang dalam jiwa rakyat, oleh karena itu beliau senantiasa menggunakan wayang sebagai media da'wah.

Sejarah Klasifikasi Masyarakat Indramayu

Untuk mengetahui sekedar gambaraan sepintas kilas mengenai corak penghidupan masyarakat Indramayu pada zaman kerajaan Islam Demak dan Cirebon, kiranya ada baiknya kalau kita ketahui lebih dahulu susunan/lapipsan penduduk Indramayu pada masa itu. Adapun lapisan penduduk Indramayu pada masa itu dapat kita bagi dalam beberapa golongan, yaitu:

a. golongan bangsawan (aristokrat)
b. golongan elite
c. golongan non elite
d. golongan budak

Golongan elit itu dapat pula dibagi dalam beberapa golongan yaitu; golongan pedagang, golongan nelayan, golongan petani, golongan pengrajin dan golongan pekerja. Sudah barang tentu status sosial mereka berbeda satu sama lain, walaupun kriteria untuk menentukan status sosial sesuai golongan masyarakat, masih bersifat relatif sekali. Dengan berpedoman kepada relatifitas itu maka kita membagi lapisan masyarakat Indramayu pada masa kerajaan Islam, seperti pembagian tersebut diatas.

Golongan Bangsawan

Daerah Indramayu yang hanya merupakan bagian dari suatu kerajaan, mungkin tidak terdapat didalamnya lapisan bangsawan atau yang sering disebut golongan aristokrat, setidak-tidaknya pada masa awal peralihan dari kerajaan Sunda-Budha ke kerajaan Jawa Islam, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi kita membahasnya disini. Apabila di tiap-tiap kerajaan tradisionil Indonesia seperti Demak, Banten dan juga Cirebo terjadi kebiasaan kaum bangsawan juga menempati jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan, maka hal itu memang sesuai dengan tradisinya. Raja atau Sultan mempunyai pula nkebiasaan menempatkan keluarganya atau kaum kerabatnya dalam struktur birokrasi yang dianggap dapat memperkokoh kedudukkannya di bidang politik, ekonomi dan bahkan kulturil diantara golongan Raja dan keluarganya (dinasti).

Keluarga Raja yang telah memegang jabatan dalam struktur birokrasi itu tidak selalu ditempatkan di ibukota pusat kerajaan, tetapi ada juga yang ditempatkan di daerah-daerah sebagai Patih, Tumenggung, Ngabehi dan sebagainya, bahkan ada yang diangkat menjadi adipati yang langsung memimpin sesuatu daerah yang bersankutan.

Meskipun pada kita tidak ada data yang kongkrit mengenai pengangkatan semacam itu pada awal masa peralihan, namun untuk masa-masa selanjutnya tidak mustahil hal serupa itu terjadi juga di Indramayu,. Apakah pengangkatan Wiralodra di Indramayu ada sangkut pautnya dengan masalah itu, tidak begitu jelas.

Kerajaan-kerajaan yang bercorak di maritim di Jawa seperti Demak, Cirebon dan Banten, dalam kehidupan perekonomiannya tidak mempunyai basis agraris, melainkan perdagangan dan pelayaran. Karena itu pula maka di kota-kota pantai baik kekuasaan politik maupun kekuasaan ekonomi selalu dipegang oleh golongan aristokrat yang mendominasi perdagangan sebagai pemberi modal atau kadang-kadang sebagai peserta.

Pengawasan terhadap perdagangan dan pelayaran merupakan sendi kekuasaan mereka yang memungkinkan kerajaan/daerah memperoleh penghasilan dari pajak sebesar-besarnya. Jelaslah bahwa hubungan antara golongan raja-raja atau Sultan-sultan serta keluarganya, para bangsawan, pejabat-pejabat elite birokrat dengan perekonomian dan perdagangan erat sekali. Dengan demikian maka golongan tersebut bukan hanya mempunyai status yang tinggi dalam bidang politik dan sosial kerja, tetapi juga di bidang ekonomi. Tidak mengherankan kalau golongan aristokrat merupakan golongan yang berada yang mendapat penghasilan dari pajak, beacukai, upeti, hadiah-hadiah yang diterima dari beberapa utusan negara asing, hasil tanah yang dikerjakan oleh rakyatnya dan dari sumber-sumbr lain.

Di kalangan Raja-raja atau golongan aristokrat pada zaman sebelum dan sesudah pertumbuhan kerajaan-kerajaan bercorak Islam, terdapat pula kebiasaan berburu binatang dikalangan Raja-raja adalah kebiasaan dalam kehidupan golongan feodal yang dianggap sebagai sesuatu yang lebih daripadaa hanya sekedar olah-raga. Menurut Van Vollenhoven di daerah Priangan ada sebanyak 12.000 ha, tanah perburuan dimana Bupati-bupati Priangan berburu rusa sambil naik kuda. Demikian pula kebiasaan membuat taman baik di dalam maupun dim luar istana sebagai tempat peristirahatan Raja-raja dan para bangsawan. Di Banten dibuat sebuah taman di tengah-tengah danau buatan yang diberi nama "Tasik Ardi". Di Cirebon pun dibuat taman dari batu karang untuk tempat peristirahatan para bangsawan yang diberi nama "Sunyaragi". Di Yogyakarta pun kita mengenal adanya sebuah taman yang diberi nama "Taman Sari".

Golongan Elite

Dalam masyarakat kerajaan tradisionil baik di kota-kota pusat kerajaan maupun di luar kota pusat kerajaan terdapat golongan masyarakat yang status sosialnya dipandang tinggi karena fungsinya atau terutama karena pekerjaannya, yaitu yang kita sebut golongan elite. Golongan elite yang tergolong orang-orang yang menempati status sosial cabang atas, nominal dapat terjadi dari golongan aristokrat, tentara, keagamaan, pedagang dan plotokrasi.

Dalam beberapa hal yang sering terjadi di kerajaan tradisionil bahwa seseorang dapat menempati kedudukan sebagai elite birokrat misalnya karena mobilitas sosial ia diangkat oleh raja atau Sultan karena kecakapannya yang luar biasa, karena berjasa dalam perang dan sebagainya, dan sebagainya. Akan tetapi mungkin juga seseorang dari rakyat jelataa lambat laun bisa memasuki golongan elite birokrat, misalnya melalui perkawinan, kemudian ia mengikuti cara hidup kaum aristokrat yang termasuk golongan birokrat itu sendiri.

Dalam pasal yang lalu telah kita singgung soal pengangkatan seorang Syahbandar dari kalangan bangsa asing. Dengan demikian maka berarti bahwa Syahbandar orang asing itu telah menaiki jenjang elite birokrat dalam suatu kerajaan atau suatu daerah. Hal serupa itu mungkin terjadi karena anggapan bahwa orang asing itu mempunyai kecakapan serta pengetahuan yang luas dalam bidang business perdagangan dan hubungan internasional. Karena fungsi Syahbandar bukan hanya sekedar mengelola urusan hubungan dengan orang-orang asing, tetapi mencakup pula masalah hubungan internasional. Dalam hubungan internasional seorang Syahbandar mempunyai fungsi berganda yang mencakup semua bentuk kegiatan umum yang sifatnya internasional, seperti legitasi, judikasi, kepolisian dan administrasi.

Diantara para Syahbandar banyak yang lantas memasuki lingkungan aristokrasi mungkin melalui perkawinan. Perkawinan semacam itu sering pula terjadi antara para pedagang besar dengan para puteri Raja atau Adipati, karena status sosial yang dimilikinya, misalnya perkawinan Raden Rahmat (Sunan Ampel) dengan puteri Tumenggung Wilatikta, perkawinan Maulana Iskak dengan puteri Raja Blambangan dan sebagainya, dan sebagainya.

Di lain pihak kedudukan Adipati-Adipati juga merupakan elite birokrat dari pemerintah pusat, sedang dari sudut politik mereka merupakan golongan elite politik di daerahnya. Dalam masyarakat kota-kerajaan sering kali kita jumpai adanya golongan keagamaan yang menempati posisi sosial yang tinggi. Mereka antara lain terdiri dari beberapa orang ulama dan orang-orang yang dianggap sebagai wali. Kadang-kadang mereka menjadi penasehat Sultan. Di Jawa pada zaman perkembangan kerajaan Islam dikenal adanya tokoh "Wali-sanga" yang mempunai peranan besar dalam bidang da'wah, tetapi juga dalam bidang politik dan kebudayaan. Bahkan diantaranya ada yang sampai menjadi Raja seperti Syarief Hidayatullah yang sudah kita bicarakan dalam bab yang lalu. Dalam pada itu golongan keagamaan dapat pula dicatat sebagai golongan elite yang pengaruhnya tidak hanya terbatas di lingkungan dinding istana, tetapi merata ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian maka pemisahan secara tajam antara golongan elite politik dengan golongan elite keagamaan agak sukar, karena dimasa pertumbuhan kerajaan bercorak Islam mereka saling bekerja sama dan isi mengisi.

Mereka yang tergolong elite dengan segala macam coraknya, seperti elite politik, elite birokrasi, elite keagamaan dan elite pedagang itu jumlahnya hanya sedikit jika dibandingkan dengan rakyat umum. Mereka yang disebut golongan elite membedakan dirinya dari rakyat umum, bukan hanya karena kedudukan ekonominya yang lebih tinggi saja, melainkan juga corak serta gaya hidup mereka dalam berpakaian, berbahasa, cara berumah-tangga dan sebagainya, yang berbeda dengan golongan non elite. Biasanya mereka hidup berkelompok menurut jenisnya (exclusif). Golongan elite pedagang asing yang beragama Islam (Arab, Parsi, Turki dan lain-lain) mengelompok dalam satu tempat. Di Indramayu mengelompok di Indramayu sebelah baraat Cimanuk, yaitu Sindang (Dermayu), sedang yang tidak beragamaa Islam misalnya, Cina, mengelompok di sebelah timur Cimanuk yaitu jalan Pecinan lama.

Golongan Non Elite

Seperti sudah dikatakan bahwa golongan elite tidak seberapa banyaknya dan mereka hanya tinggal di kota-kota pusat kerajaan atau ibukota Kabupaten. Untuk daerah Indramayu jumlah mereka tidak akan melebihi 20% dari jumlah seluruh penduduk Indramayu pada masa itu. Sedang yang 80% lainnya terdiri dari golongan yang disebut golongan non elite. Mereka tersebar di segenap pelosok daerah Indramayu dengan corak penghidupannya yang berbeda satu sama lain menurt pengelompokannya. Dalam dialek Indramayu mereka disebut "wong cilik" (orang kecil). Sementara golongan elite terutama golongan elite birokrat disebut "wong gede" (orang besar).

Golongan Non Elite-Pedagang

Sebagai pedagang mereka itu adalah juga pedagang kecil yang pada umumnya hanya merupakan perantara (tengkulak), yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Pedang-pedagang besar asing pada umumnya tidak keluar-masuk ke daerah-daerah pedalaman sendiri untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Demikian pula petani produsen yang tinggal di pelabuhan banyak yang tidak membawa barangnya sendiri ke kota, tetapi hanya menjual kepada pedagang-pedagang perantara, apalagi kalau barang-barang mereka tidak seberapa banyaknya. Pedagang-pedagang perantara itulah yang memberi barang-barang dari petani di desa-desa untuk kemudian dijualnya lagi kepada pedagang besar di kota. Malahan diantara mereka ada yang hanya merupakan tangan-tangan dari pedagang besar, atau tangan-tangan dari para bangsawan yang ikut berkecimpung dalam dunia business. Kadang-kadang terlalu banyak schakel (sambungan) antara produsen dengan konsumen sehingga selisih harga di kota dan di desa yang kadang-kadang sangat menyolok sebagaian besar jatuh ketangan para tengkulak itu.

Dibagian muka sudah kita singgung bahwa barang-barang dagangan dari daerah Indramayu buat sebagian besar terdiri dari bahan makanan seperti beras, daging, ikan asin, telur, madu dan lain-lain, tetapi ada juga barang-barang mentah lainnya seperti kayu, kulit binatang dan barang-barang kerajinan tanga. Sementara barang-barang import yang masuk ke pelabuhan Indramayu pada umumnya tidak berbeda dengan barang-barang import yang masuk ke pelabuhan Cirebon, Jakarta dan Banten, yaitu barang-barang porselen Cina, batik koromandel obat-obatan dari Parsi, jarum, payung dari Cina dan lain-lain.

Adapun cara jual beli barang-barang pada masa itu masih dilakukan dengan cara barter, seperti tradisi yang sudah berjalan sejak sebelum zaman Islam, yakni tukar menukar barang-barang yang diperlukan, adakalanya dengan mempergunakan mata uang. Dagangan secara barter itu biasanya dialkukan antar pedagang dari daerah-daerah pesisir yang berhubungan langsung dengan pedagang asing, dengan rakyat dipedalaman, tetapi ada juga pedagang asing yang langsung berhubungan dengan rakyat pedalaman untuk melakukan transaksi jual-beli dengan cara barter itu.

Sebenarnya sejak zaman Indonesia-Hindu di Jawa khususnya telah dikenal adanya mata uang. Tome Pires menceritakan bahwa mata uang yang dipergunakan di Jawa masa itu ialah "Cash" buatan Cina. Seribu buah cash Cina disebut "puon". Dari penemuan-penemuan mata uang kuno diketahui bahwa di Banten dan di Cirebon pernah dibuat mata uang yang bertuliskan huruf Jawa-kuno pada bagian pinggir dan memuat nama "Pangeran-Ratu" dan mata uang yang ditulisi dengan huruf Arab dan berbunyi "Pangeran-Ratu ing Banten". Hal mana membuktikan kepada kita bahwa di Banten pada masa itu telah dibuat mata uang. Mata uang tersebut diduga berasal dari zaman Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdulkadir. Dalam sejarah Banten diceritakan bahwa Sultan Ageng Tirtayasa menjanjikan uang 10 real kepada setiap penduduk yang bisa menyetorkan kepala orang Belanda dan 5 real kepada barangsiapa yang bisa menyetor telinga orang Belanda. Berita itu membuktikan bahwa di Banten pada masa itu telah dibuat mata uang dengan nama "Real"

Di Cirebon setelah adanya perjanjian dengan Belanda tanggal 8 September 1688 diperlukan mata uang untuk transaksi perdagangan. Di tempat itu kemudian diadakan larangan tidak boleh lagi membuat mata uang picis yang terlalu kecil, kecuali yang dibuat Raksa Negara dari fihak Sultan Sepuh dan oleh Suradinata dari fihak Sultan Kanoman. Tetapi setelah kedua penguasa itu meninggal maka pembuatan mata uang di

Cirebon digadaikan kepada orang-orang Cina sejak tanggal 1 Januari 1710, yaitu atas persetujuan Pangeran Panemmbahan, Pangeran Adipati Anom, Pangeran Arya Cirebon, Pangeran Raja dan Kapten Cina dan Syahbandar Cirebon Tan Sian Ko. Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa mata uang yang beredar di Indramayu adalah mata uang buatan Cirebon itu. Disamping itu sebagaimana lazimnya pada tiap-tiap pelabuhan ada bursa mata uang dari berbagai negara, dimana orang bisa membeli/menukar mata uang yang dibutuhkan.

Faktor perhubungan perdagangan antara satu daerah dengan daerah lain diseluruh Indonesia bukan hanya menyebabkan terjadinya pertukaran produksi antar daerah, tetapi juga ada hubungannya dengan pertukaran kebudayaan antar daerah Indonesia, misalnya pemakaian bahasa Indonesia sebagai lingua franca yang justru dikenalkan di pusat kota-kota kerajaan maritim dan kota-kota pelabuhan pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam. Melalui bahasa Indonesia itulah unsur kesatuan kulturil telah diletakkan diantara suku-suku bangsa di daerah-daerah di kepulauan Nusantara. Dengan demikian maka peranan pedagang dalam penyebaran bahasa Indonesia sangat besar.

Golongan Non Elite- Petani

Penduduk pedalaman Indramayu pada umumnya terdiri dari para petani yang jumlahnya meliputi antara 70 – 80% dari jumlah penduduk seluruhnya. Pada zaman kerajaan Sunda seperti telah diuraikan diatas mereka terdiri dari pada pehuma. Sesudah zaman Islam berhubung banyak migrasi dari Jawa, beangsur-angsur mulai bertani sawah. Sebelum pengairan diatur secara teknis, mereka mengerjakan sawahnya dengan sistim tanah kering (gogorancah). Tetapi para petani mulai menetap didesa tidak lagi berpindah-pindah, dari satu tempat ke tempat lain mengikuti ladangnya seperti sediakala.

Permintaan akan beras untuk perdagangan antar pulau terus meningkat, sehingga mendorong para petani untuk memperluas` areal tanamannya dengan membuka daerah-daerah pertanian baru, terutama di sepanjang aliran sungai Cimanuk dari kota Indramayu sampai ke udik di perbatasan daerah Majalengka. Daerah-daerah itulah yang lebih dahulu padat penduduknya.

...petani Indramayu menggarap ...

...ngan elite terutama para bangsawan yang memiliki tanah pertanian ... *dalam masyarakat feodal pada masa itu. Mereka selain ...* ... membeli padi dari petani untuk disimpan, kemudian apabila harga ... ...alnya di pasaran.

...ngan Non Elite- Nelayan

...an adalah tempat yang paling cocok untuk kehidupan orang-orang ... *nelayan ini besar artinya bagi kehidupan perekonomian kota tempat ...nya kepada masyarakat kota, terutama kepada golongan elite yang ... makanan yang lebih sempurna dalam arti mengandung banyak*

... hutan-hutan dibuka untuk pertanian,

...duduk Indramayu lebih banyak tinggal di pesisir dan hidup sebagai nelayan yang ...cari nafkahnya di laut sebagai nelayan penangkap ikan. Bagi penduduk Indramayu ... hampir separoh daerahnya dikelilingi lautan, penghidupan di laut sebagai nelayan ...pir-hampir merupakan naluri. Mereka sudah pula pandai mengawetkan bahan ...anan dari ikan, seperti petis, gesek, terasi, kerupuk dan sebagainya. Mereka ...jual hasil produksinya ke Jakarta, Banten dan daerah-daerah lain.

... awal abad ke XVII banyak perahu dari Indramayu membawa barang-barang ...ngan ke Jakarta. Adapun alat-alat yang mereka pergunakan untuik menangkap ... antara lain jaring, pancing, sudu, jala dan lain-lain. Diantara alat-alat tersebut ada ... dikerjakan secara perorangan dan ada pula yang dikerjakan secara berkelompok, ...nya payang yang biasanya terdiri dari sekitar 15 orang.

...ti halnya para petani, nelayanpun tidak semuanya memiliki peralatan sendiri ...ma perahu. Mereka yang tidak mempunyai alat-alat sendiri menyewa dari orang

Adapun jenis tanaman yang di tanam rakyat di daerah Indramayu selain padi ialah jagung, kacang-kacangan dan sayur-mayur seperti bonteng, lombok, bawang, terong dan sebagainya. Itulah jenis bibit-bibitan yang dibawa oleh Nyi Endang Darma ketika baru datang ke Indramayu.

Tidak semuanya petani Indramayu menggarap tanahnya sendiri, karena belakangan banyak golongan elite terutama para bangsawan yang memiliki tanah pertanian seperti yanng berlaku dalam masyarakat feodal pada masa itu. Mereka selain menerima bagiannya, juga membeli padi dari petani untuk disimpan, kemudian apabila harga telah naik, baru dijualnya di pasaran.

Golongan Non Elite- Nelayan

Kota pelabuhan adalah tempat yang paling cocok untuk kehidupan orang-orang nelayan. Golongan nelayan ini besar artinya bagi kehidupan perekonomian kota tempat mereka menjual hasilnya kepada masyarakat kota, terutama kepada golongan elite yang biasanya membutuhkan makanan yang lebih sempurna dalam arti mengandung banyak protein.

Pada masa awal pertumbuhannya, sebelum hutan-hutan dibuka untuk pertanian, penduduk Indramayu lebih banyak tinggal di pesisir dan hidup sebagai nelayan yang mencari nafkahnya di laut sebagai nelayan penangkap ikan. Bagi penduduk Indramayu yang hampir separoh daerahnya dikelilingi lautan, penghidupan di laut sebagai nelayan hampir-hampir merupakan naluri. Mereka sudah pula pandai mengawetkan bahan makanan dari ikan, seperti petis, gesek, terasi, kerupuk dan sebagainya. Mereka menjual hasil produksinya ke Jakarta, Banten dan daerah-daerah lain.

Pada awal abad ke XVII banyak perahu dari Indramayu membawa barang-barang dagangan ke Jakarta. Adapun alat-alat yang mereka pergunakan untuik menangkap ikan antara lain jaring, pancing, sudu, jala dan lain-lain. Diantara alat-alat tersebut ada yang dikerjakan secara perorangan dan ada pula yang dikerjakan secara berkelompok, misalnya payang yang biasanya terdiri dari sekitar 15 orang.

Seperti halnya para petani, nelayanpun tidak semuanya memiliki peralatan sendiri terutama perahu. Mereka yang tidak mempunyai alat-alat sendiri menyewa dari orang lan, atau bahkan hanya merupakan pekerja saja dari para pemilik yang disebut "juragan". Dalam keadaan seperti ini mereka tidak lebih dari seorang budak yang nasibnya tergantung sama sekali kepada juragan dan mereka disebut "bidak', yang mungkin berasal dari kata "budak". Kedudukan sosial para bidak itu barangkali yang paling rendah diantara semua golongan yang tersebut diatas.

Selain nelayan penangkap ikan, ada pula nelayan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan. Pekerjaan mereka menyewakan perahu untuk mengangkut orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, baik di jawa maupun di luar Jawa. Dalam hal ini mereka berlayar sampai jauh ke Malaka, Maluku, Banjarmasin, Palembang dan lain-lain. Dengan demikian maka penduduk Indramayu di masa lalu merupakan pelaut-pelaut yang ulung dan berani.

Golongan Non Elite- Tukang dan Pengrajin

Ketika Wiralodra untuk pertama kalinya membangun Tarub Agung sudah pasti menggunakan tenaga tukang. Namun sejauh tidak ada keterangan dari mana tukang-tukang itu didatangkan. Kalau toh pembangunan itu dikerjakan dengan gotong royong diantara penduduk, tentulah diantara mereka ada yang sudah mempunyai keahlian dalam bidang bangunan, mengingat yang dibanun adalah Tarub Agung yang fungsinya sama dengan pendopo Kabupaten sekarang.

Tukang-tukang ahli bangunan memang selalu terdapat dimana-mana dari dahulu hingga sekarang. Diantara mereka ada yang memang khusus bekerja dalam bidang bangunan sebagai tenaga ahli (tukang batu atau tukang kayu) yang tidak bekerja dalam bidang lain dan menggantungkan hidupnya dari upah sebagai tukang. Disamping itu ada pula tukang yang bekerja hanya samben (part-timer) disamping pekerjaan pokok sebagai petani.

Di antara tukang-tukang itu ada pula orang yang mengerjakan barang-barang keperluan hidup sehari-hari seperti pecah belah atau alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, golok dan sebagainya. Kehadiran desa-desa dalam kota Indramayuyang bernama "Anjun" dan "Kepandean' membuktikan kepada kita bahwa disanalah dahulu tempat orang-orang mengerjakan barang-barang pecah belah dan barang-barang keperluan pertanian dan rumah tangga. Disamping itu ada pula tukang yang mengerjakan barang-

barang kerajian seni seperti ukiran kayu dan batik. Di atas sudah diuraikan bahwa pada abad ke XVII seperti yang dikatakan oleh Valentijn, bahwa barang-barang kerajinan kayu (ukiran) dari Indramayu dikirim keman-mana. Selain kerajinan kayu, Indramayu terkenal juga dengan kerajinan batiknya dari dahulu dan hingga sekarang masih hidup di desa-desa Paoman, Babadan, Penganjang dan Dermayu. Sangat menarik untuk kita teliti, mengapa justru batik Indramayu hanya berkembang di daerah pesisir saja? Seperti halnya kerajinan kayu yang dikembangkan oleh transmigrasi dari Jepara dan Rembang, kerajinan batikpun dikerjakan oleh transmigrasi dari Jawa. Menurut penghayatan penulis, batik Indramayu berasal dari Lasem karena motief-motiefnya hampir serupa, dengan adanya pengaruh Cina didalamnya, seperti motief burung Phunix dan ornament-ornament Cina. Ciri-ciri khas Cina yang paling menonjol dalam batik klasik Indramayu selain burung phunix adalah warna yang khas yaitu putih biru, putih coklat yang menyerupai warna barang-barang keramik Cina.

Wagner memastikan bahwa barang-barang kesenian Cirebon sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesenian Cina, baik motif maupun warnanya.

> *It appears very probably that in Cheribon art was very considerably influenced by Cina. In any case woodcarving from this district exhibited Cineese characteristic, both in motives (rock and cloud) and technique (laquer) Cheribon art thus become something unique.*

<u>Golongan Non Elite- Tentara, Agama dan Fungsional</u>

Golongan non elite lainnya ialah tentara dari eselon bawah, golongan agama juga dari eselon bawah yang langsung melayani kebutuhan rakyat banyak dan golongan fungsionil yang tidak termasuk golongan elite. Kalau di pusat-pusat kerajaan terdapat golongan tentara cabang atas seperti senapati, Panglima, jagabay dan sebaginya, maka ada pula golongan tentara yang diperintah yang tidak termasuk golongan elite, misalnya tamtama dan bintara. Di kota-kota pusat kerajaan pada abad ke XVI seperti digambarkan oleh Willem Lodewyckez ada prajurit-prajurit yang memanggul bedil, pedang, tombak dan peraisai. Prajurit-prajurit di Jawa pada umumnya tidak menerima gaji dari Raja, dalam mana perang mereka hanya menreima pakaian, senjata dan uang untuk membeli beras dan lauk pauk.

Hal mana menunjukkan bahwa sistem pertahanan kerajaan pada masa itu bersifat totaliter. Di saat-saat timbul peperangan maka Raja memobilisir rakyatnya untuk maju ke medan perang dibawah pimpinan masing-masing Bupatinya. Menurut berita Residen W.Caeff dalam suratnya kepada pemerintahnya di Betawi tanggal 14 Januari 1673 menceritakan bahwa Raja Banten menawarkan kepada setiap orang yang sanggup memanggul senjata akan diberi satu real. Kesatuan tentara yang dapat dikumpulkan dengan cara demikian bisa mencapai 55.000 prajurit.

Di kota-kota pusat kerajaan ada juga tentara yang barangkali mendapat bayaran tetap dari Raja, akan tugas mereka telah lebih dititik beratkan kepada pengawalan istana dan pengawalan Raja sendiri. Ketika di Indramayu timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Bagus Rangin, adipati Wiralodra mengerahkan rakyatnya untuk menumpas pemberontakan itu, baik di Bantarjat maupun di Pamayahan.

Termasuk golongan non elite yang lain ialah golongan agama dari eselon bawahyang melayani kepentingan rakyat dalam urusan keagamaan, seperti kematian, perkawinan, selamatn dan lain-lain. Golongan ini tidak hanya terdapat di pusat kota kerajaan, tetapi tersebar sampai ke desa-desa di pedalaman. Di kota biasanya mereka bermukim dalam suatu lingkungan tertentu yang dinamakan Kauman. Kehadiran desa Paoman di Kota Indramayu yang mungkin berasal dari kata Kauman atau Pekauman, membuktikan kepada kita bahwa dahulu di desa tersebut bermukim golongan agama yang biasa disebu "Kaum". Kata "kaum" berasal dari bahasa Arab "Qo-im" artinya orang yang menurus urusan kemesjidan/keagamaan.

Menurut istilah Jawa mereka itu disebut golongan "putihan" yang diduga berasal dari bahasa Arab "muti'an" artinya orang yang taat kepada perintah Tuhan. Lawan dari kata "putihan" ialah "abangan" yang juga berasal dari bahasa Arab "aba'an" artinya orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan.

Golongan non elite lainnya lagi ialah golongan fungsionil kerajaan eselon bawah yang menduduki pangkat di bawah Mantri. Mereka di Indramayu dikenal dengan nama "Priyayi cilik". Pejabat birokrat tersebut dalam beberaapa hal dapat pula mempunyai kesempatan mobilitas vertikal, sehingga pada suatu ketika bisa menjadi elite-birokrat, meskipun hal semacam itu jarang sekali terjadi, mengingat bahwa dalam masyarakat kerajaan tradisionil, umumnya mobilitas vertikal dari eselon bawah sangat kaku. Hal mana disebabkan oleh adanya pembatasan-pembatasan yang berhubungan dengan ada atau tidak adanya pertalian familie atau hubungan keluarga dengan golongan ellite birokrat yang berkuasa, gaya kehidupan (etiket) dan lain-lain yang biasa dipakai dalam tata kehidupan golongan elite.

Golongan Non Elite- Budak

Golongan budak adalah golongan masyarakat yang berada diluar ketiga golongan tersebut diatas, yang oleh Syoberg disebut "out-cast". Mereka termasuk orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang berat-berat dan kasar. Mereka tidak hanya terdiri dari kaum pria saja tetapi juga kaum wanita.

Seseorang bisa jatuh menjadi budak karena beberapa faktor, misalnya karena menjadi tawanan perang atau karena tidak bisa membayar hutang atau ditangkap dengan sengaja untuk dijadikan budak. Seorang budak bisa diperjual belikan sekehendak pemilikinya. Masalah perbudakan ini adalah masalah internasional yang terdapat dimana-mana sejak zaman purbakala. Di Jawa sejak sebelum zaman Islam, misalnya di Majapahit sudah mengnal perbudakan dengan sebutan "Bertya" yang berarti budak. Pada zaman pertumbuhan negara bercorak Islam masalah perbudakan yang merupakan tradisi yang sudah berakar sejak lama, berjalan terus sebagaimana adanya, walaupun agama Islam pada masa awal pertumbuhannya tampak berusaha keras memberantas perbudakan itu dengan berbagai cara dan memberi perlindungan hukum kepada mereka. Akan tetapi di kebanyakan negeri Islam sendiri seperti arab, Persi, Turki dan lain-lain perbudakan itu berjalan terus bahkan di Indonesia perdagangan budak itu berlangsung sampai abad ke XIX.

Pada awal abad ke XVI seperti diuraikan oleh Willem Lodewyckez bahwa di Banten golongan bangsawan dan pedagang-pedagang beras memelihara budak untuk menjaga rumahnya. Ir Anwas Ardiwilaga dalam kertas kerjanya seminar sejarah Jawa Barat, menulis tentang masalah perbudakan di Indramayu sebagai berikut:

> "Sanusi Pane menulis dalam bukunya Sejarah Indonesia, bahwa rakyat Indramayu adalah yang paling menderita dari penjajahan Belanda. Bagaimanakah bentuk penderitaan itu olehnya tidak disebutkan. Akan tetapi orang tua saya (ayah, nenek) yang hidup seabad yang lalu saya terima berita

bahwa menak-menak Priangan sudah biasa membeli budak dari Indramayu. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan di jual orang tuanya ke Priangan sekedar untuk menyelamatkan mereka dari bencana kelaparan.

Ketika daerah Indramayu oleh Belanda dijual kepada perusahaan swasta dan perorangan bangsa asing dan dijadikan tanah partikulir, banyak didatangkan budak terutama dari Bali untuk mengerjakan tanah mereka. Berdasarkan pemberitaan yang terjadi di Banten dan di Jakarta, dapatlah diambil kesimpulan bahwa sejak abad ke XVI di Indramayu telah dikenal sistem perbudakan yang oleh Syoberg disebut "out-cast", setidak-tidaknya mereka yang menjadi pelayan golongan aristokrat atau golongan elite lainnya.

KENDALA BUDAYA PANTURA TERHADAP PERAN PEREMPUAN DAN KESENJANGAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Lingkungan Kebudayaan Daerah Sunda

Kebudayaan didasari oleh nilai-nilai tradisional yang merupakan bidang garapan mengenai budaya masyarakat mengandung unsur-unsur pandangan yang hidup dan berakar di masyarakat. Unsur-unsur Nilai Tradisional antara lain meliputi: nilai budaya, yaitu konsepsi yang bersifat abstrak mengenai dasar-dasar dari suatu hal yang penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Nilai budaya ini terkandung dalam Upacara tradisional, permainan rakyat dan naskah kuno, sistem budaya yaitu rangkaian gagasan, konsep, norma adat istiadat yang menata tingkah laku manusia dalam masyarakat dan merupakan wujud idiologis, kebudayaan. Sistem budaya ini terdiri dari :sistem kemasyarakatan, sistem religi, ilmu pengetahuan, sistem ekonomi tradisional, dan sistem teknologi tradisional. Sedangkan lingkungan budaya yaitu keadaan sistem dan nilai budaya, adat istiadat dan cara hidup masyarakat yang mengelilingi kehidupan seseorang. Lingkungan budaya mencakup: pola lingkungan budaya, perubahan lingkungan budaya dan hubungan antar budaya.

Secara demografis masyarakat Karawang, Subang dan Indramayu terletak di daerah Jawa Barat yang umumnya terdiri dari suku bangsa Sunda. Menurut Koentjaraningrat secara antropologi budaya suku bangsa Sunda adalah orang-orang yang secara turun temurun menggunakan bahasa ibu bahasa Sunda serta dialeknya dalam kehidupan sehari-hari, dan bertempat tinggal di daerah Jawa Barat, yang sering disebut dengan Tanah Pasundan atau Tatar Sunda. Suku bangsa Sunda memiliki identitas seperti sopan, ramah, baik hati, jujur, senang menerima tamu, penuh perasaan, materialistis dan rapi.

Dalam buku *Sejarah Sunda*, arti kata Sunda dapat dijelaskan dari berbagai bahasa, seperti dalam bahasa Sanksekerta, Sunda berarti bersinar dan terang, dalam bahasa Kawi, Sunda berarti air, tumpukan, pangkat dan waspada. Dalam bahasa Jawa, Sunda berarti bersusun, berganda, kata atau suara, sedangkan dalam bahasa Sunda, Sunda berarti bagus, indah, cantik, unggul dan menyenangkan. Berdasarkan identitas dan arti Sunda di atas mencerminkan bahwa memang orang-orang sunda sangat menyukai dengan penampilan yang rapi dan bagus.

Salah satu ciri khas yang menonjol dari masyarakat sunda adalah masyarakat peladang yang bercorak ladang dan suka berpindah tempat, sehingga tempat tinggal mereka mengikuti dengan garapan ladangnya. Bentuk rumah berpanggung yang memberi kesan bahwa setiap waktu akan pindah ke tempat lain. Apabila ditinjau dari faktor geografis tampak bahwa setiap kebudayaan dari setiap suku bangsa sedikit banyaknya berkembang sesuai dengan kondisi dan latar belakang lingkungan fisik alamnya.

Di bidang kesenian daerah ini memiliki khasanah perbendaharaan yang cukup kaya. Wayang golek merupakan seni pertunjukan yang sangat disukai segenap lapisan masyarakat. Instrumen musik tradisional dari daerah ini adalah kecapi, degung, dan angklung bambu. Lagu-lagu sunda memiliki nada-nada minor yang sentimentil (menyentuh rasa). Dibidang seni tari, cukup banyak dikenal seperti: tari topeng, tari burung merak, tari kupu-kupu dan lain-lain kreasi baru. Dari daerah Banten dikenal permainan debus dan dari daerah Cirebon dikenal kesenian Tarling (dengan instruyen gitar, suling dan gendang). Sebagian besar dari penduduk Jawa Barat adalah suku Sunda.

Pada umumnya suku bangsa Sunda adalah lebih patuh dalam menunaikan tugas ibadahnya dalam agama Islam, jika dibandingkan dengan suku Jawa. Walaupun demikian masih ada bekas-bekas adat lama, misalnya: penghormatan kepada Dewi Sri sebagai dewi padi yang dilakukan oleh para petani. *Petungan* semacam pada suku Jawa pun ada, misalnya: orang yang hendak berpergian, memilih teman hidup, dan lain-lain. Pada suku Jawa perhitungan keberuntungan berpedoman pada nilai nama hari dan pasarannya (sabtu *legi dan lain-lain*). Sedangkan suku Sunda menggunakan hurufnya yang 18 itu (alfabet). Masing-masing huruf itu mempunyai nilai angka tertentu.

Seni dan Budaya Masyarakat Pantura Jawa Barat

Ekspresi seni dan budaya yang ada di Indramayu, Karawang dan sebagian Subang Utara merupakan cerminan akulturasi yang merupakan proses interaksi nilai-nilai di masyarakat Pantai Utara Jawa Barat. Interaksi tersebut dapat dilihat dari kesenian tarling di Indramayu, dimana Indramayu merupakan tempat lahirnya kesenian tersebut pada abad ke 16. Tarling alias gitar suling merupakan perpaduan seni musik dan lagu-lagu yang pada awalnya ditampilkan dalam bentuk nyanyian (kiser) yang hanya diiringi oleh gitar dan sulingsaja. Kesenian ini dimainkan oleh anak-anak perempuan sambil berjoget dengan pasangan laki-laki yang ditemukan di tempat di mana anak-anak perempuan ini sedang beraksi. Kadang jenis tarian ini berkonotasi negatif, karena laki-laki banyak melakukan tindakan yang menjurus kearah perbuatan seksual. Sejalan dengan perkembangan, kesenian tarling mengalami perkembangan dan perubahan yang cepat. Saat ini kesenian tarling sudah dilengkapi dengan alat-alat musik yang modern dengan tetap tidak meninggalkan ciri khas dari kesenian tarling itu sendiri.

Kesenian *RONGGENG* merupakan jenis kesenian Indramayu dimana pada zaman dulu masih bersifat sakral untuk mengusir roh jahat dalam kegiatan acara hajatan, khitanan, sedekah bumi, dan ruwatan, karena ruwatan untuk masyarakat Jawa merupakan seni pertunjukkan yang berasal dari kebudayaan Pra Hindu. Ritual ini merupakan upacara penyembahan ruh nenek moyang atau upacara inisiasi. Menurut W.H Rassers, pertunjukan wayang kulit pun untuk upacara ruwatan yang dipergunakan oleh orang Jawa sebagai pembebas manusia dari kekuatan supranatural buruk yang mengancam manusia yang sial keberadaannya di muka bumi ini (Arif Wahyunadi cs.2004:71). Seiring perkembangan jaman ronggeng pun menghilang, kesenian ini merupakan hiburan rakyat, kemudian muncul *TARLING* alias *GITAR SULING*. Di tengah maraknya jenis kesenian lain ronggeng kalah bersaing, dan minat masyarakat Indramayu terus menurun.

Tarian ronggeng diadakan setiap pasca panen, karena saat itu berkumpullah para muda-mudi untuk berjoget tanpa malu-malu, namun lambat laun kesenian ini bergeser kearah *TAYUBAN*, sehingga makin tergusurnya tarian ronggeng yang awalnya dianggap sakral sekarang nilai-nilai budayanya makin menipis. Sebetulnya tarian ini adaptasi akibat pengaruh dari Mataram, kemudian berubah menjadi ronggeng tayub atau ronggeng hajatan sebagai seni hiburan masyarakat.

Jaman dulu jenis tarian ronggeng hanya ditampilkan dikalangan bangsawan, juragan perahu, tuan tanah, karena mereka harus memberikan uang atau istilahnya *NYAWER* ke si perempuan yang sedang berjoget. Mungkin atas dasar ini pula anak perempuan di Kabupaten Indramayu menjadi materialistis, sehingga terdapat kepuasan batin ketika mereka dapat memperlihatkan kepada orang lain yang mampu memberi sawer banyak kepada penari ronggeng atau penyanyi. Semakin besar pesta semakin banyak hiburan yang ditampilkan dengan pola hidup boros.

Setelah tahun 1970 ronggeng, tayuban bergeser menjadi seni *DOMPRET*, sawernya lebih murah dan setelah berjoget dengan si penari, dia bisa diajak kencan atau ngobrol. Dompret masih bertahan sampai kini dan tumbuh berkembang di sekeliling mereka bila ada hajatan. Semua ini dipengaruhi pula dengan miras atau minuman keras berupa alkohol, dan sudah tentu miras tidak jauh dengan kehidupan prostitusi. Banyak anak perempuan sebagai penari yang berjoget sambil meminum minuman keras sampai mabok. Hal ini berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat setempat. Kadang-kadang suasana di beberapa warung remang-remang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang sambil mendengarkan sayup-sayup suara tarling. Perilaku dari para penari joget ini tidak lepas dari jeratan faktor ekonomi yang dilanda dengan kemiskinan, sehingga dengan secara terpaksa atau bahkan sengaja mereka melakukan semua aktivitas tersebut tanpa memikirkan bagaimana akibat selanjutnya. Para orang tua di Indramayu justru merasa senang apabila memiliki anak perempuan, karena anak perempuan diungkapkan sebagai *"SAWAH"* keluarga. Jadi tidak heran apabila kita menemukan anak perempuan di bawah umur yang tampaknya seolah-olah dewasa, anak ini menjadi anak yang nakal, malas untuk pergi ke sekolah melanjutkan pendidikannya dan inginnya bekerja supya cepat menghasilkan uang banyak dengan jalan apapun juga. Eksploitasi untuk kepentingan umum merupakan hal yang biasa, oleh karena itu bermunculanlah perempuan-perempuan yang menjadi PSK (Perempuan Seks Komersial).

Kabupaten Indramayu yang berada di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa, memiliki tradisi tahunan upacara adat nadran. Upacara ini merupakan sebuah cerminan dari hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta berupa ungkapan rasa syukur akan hasil tangkapan ikan dan mengharapkan peningkatan hasil di tahun mendatang serta dijauhkan dari bencana dan marabahaya dalam mencari nafkah di laut. Umumnya upacara adapt nadran ini diselenggarakan antara bulan Oktober sampai Desember yang bertempat di Pantai Eretan, Dadap, Karangsong, Limbangan dan Glayem.

Upacara adat ngarot atau kasinoman dilaksanakan setiap hari Rabu, minggu keempat bulan November, pesertanya adalah para muda-mudi dengan kostum yang khas dan aksesoris yang gemerlap. Pada upacara adapt ngarot ini, digelar bersamaan juga dengan kesenian tradisional lainnya seperti tari topeng dan ronggeng ketuk selain dimeriahkan juga dengan adanya pasar malam yang berlangsung selama seminggu.

Selanjutnya ekspresi seni masyarakat Indramayu dapat dilihat dari berkembangnya kesenian tari topeng deermayon yang memiliki komposisi gerak tari yang khas dan dengan kostum topeng yang berciri spesifik yang membedakannya dengan tari topeng dari daerah lain. Tari topeng deermayon ini telah mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat, baik domestic maupun mancanegara. Seorang Maestro tari topeng dari Indramayu yaitu Ibu Rasinah sudah sering tampil sampai kemancanegara.

Sintren atau lais merupakan salah satu kesenian rakyat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat pesisir terutama pantai utara. Selain itu di Indramayu juga berkembang jenis kesenian tradisional yaitu kesenian genjring acrobat. Kesenian tradisional ini menampilkan atraksi dengan media tangga, sepeda beroda 1 (satu) dengan diiringi alat musik genjring/rebana dengan dilengkapi tari rudat.
Ekspresi seni budaya Indramayu yang khas menggambarkan kedalaman filosofi kehidupan dan mencerminkan akulturasi budaya serta transformasi nilai-nilai global dapat dilihat pada batik Indramayu. Perpaduan antara kepercayaan, adapt istiadat, seni dan lingkungan kehidupan daerah pesisir, ditambah dengan adanya pengaruh dari luar seperti Cina, Arab-Timur Tengah, Hindu-Jawa serta Eropa ikut mempengaruhi terbentuknya motif dan karakter dari batik tulis pesisir maupun kerajinan-kerajinan yang ada di Indramayu lainnya. Pengaruh kebudayaan Cina pada batik Indramayu terlihat pada motif lokcan, banji (swastika) dan burung hong (rajawali). Dikalangan masyarakat Cina, motif-motif tersebut merupakan symbol dari kehidupan yang mengandung makna bahwa ada kesatuan antara jiwa dan alam semesta. Sedangkan pengaruh kebudayaan Arab dapat dilihat dari motif-motif berupa kaligrafi Arab dan Sawah Riweh ("riweh" berarti keringat).

Ciri-ciri Lingkungan di Wilayah Pantai Utara Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan alam manusia, dan budaya merupakan tiga faktor yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Walaupun keterkaitan tersebut belum menjadi pendapat yang sama di antara para ahli namun kelihatannya ketiga faktor ini dapat kita terima secara lebih luas dalam dimensi dan waktu. Lingkungan alam terdiri dari berbagai aspek yang masing-masing memiliki relevansi dengan perkembangan budaya manusia. Aspek-aspek tersebut meliputi bentang alam, pantai, iklim dan faktor musim, air, jenis tanah, persediaan bahan mineral flora dan fauna.
2. Sesunggunya hubungan antara manusia dan lingkungan alam tidak semata-mata terwujud sebagai hubungan ketergantungan manusia terhadap lingkungannya 9environmental determinism), melainkan juga sebagai suatu hubungan dalam hal manusia mempengaruhi dan mengubah lingkungannya. Landasan bagi menciptakan dan membuat manusia menjadi tergantung pada dan merupakan bagian dari lingkungan alamnya adalah kebudayaan. Dengan kebudayaan inilah manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya dan dalam proses menyesuaikan diri ini manusia mendayagunakan kehidupannya (Tax:1953 : 243). Dengan demikian antara manusia dan lingkungannya terdapat interaksi seperti juga terdapat interaksi dan interelasi antara berbagai unsur suatu ekosistem. Dengan kata lain, manusia mempertahankan hidup terhadap lingkungan dilakukan melalui proses adaptasi. Adaptasi adalah suatu proses dimana proses itu terkait yang saling menguntungkan antara suatu organisme dan lingkungan dibangun dan dipertahankan (Hardesty:1977).
3. Konsep adaptasi telah menjadi bagan penting dalam ekologi budaya sejak pertama kali dikemukakan oleh Julian Steward pada tahun 1955. Sedangkan menurut Binfera (1968) adaptasi merupakan masalah lingkungan yang bersifat lokal serta tekanan. Lingkungan merupakan masalah lingkungan yang lebih spesifik. Adanya tekanan lingkungan yang spesifik tersebut akan terjadi adaptasi. Jadi tugas kita adalah mencari faktor variable apa yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan itu dalam skala lokal.
4. Lingkungan alam juga dapat mempengaruhi corak kebudayaan manusia. Masyarakat di daerah pedalaman adalah masyarakat yang bercorak agraris yang kehidupannya tergantung pada tanah-tanah pertanian yang subur dan dekat dengan aliran sungai sebagai sumber air untuk irigasi tanah-tanah pertanian. Sedangkan masyarakat yang bersifat maritim kehidupannya tergantung kepada

pelayaran dan perdagangan misalnya kerajaan Sriwijaya. Djubantono, (19960 menyatakan dari tata geologi diketahui bahwa pulau Jawa terbentuk oleh adanya pengangkatan secara progresi dari arah barat ke timur yang terjadi sekitar akhir pliosen (+ 2 juta tahun yang lalu) dan selama pleosen bawah (hingga 700.000 tahun yang lalu.

Berbagai koreksi dan masukan dapat diperoleh untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, dan sekaligus untuk membangun bangsa Indonesia seutuhnya. Tanda zaman yang terekam di dalam aspek budaya baik karya seni atau budaya, dapat dipelajari matra waktu, ruang dan tataan masyarakat pada saat karya tersebut dibuat. Karena itu perlu sekali disadari , agar seni dan budaya dapat berkembang bebas sesuai dengan matra waktu, ruang dan tataan masyarakatnya. Sementara itu melalui karya seni dan budaya, diharapkan pula agar dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas an kuantitas mutu manusia sebagai sumber daya multi dimensional suatu unsur. Sebab tinggi rendahnya kesejahteraan hidup manusia, tidak terlepas dari tinggi rendahnya manusia dalam menghayati seni dan budayanya.

Mengacu pada pengertian di atas, maka berbagai peninggalan dan warisan seni dan budaya suatu bangsa dapat digunakan untuk acuan pendidikan dan penelitian masa depan kehidupan suatu bangsa. Sebab rekayasa apapun juga, sadar atau tidak sadar tidak terlepas dari unsur seni dan budaya, baik kegiatan sosial maupun ekonomi sesederhana apapun juga.

Karena itu aspek-aspek budaya di Kabupaten Karawang harus menjadi salah satu titik perhatian yang sangat penting bagi kepentingan dan kemajuan dunia pendidikan. Khususnya pendidikan sejarah peradaban masyarakat Karawang dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Seluruh rangkaian paparan hasil penelitian mengenai peranan pendataan kebudayaan yang meliputi aspek-aspek budaya daerah yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Karawang seperti Aspek Kesejarahan, Aspek Nilai Budaya, Aspek Permuseuman, Aspek Penghayatan Kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, Aspek Kepurbakalaan, Aspek Kebahasaaan dan Sastra dan Aspek Kesenian dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya daerah, akan ditutup dengan sedikit uraian mengenai kesimpulan dari laporan hasil penelitian ini berikut saran-saran yang barangkali berguna bagi pihak-pihak yang terkait.

Pandangan Budaya Terhadap Pendidikan

Unsur-unsur nilai tradisional antara lain meliputi: nilai budaya, yaitu konsepsi yang bersifat abstrak mengenai dasar-dasar dari suatu hal yang penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Nilai budaya ini terkandung dalam upacara tradisional, permainan rakyat dan naskah kuno, sistem budaya yaitu rangkaian gagasan, konsep, norma adat istiadat yang menata tingkah laku manusia dalam masyarakat dan merupakan wujud idiologis, kebudayaan. Sistem budaya ini terdiri dari : sistem kemasyarakatan, sistem religi, ilmu pengetahuan, sistem ekonomi tradisional, dan sistem teknologi tradisional. Sedangkan lingkungan budaya yaitu keadaan sistem dan nilai budaya, adat istiadat dan cara hidup masyarakat yang mengelilingi kehidupan seseorang. Lingkungan budaya mencakup: pola lingkungan budaya, perubahan lingkungan budaya dan hubungan antar budaya.

Pertama-tama manusia mengembangkan perilakunya dalam lingkungan keluarga melalui proses pendidikan, agar dapat memperoleh pengalaman-pengalaman tentang bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarganya sendiri, dengan cara meneruskan kebudayaan. Proses ini dialami oleh setiap manusia baik sebagai mahluk individu maupun mahluk sosial, yang dikenal dengan istilah Proses Sosialisasi dan Proses Enkulturasi. Penanaman proses-proses ini tentu sangat besar manfaatnya untuk diterapkan pada anak-anak baik di dalam lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga, seperti sekolah, agar mereka mengenal dengan etika, tata krama, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh lingkungannya. Dengan demikian para orang tua harus mempunyai pandangan hidup yang positif sebagai dasar hidupnya. Seiring dalam perjalanan hidup mereka yang sulit, mereka berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya agar dapat terpenuhi, dengan harapan dapat memberikan dorongan dan dukungan untuk anak-anaknya di bidang pendidikan ke masa depan ke arah yang lebih baik.

Huijbers berpendapat, bahwa banyak orang yang memandang hidup kurang positif, diakibatkan oleh kemiskinan (1999:120). Faktor inilah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan dasar hidup manusia, seperti kebutuhan primer dan sekunder akan sandang, pangan, papan dan lain-lain. Di samping kemiskinan, bisa pula dari ketidakadilan apa yang diharapkan orang dari kehidupan masyarakat, adalah suatu kehidupan bersama di mana semua orang diberi kesempatan yang sama untuk membangun dan mengembangkan hidupnya, khususnya masyarakat lapisan bawah yang berpeluang sangat kecil untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Identitas ini tampak sekali dalam kehidupan keluarga masyarakat di daerah Karawang, ketika mengadakan wawancara dengan para pelajar SMP, SMA beserta orangtuanya. Mereka menceritakan tentang kehidupan yang sangat sulit, terutama biaya anak-anak jika akan pergi ke sekolah Tidak semua anak-anak pergi ke sekolah menggunakan kendaraan atau angkutan kota yang dikenal dengan sebutan angkot, sebagian untuk penyebrangan menggunakan rakit dilanjutkan dengan sepeda, apabila letak rumah dengan sekolah dipisahkan dengan sebuah sungai yang cukup luas dan dalam. Biaya per hari untuk satu orang anak sekitar Rp 3.000,00 s.d Rp 5.000,00. Bagi orang tua yang rata-rata orang tidak mampu, hal ini sangat membingungkan dan menyulitkan, sementara orang tua tetap menginginkan anak-anaknya berhasil dalam pendidikan, dan tidak menginginkan anak-anak mereka seperti orang tuanya yang tidak mengalami dan memiliki pendidikan tinggi. Perasaan dilematis inilah yang selalu menghantui dalam benak para orang tua, disatu pihak ingin memajukan anak-anak, dipihak lain tidak ditunjang dengan kondisi ekonomi yang memadai. Oleh karena itu, anak-anak di samping mengikuti pendidikan formal di sekolah walaupun tanpa dibekali dengan buku-buku pelajaran secara lengkap, mereka di kampungnya masih mengikuti sekolah madrasah di sore hari setelah sholat Asar atau Magrib. Kondisi ini tidak mengurangi semangat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan formalnya, nilai-nilai sosial ini dijadikan acuan bagi generasi selanjutnya.

Kondisi dan situasi di atas, bagian dari sistem kemasyarakatan yang merupakan suatu wujud aktivitas kehidupan masyarakat meliputi aspek-aspek kehidupan yang sangat luas dari kehidupan manusia pada umumnya, mulai dari sistem atau aspek-aspek yang sangat kompleks, seperti pelapisan sosial, hak milik, sistem hukum tanah, sistem kekuasaan, sistem kepercayaan, pendidikan, kesenian dan lain-lain. Salah satu dari sistem kemasyarakatan di sini adalah pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak-anak dalam keluarga. Karena keberadaan mereka tidak terlepas dari peran pola asuh ibu yang membentuk tingkah laku yang berpola pada diri individu, dan tingkah laku umum yang biasa disebut adat istiadat.

Adat istiadat sering dibedakan dengan adat kebiasaan, terutama bila dikaitkan dengan sangsi yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang bertindak melanggar. Seseorang bila melanggar adat istiadat akan mendapat sangsi berat dari masyarakat, misalnya dikeluarkan dari lingkungan adat atau dibuang, sedangkan bila melanggar adat kebiasaan orang tersebut tidak akan diberi sangsi berat dari masyarakat (Suhandi. 1997:6).

Pelanggaran yang dilakukan anak-anak selama mengikuti pendidikan di sekolah, akan mendapat sangsi dari wali kelas atau kepala sekolah dengan cara membersihkan kelas, halaman, kadang-kadang diberi tugas untuk membuat atlas atau peta Pulau Jawa dan lain-lain yang sifatnya mendidik dan tidak dengan kekerasan fisik. Hukuman ini berlaku bagi anak laki-laki maupun perempuan, dan mereka terutama anak perempuan sering mengadu dan bercerita tentang permasalahan di sekolah atau di luar sekolah kepada ibunya. Betapa besar peranan ibu dalam keluarga, selain sebagai pola asuh, membimbing, mendidik sampai mengelola keuangan yang minimalis.

Peranan atau role merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang telah menjalankan kewajiban dan haknya berarti ia telah menjalankan peranannya. Jika kedudukan atau status itu menunjukkan posisi seseorang dalam sistem prestise atau gengsi dari masyarakatnya, maka peranan itu menunjukkan jumlah keseluruhan dari pola yang berkaitan dengan status tertentu. Masyarakat kita mengenal dua macam status, yaitu *ASCRIBED STATUS dan ACHIEVED STATUS. Ascribed Status* yaitu status yang dimiliki seseorang dengan sendirinya, biasanya didasarkan kepada faktor seks atau jenis kelamin, faktor umur, faktor kekerabatan, keturunan dan ras. Sedangkan *Achieved Status*, yaitu status yang dimiliki seseorang karena diusahakan untuk memilikinya. Kedua status ini penting bagi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat, namun achieved status inilah yang sulit diperoleh mereka, sehubungan dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang cenderung tidak menunjang, terutama dari segi pendidikan anak maupun orangtua.
Kesulitan meningkatkan taraf pendidikan anak dikarenakan rendahnya tingkat ekonomi para orang tua anak yang bermatapencaharian hanya sebagai golongan bawah, seperti

kuli bangunan, buruh tani, pedagang sayur dan lainnya sehingga tidak dapat membiayai pendidikan anak secara sempurna. Ternyata tidak semua anak tinggal bersama orang tua, ada pula yang dibesarkan dan dibiayai oleh seorang nenek dari pihak ibu akibat orang tua bercerai, dan hubungan sosial antara anak dan orang tua tampaknya kurang harmonis.

Menurut pengakuan orangtua nilai anak laki-laki maupun nilai anak perempuan sama besar pengaruhnya terhadap keluarga, walaupun masing-masing anak memiliki kelebihan dan kekurangan dalam dirinya. Mereka memiliki pandangan hidup untuk meraih cita-cita seperti ingin menjadi dokter, guru SMP atau guru SMA, Polisi dan lain-lain, hanya sayang semuanya tidak dapat diwujudkan dengan kenyataan.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion (FGD)* menyebutkan bahwa dalam budaya sunda ada pepatah sunda mengatakan : ***"tong luhur-luhur teuing sakola, awewe mah da ka dapur oge"*** (Perempuan itu jangan tinggi-tinggi sekolah, yang ujung-ujungnya ke dapur juga). Disebutkan juga bahwa nilai anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, sehingga keluarga lebih memperhatikan/konsentrasi pada anak laki-laki sedangkan perempuan hanya membantu.

Hasil FGD menyebutkan bahwa pada umumnya perempuan lebih banyak yang bekerja mencari uang daripada kaki-laki. Jenis pekerjaan yang banyak dilakukan adalah menjadi TKW ke luar negeri. Selain itu juga jenis pekerjaan di lapangan lebih banyak menyerap tenaga perempuan dibanding laki-laki, terutama di bidang industri. Oleh karena itu perempuan mendatangkan uang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Di Karawang ada anggapan bahwa perempuan dengan status janda lebih mahal dibandingkan dengan gadis. Karena janda merupakan sumber uang dengan pengalamannya sebagai PSK dan janda lebih dewasa. Sedangkan gadis dianggap tidak menghasilkan. Di Karawang juga ada beberapa kasus seperti anak kelas 1 SMP dan kelas 2 SMP disuruh keluar sekolah karena dinikahkan dengan orang dari lokal atau orang luar. Anak tersebut biasanya mau saja dinikahkan karena ada nasehat dari orang tua "jangan menolak jodoh" sehingga ada kesan asal nikah saja.

Karena ada kebutuhan ekonomi dalam keluarga maka seorang janda biasanya lebih produktif. Adanya toleransi yang terlalu luas dari masyarakat maka jika seseorang melakukan perilaku negatif tidak merasa riskan. Hal inilah yang menyebabkan perilaku negatif tersebut dilakukan terus menerus. Sebagai contoh seorang janda yang jadi PSK, tidak akan riskan dengan pekerjaan tersebut karena adanya toleransi masyarakat yang terlalu luas dan masyarakat mengaggap pekerjaan tersebut suatu hal yang wajar. Di Karawang juga dikenal adanya istilah "sawer" , dimana seseorang yang menari jaipong dengan "goyang karawangnya" mendapat saweran uang dari penonton. Hal tersebut merupakan hiburan yang membuat orang kampung kumpul meruah. Hiburan ini juga biasanya disertai dengan musik dangdut.

Di kawasan nelayan dikenal adanya "pesta laut" (Nadran). Pesta ini diikuti masyarakat setempat dengan membawa makanan dan biasanya disertai dengan minum alkohol dan ***main madon***. Untuk menghindari usia perkwainan muda dan putus sekolah bagi anak-anak pelajar SMP dan SMA maka pada saat ini petugas KUA hanya mau menikahkan anaknya dengan batasan umur 17 tahun, padahal sebelumnya 13 tahun. Pada saat ini tingkat DO siswa SMP dan SMA di Kabupaten Karawang mencapai 3-4 persen. Alasan mereka DO dari sekolah karena dinikahkan oleh orang tua dan disuruh bekerja. Di Karawang juga ada suatu kecenderungan bahwa pada musim panen tingkat perkawinan meningkat dan pada musim paceklik perceraian yang meningkat.

Beberapa solusi yang diusulkan untuk mencegah tingkat DO yang lebih tinggi adalah dengan cara :

- beasiswa untuk siswa dan siswi dengan perekapan
- peningkatan pelayanan BP pada pelajar dengan cara meningkatkan alokasi anggaran pembinaan siswa dan koordinasi dari pihak keluarga

Proses belajar mengajar di sekolah tidak hanya dalam bidang ilmu sosial, ekonomi, matematika saja namun dipelajari pula aspek nilai budaya agar anak-anak mengetahui dan menyadari pentingnya adat istiadat yang ada disekelilingnya, seperti upacara-upacara tradisional yang masih berlangsung dan diadakan oleh masyarakat setempat, yaitu Upacara Hajat Bumi, Upacara Nyalin, Upacara Nadran, Permainan Rakyat diantaranya Jajampanaan, Susuan, Cicinaan, Sasalimpetan, Kukudaan, Permainan Panggal, Kelereng dan lain-lain. Komponen-komponen ini termasuk dalam Folklor, yaitu sebagian kebudayaan yang tersebar dan diwariskan turun temurun, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat – *mnemonic device* (James Danandjaja.1984:2).

Aktivitas upacara-upacara dan permainan tradisional merupakan salah satu unsur kebudayaan yang diperolehnya melalui warisan lisan, terutama dalam permainan rakyat banyak dimainkan anak-anak, karena permainan ini disebarkan hampir murni melalui tradisi lisan dan banyak diantaranya disebarluaskan tanpa bantuan orang dewasa seperti orang tua mereka, guru sekolah dan generasi penerus.

Keadaan Masyarakat Pantura Di Bidang Pendidikan

Masyarakat pantai utara Jawa Barat umumnya bermatapencaharian dari hasil laut, pertanian dan perkebunan, oleh karena itu tidak heran jika dari golongan bawah banyak orangtua siswa yang bekerja sebagai nelayan, buruh tani, pedagang dan sebagainya. Istilah tersebut dalam bahasa sunda disebut *ngarambet atau ngabedug yang selesai pada saat dzuhur (lohor).* Jenis pekerjaan lain yang dimiliki sebagian besar penduduk Subang adalah buruh perkebunan bahkan kuli bangunan dengan pendidikan rendah serta tingkat ekonomi yang rendah pula. Kondisi ini bisa mempengaruhi terhadap pendidikan anak-anak dalam keluarga, seperti hubungan sosial antara anak dan orangtua, anak dan saudara kandung, saudara tiri dan masalah lainnya.

Bagi orangtua dalam kondisi apapun anak adalah harta yang tidak ternilai, dan sudah selayaknya orangtua akan melakukan apa saja demi anak, walaupun mengasuh dan mendidik anak dibutuhkan pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan kesabaran dalam menghadapi kelebihan dan kekurangan anak.

Ketika kami mengadakan wawancara dengan anak-anak tersebut, mereka mengungkapkan keluhan-keluhan baik di lingkungan keluarga dan sekolah. Umumnya anak-anak merasa sulit untuk mendapatkan fasilitas dan sarana belajar di rumah, dengan kondisi rumah yang tidak representatif dan kadang-kadang suasana rumah tidak mendukung menyebabkan anak sulit untuk konsentrasi terhadap pelajaran sekolahnya. Padahal sekolah merupakan tempat di mana anak-anak berada selama siang hari mereka berkumpul dengan kelompok sebayanya, yang dapat menjadi suatu ajang perkenalan antar mereka. Di sini peran orangtua sangat dibutuhkan oleh anak-anak, karena besar pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian anak, termasuk pola asuh.dalam keluarga. Ternyata dilaporkan bahwa hubungan anak dan orangtua cukup baik, terutama ibu sering memberikan nasihat baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan yang sifatnya cukup mendidik dan membuat anak menjadi semangat untuk bisa mencapai cita-citanya, seperti ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi agar bisa menjadi sarjana pertanian, atau dokter sesuai harapan dirinya dan orangtuanya.

Keinginan untuk menjadi seorang sarjana nampaknya hanyalah sebagai ungkapan perasaan dirinya saja, karena dia sadar akan kondisi ekonomi orangtuanya yang miskin dan mustahil dapat membiayai pendidikan tersebut, mengingat untuk kehidupan sehari-hari saja orang tua sering berutang kepada tetangga, saudara maupun kerabatnya. Kadang-kadang untuk mengembalikan uang pinjaman atau utang bisa juga dibayar tanpa uang tetapi dengan tenaga seperti yang punya uang tadi memiliki lahan pertanian atau perkebunan, maka ibu atau ayah yang pinjam uang membayarnya dengan bekerja *ngarit atau ngebabad.* Bahkan untuk makan sehari mereka jarang tiga kali, cukup dua kali saja yaitu pagi pukul 10.00 dan sore hari pukul 16.00, ada pantangan jika makan malam hari dianggap dengan istilah *seueur beurit ngarusak kana pare,* artinya banyak tikus merusak padi.

Apabila harapan anak perempuan tidak tercapai dengan cita-citanya, mereka masih berharap dapat mengikuti kursus jahit agar kelak setelah dia tidak dapat melanjutkan pendidikan bisa menerima jahitan atau kerja di pabrik. Lain halnya anak laki-laki ingin bekerja di bengkel motor, mobil atau dagang apa saja yang penting tidak menganggur. Mereka begitu mulia menginginkan kondisi ekonomi yang bisa lebih baik dari orangtuanya, dan ingin membahagiakan keluarga serta kerabatnya. Namun sering orang tua berfikiran agar anak perempuannya apabila tidak bisa melanjutkan pendidikan untuk segera dinikahkan saja, dengan harapan anak perempuan ini dapat membantu perekonomian keluarga, padahal kenyataannya tidak seperti dalam bayangannya. Perkawinan muda penuh dengan risiko, karena bisa juga anak ini melangkahi kakak laki-laki atau perempuan. Sehingga muncullah istilah-istilah sunda di daerah Subang untuk anak yang mau menikah kemudian melangkahi satu kakak diartikan *ngarunghal, atau balagadigdeg,* bila dua kakak *ngarungkat,* dan bila tiga kakak *ngadungkar.* Istilah-istilah ini memiliki nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat sunda umumnya dan di daerah pantura Jawa Barat pada khususnya yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan dan dilestarikan.

Posisi wilayah Indramayu merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, oleh karena itu budaya Indramayu merupakan akulturasi dari budaya Jawa dan sunda, sehingga memiliki keunikan-keunikan yang tidak dimiliki daerah lain. Selain itu, masyarakat Indramayu juga memiliki karakter yang keras akan tetapi tetap menjunjung tinggi sikap saling menghormati, mengasihi antar sesama serta bersikap dan berkata apa adanya tanpa ada tendesi lain dibelangnya.

Tampaknya anak-anak laki-laki dan perempuan yang dijadikan objek penelitian di sini lebih mementingkan pendidikan sekolah dibanding mereka harus menjalani profesi sebagai anak jalanan atau anak nakal yang selalu mengganggu ketertiban masyarakat. Walaupun mereka dalam kehidupan sehari-hari sangat prihatin dalam menjalani pendidikannya, kadang-kadang mereka sama sekali tidak bisa jajan untuk menahan lapar perutnya ketika sedang berada di sekolah, menunggak pembayaran uang sekolah, tidak memiliki fasilitas belajar di rumah dan lain-lain, karena orang tua hanya membekali ala kadarnya untuk biaya angkutan kota alias angkot, itu pun seringkali orang tua berutang kepada tetangga atau kerabatnya. Bagi mereka pendidikan lebih penting dibanding menganggur, karena setidaknya bila dia memiliki ijazah SMA masih bisa mencari pekerjaan di instansi, pabrik, restoran dan tempat-tempat lainnya.

Diantara anak-anak ini ada seorang anak perempuan sambil sekolah dia juga berprofesi sebagai penyanyi dangdut. Uang yang didapatkan dari menyanyi untuk biaya pendidikan dan membantu orang tuanya. Kendala yang dihadapi adalah dalam membagi waktu untuk belajar dan menyanyi, yang kadang-kadang dilakukan pada malam hari, sedangkan keesokan harinya dia harus pergi ke sekolah. Untungnya para guru-guru memberikan dukungan penuh kepada siswi tadi, sehingga sering mendapat dispensasi dari kepala sekolah tempat dia belajar. Semua siswa dan siswi tadi mengatakan bahwa pendidikan sangat penting bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang, walaupun untuk mencapai keberhasilan ini tidak semua berjalan dengan lancar dan mulus. Bahkan ada siswa yang bercita-cita ingin jadi dokter, astronot.

Di sekolah ada juga siswa yang sering ditegur oleh gurunya karena melanggar GDS (Gerakan Disiplin Siswa), seperti berkelahi, rambut dimerahkan, bila upacara tidak memakai kaos kaki warna hitam atau putih, mengeluarkan hem selama proses belajar mengajar berlangsung dan lain-lain. Peran guru sangat besar dalam membimbing dan membina para siswa dan siswinya, agar mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam belajar, etika, kedisiplinan dan lain-lain.

Dalam keluarga peran orangtua untuk membimbing dan mengasuh anak cukup besar, ayah sebagai pengawas sosial (*social control*), sedangkan ibu sebagai pola asuh anak-anaknya serta mengatur rumah tangga. Hubungan yang terjalin anak-anak di Indramayu dengan orangtuanya terputus karena faktor ekonomi, yang mengakibatkan tidak semua anak dekat hubungannya dengan orang tua, karena ada diantaranya yang orangtuanya bercerai dan anaknya ikut dengan neneknya. Kondisi keluarga yang anaknya kurang dekat dengan orang tua atau kurang harmonis dan kurang komunikasi, menyebabkan anak mencari pengganti (substitusi), bisa masuk ke dalam lingkungan sosial teman-teman sebayanya atau di luar lingkungan lainnya yang ternyata anak-anak nakal. Risikonya anak ini bisa terlibat dalam kehidupan anak-anak nakal tadi, apabila tidak segera dicegah oleh orang tua.

Masyarakat Indramayu merupakan masyarakat yang terbuka akan perubahan dan pembaharuan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan serta transformasi nilai sosial dan budaya dalam era kompetisi global sekarang ini, yang dapat ditunjukkan dengan keberanian mereka untuk berinteraksi dengan dunia luar. Dengan kondisi masyarakat yang heterogen dan terdapat banyaknya akulturasi sosial budaya yang terjadi, namun dalam hal keamanan, masyarakat Indramayu mampu mempertahankan stabilitas keamanan, serta menjaga suasana yang kondusif. Keadaan tersebut dapat dilihat pada saat proses demokratisasi yang baru saja dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dalam pemilihan kepala daerah dimana pemilihan tersebut dapat berlangsung secara aman, lancer, demokratis, jujur dan adil kendati terjadi banyak perbedaan aspirasi politik yang tajam di masyarakat.

Komunikasi antara anak dengan orangtua dalam keluarga lebih banyak menggunakan bahasa Jawa dibanding bahasa Sunda, mengingat jalur ini sebagai penghubung antarkota dari daerah Jakarta, Jawa Barat menuju Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan kota-kota lainnya, menyebabkan dialek Jawa di Indramayu merupakan bahasa Jawa Tengah yang agak kental selain terpengaruh pula oleh bahasa Sunda dan Cirebon yang dikenal dengan istilah dialek *Indrayong*. Sementara jika anggota masyarakat menggunakan bahasa Sunda tampak dialeknya tidak lepas dari dialek Jawa, dan mereka menggunakan bahasa Sunda kasar. Dialek ini dapat dikelompokkan sebagai bentuk folklor lisan Indonesia yang dikenal pula dengan kelompok bahasa rakyat. Penggunaan bahasa ini masih tetap dipakai oleh masyarakat setempat. Selain dengan bahasanya yang berbeda dengan daerah lain, Kabupaten Indramayu juga terkenal dengan daerah prostitusi baik yang terselubung maupun secara terbuka.

Pandangan Budaya Terhadap Perempuan

Dalam sistem sosial-budaya yang didominasi oleh sistem patriarkhi, terdapat perbedaan peran gender yang cenderung kaku pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Perbedaan peran gender yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya masyarakat inilah yang melahirkan ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan. Manifestasi ketidakadilan ini terwujud dalam bentuk marginalisasi, subordinasi maupun stereotipe bagi kaum perempuan.

Marginalisasi terhadap kaum perempuan antara lain bersumber dari adat istiadat dan kebiasaan, dan dapat juga bersumber dari kebijakan pemerintah dan keyakinan. Menurut catatan sejarah, sudah sejak berabad-abad perempuan di Pulau Jawa hanya difungsikan sebagai reproduksi dan pemuas nafsu seksual, serta dainggap sebaga pelengkap keberadaan laki-laki. Kondisi ini bertambah parah karena masih ada ungkapan di masyarakat bahwa *perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya hanya ke dapur dan melayani suami,* atau *aktivitas perempuan hanya seputar sumur-dapur dan kasur.*

Anggapan ini memunculkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan terurama dalam bidang pendidikan dan politik. Ini berakibat kaum perempuan sangat terbatas dalam mempunyai akses terhadap pengembangan intelektualitasnya. Oleh karena diskriminasi budaya inilah menimbulkan adanya kebutuhan pendidikan bagi anak-anak perempuan yang tetap terabaikan hingga kini.

Marginalisasi juga terjadi akibat adanya diskriminasi budaya terhadap pembagian kerja menurut gender. Ada jenis pekerjaan tertentu yang dianggap pantas dan tidak pantas bagi untuk perempuan. Karena perempuan dianggap tekun, sabar dan ramah, maka jenis pekerjaan yang cocok bagi mereka antara lain: sekretaris, perawat/suster, pramugari, kasir, guru TK (taman kanak-kanak) atau penerima tamu. Persoalannya semakin rumit ketika pekerjaan-pekerjaan yang dianggap feminin selalu dinilai rendah bila dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap maskulin(Muthali'in, 2001:34). Keadaan ini menyulitkan bagi perempuan yang berpendidikan rendah. Mereka sulit mencari pilihan karena lapangan kerja dengan bekal pendidikan ala kadarnya amat terbatas, paling-paling menjadi pembantu rumah tangga atau pelayan warung makan. Untuk pelayan rumah makan besarpun seringkali "diambil alih" oleh laki-laki. Sementara untuk melakkan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki, misalnya menjadi kenek, sopir atau pekerja bangunan, masih dianggap tidak layak oleh masyarakat pada umumnya.

Subordinasi perempuan juga dicerminkan di kehidupan keluarga dan di masyarakat. Subordinasi perempuan menunjukkan bahwa kedudukan perempuan, khususnya dalam rumah tangga. Peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan pemimpin serta pencari nafkah utama, sehingga menjadikan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga dan dalam kehidupan masyarakat. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan istri berada di belakang bayang-bayang kekuasaan suaminya/laki-laki. Stereotipe ini menyebabkan apa yang dihasilkan oleh perempuan hanya sebagai sambilan atau tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, meskipun tidak jarang penghasilan perempuan/isteri lebih tinggi dari laki-laki. Akhirnya, peran perempuan berada pada posisi yang sangat lemah sebagai pengambil keputusan kecuali dikehendaki oleh suaminya.

Subordinasi perempuan dalam hukum juga tampak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 506 yang berbunyi: *Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.* Pasal ini hanya menempatkan perempuan sebagai obyek pelacuran, dan tidak menempatkan laki-laki yang menjadi *gigolo* sudah bukan rahasia lagi.

Stereotipe secara umum diartikan sebagai pelabelan atau penandaan pada suatu kelompok tertentu yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Salah satu stereotipe yang memojokkan perempuan adalah perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya, karena dialah yang menjadi penyebab pertama terjadinya pemerkosaan. Stereotipe lainnya adalah perempuan berfungsi sebagai ibu rumah tangga dan melayani suami. Pelabelan ini menghambat pendidikan kaum perempuan karena walaupun sekolah tinggi-tinggi, tetap akan berada di rumah menjadi ibu rumah tangga dan melayani suami.

Pelabelan perempuan yang sangat tidak adil adalah pelabelan sebagai mahluk yang harus suci, bersih tanpa noda, sehingga keperawanan dianggap hal yang mutlak harus ada pada seorang perempuan, bukan pada seorang laki-laki. Ketika malam pertama perkawinan diketahui keperawanan sudah tiada lagi, maka situasi muram akan menyelimuti perkawinan itu dan sang perempuan menjadi bahan pergunjingan. Sementara itu, keperjakaan seorang laki-laki hampir tidak pernah menjadi bahan pergunjingan. Dampaknya sangat merugikan kaum perempuan, karena memunculkan anggapan bahwa jika perempuan sudah tidak perawan lagi maka sudah tidak ada harganya dimata masyarakat khususnya kaum laki-laki.

Kondisi-kondisi yang banyak memunculkan ketidakadilan bagi kaum perempuan inilah yang selama ini mendasari pola asuh orangtua terhadap anak perempuan. Untuk memperkuatnya tidak jarang dimunculkan mitos-mitos yang diyakini sebagai sesuatu yang kebenarannya tidak dapat diganggu gugat. Kondisi-kondisi ini juga terwujud dalam gaya hidup yang memang diciptakan oleh kaum laki-laki untuk kepentingan industri.
Seringkali dinyatakan bahwa "kebudayaan" bertanggung jawab terhadap ciri-ciri khas pekerjaan perempuan. Nilai-nilai agama dan budaya memang penting. Ciri-ciri budaya Jawa Barat seperti preferensi yang kuat pada matrilokalitas, warisan bilineal, serta citra-citra budaya terhadap wanita Sunda mempengaruhi pekerjaan wanita. Aspek tersebut tercermin dalam dua peribahasa berikut ini yang menekankan kurangnya inisiatif dan kekuatan tawar menawar wanita Sunda: *"isteri mah dulang tinande"* (wanita bagaikan dulang nasi kosong yang menanti pria untuk mengisinya) dan "*najan dibawa ka liang*

cocopet, oge daek" (wanita hanyalah pengikut suami mereka, mengikutinya baik dalam keadaan derita maupun bahagia).

Wanita di Jawa Barat dinikahkan pada usia cukup dini, lebih muda daripada wanita dari propinsi-propinsi lainnya. Usia minimum yang resmi untuk perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 18 tahun untuk pria. Kendati demikian, pemerintah mencoba membujuk wanita untuk tidak menikah sebelum usia 18 tahun, akan tetapi di desa-desa wanita masih tetap dinikahkan pada usia sangat dini. Selain itu, bagi pengantin yang sangat muda diaharapkan akan hamil segera mungkin. Pasangan-pasangan muda yang belum memiliki anak, tidak memenuhi syarat sebagai akseptor program keluarga berencana nasional. Rata-rata wanita di Jawa Barat mempunyai lebih banyak anak-anak daripada wanita di bagian lainnya di pulau Jawa.

Ciri lainnya adalah wanita Sunda umumnya bersifat matrilokalitas. Ketika perceraian yang dapat terjadi akibat tidak memiliki anak atau akibat isteri yang tidak mau dimadu, kemiskinan ataupun ketidakrukunan, menyebabkan kerugian bagi pihak wanita. Jika memiliki anak, biasanya anak tersebut akan tinggal bersama ibu, kadang-kadang anak yang berumur lebih besar ikut bersama ayah. Si ibu jarang menerima bantuan keuangan apa pun dari si ayah. Oleh karena itu, si ibu hanya mengandalkan kepada keluarganya sendiri. Dalam tahap ini, nenek memiliki peranan yang penting dalam membantu kelangsungan hidupnya. Ini berarti bahwa seorang wanita dapat terus hidup dekat dengan ibunya dan saudar-saudara lainnya.

Bagi wanita Sunda terdapat sebuah tabu sosial terhadap poligami. Wanita biasanya enggan bahwa mereka dimadu. Jika sang suami menikahi seorang isteri kedua yang usia jauh lebih muda, isteri pertama dapat merasakan dan menemukan dirinya dalam keadaan yang sebanding dengan keadaan seorang isteri yang ditinggalkan oleh suaminya. Ia harus membela dirinya sendiri dan anak-anaknya. Apabila dia sudah mendapatkan jaminan posisi keuangan yang stabil, ia dapat menanggulangi perubahan-perubahan tersebut. Tetapi bagi isteri yang hanya menyandarkan kepada suami mereka untuk modal maka masa sulit akan tiba.

Tingkat pendidikan laki-laki di daerah Jawa Barat jauh lebih baik daripada wanita, terutama di daerah pedesaan yang hanya sebagian kecil saja anak-anak perempuan yang dapat merasakan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, seperti SMA. Terbatasnya akses pendidikan tersebut dapat disebabkan oleh perkawinan dan menjadi seorang ibu pada usia dini. Oleh karena itu, membatasi keterampilan dan mobilitas wanita dan jangkauan yang jauh dari peluang-peluang pekerjaan yang layak. Dipihak lain, tanggung jawab bagi keluarga mereka yang diperoleh sejak awal serta kemungkinan diperberat oleh terjadinya perceraian dan poligami sehingga memaksa mereka untuk mencari pekerjaan terutama dalam sektor-sektor marginal dengan imbalan rendah. Sebagai kepala keluarga, wanita seringkali tidak mampu menyandarkan diri pada pasangan pria baik modal maupun tenaga kerja. Selain itu, komposisi dan besarnya rumah tangga wanita dapat menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi wanita dalam kegiatan-kegiatan produktif. Disamping ciri-ciri khusus bagi wanita Jawa Barat tersebut, terdapat aspek-aspek penting lainnya yang lebih umum dan lebih mempengaruhi pekerjaan wanita, yaitu kelas, konteks sosial-ekonomi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan (Grinjs, dkk, 1992).

Dalam kegiatan kebudayaan seperti acara selamatan (dalam bahasa Sunda: Hajatan) yang diseleggarakan untuk memperingati persitiwa-peristiwa penting dalam kehidupan. Itu semua merupakan bentuk utama dari pertukaran materi dan kegiatan timbal balik anatr keluarga. Pada hari selamatan pagi-pagi para wanita datang ke rumah yang mempunyai hajat dan membawa sumbangan uang, beras atau makanan lain serta seringkali membantu persiapan acara tersebut. Sedangkan kaum pria datang di sore hari untuk menghadiri acara formil dan sumbangan mereka terbatas pada partisipasi dalam upacara singkat, seperti pembacaan doa-doa.

Nilai- Nilai Keluarga dan Masyarakat Sebagai Bagian dari Pandangan Budaya

1. Anak merupakan aset, terutama berlaku bagi anak perempuan. Anak memiliki kewajiban membantu menyelesaikan pekerjaan keluarga bahkan ikut mencari nafkah. Ada ungkapan bahwa "*duwe anak wadhon kayak duwe emas se gudel*" artinya mempunyai anak perempuan seperti mempunyai kekayaan mas sebesar anak kerbau. Secara harfiah, apabila mempunyai anak perempuan maka bisa dikaryakan untuk kepentingan perolehan ekonomi, melalui pekerja seks komersial, atau menjadi pekerja di warung-warung remang-remang.

2. Anak perempuan merupakan simbul "malu". Di Indramayu dikenal dengan tradisi kawin muda. Pada awalnya, anak dikawinkan pada usia muda karena malu bila tidak laku sehingga harus cepat-cepat dinikahkan. Seringkali orangtua campur tangan memilih calon suaminya, dan seringkali dalam waktu singkat terjadi perceraian bila perkawinan itu dianggap kurang menyenangkan. Perceraian ditoleransi oleh masyarkat lingkungan, bahkan pada sebagian masyarakat, orang tua bangga anaknya sering kawin-cerai. Studi yang dilakukan Wibowo, dkk (1989) di Indramayu menunjukkan, dari 50 orang responden, 44 orang diantaranya pernah mengalami perceraian. Faktor sosial-budaya yang sering dikatakan responden antara lain perkawinan pada usia sangat muda, orangtua yang memilihkan calon suami, perceraian mudah dilakukan dan ditoleransi masyarakat, bahkan orangtua bangga anaknya kawin-cerai berkali-kali karena itu memperlihatkan anaknya disukai laki-laki.

   Setelah bercerai, sebagian dari mereka harus membiayai hidupnya sendiri. Untuk membiayai hidupnya setelah bercerai, apalagi bila mereka harus memelihara anak dari hasil perkawinannya itu, banyak di antara mereka yang lari kedunia pelacuran karena tidak memiliki ketrampilan lain untuk bekerja. Dalam kasus ini tampak perceraian menjadi semacam tiket bagi anak-anak yang kawin pada usia muda untuk memasuki dunia prostitusi. Ini tampak pula pada tulisan Her Suganda (*Kompas,* 16 September 1979) yang mencatat bahwa perempuan dari Gabus Wetan yang masuk kedunia prostitusi adalah perempuan muda, bercerai dan tidak berpendidikan. Masuknya mereka kedunia pelacuran tidak dianggap hal yang luar biasa karena menurut studi yang dilakukan Wibowo, dkk (1989) di Indramayu menunjukkan, orang-orang tidak merasa ada hambatan sosial dan bahkan orangtua seringkali tidak keberatan anaknya bekerja sebagai seorang pelacur.

3. Nilai-nilai kehidupan (Mahfuds, 1996)
   - Orang Sunda yang kelahiran sebelum Perang Dunia II mengenal istilah Agama dan Darigama. Kedua istilah tersebut memperbedakan hal-hal yang termasuk ke dalam lingkungan agama dan yang tidak termasuk ke dalamnya. Pengertian agama termasuk didalamnya hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan akhirat, misalnya hubungan antara Tuhan dengan manusia

ciptaanNya. Sedangkan darigama termasuk didalamnya hal-hal yang berhubungan dengan duniawi yang dianggap tidak ada hubungannya dengan kehidupan akhirat. Misalnya hubungan antar manusia yang melahirkan kegiatan ekonomi, pemerintahan, perang, dan lain-lain.

Kedua istilah tersebut dimasyarakatkan oleh bangsa penjajah sebagai kesengajaan mengingat masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam. Namun demikian tersebar pula larangan-larangan yang berlaku di masyarakat saat masa penjajahan, seperti para ulama dilarang menerjemahkan arti dari bacaan Al Quran, dan hanya boleh menggunakan bahasa arab jika berceramah dan harus dengan seizin pemerintah kecematan.

- Adat Sunda yang paling penting adalah adat yang berhubungan dengan lingkaran hidup, adat bertani, dan waris. Adat lingkaran hidup ada dari semenjak dalam kandungan sampai setelah meninggal yang terbagi menjadi tiga yaitu upacara adat sebelum lahir (contohnya: tingkeban, hajat bubur lolos), adat selama hidup (contohnya: kelahiran, khitanan, bancakan ulang tahun, pertunangan, pernikahan), dan setelah meninggal (contohnya: nyusur tanah, tiluna (hari ke 3), tujuhna, matang puluh, natus, mendak tahun, newu). Adat bertani masih berlaku di beberapa daerah di Jawa Barat, dimana saat musim hujan tiba, sebelum sawah mulai diolah dilakukan adat labuh bumi. Para petani membawa makanan masing-masing pada malam harinya kemudian berdoa dan makan bersama-sama.

4. Nilai Gender

Keterbatasan lapangan kerjra yang ada di daerah Jawa Barat terutama kota sebagai tempat urbanisasi bagi masyarakat desa menimbulkan persaingan yang ketat. Sehingga bagi mereka yang tidak beruntung memperoleh pekerjaan biasanya menjadi tuna wisma bahkan bagi perempuan ada yang menjadi penjajak seks komersil (PSK). Hingga saat ini sebagian besar PSK adalah perempuan yang berumur antara 18-29 tahun yang 80% dari mereka memiliki pendidikan tidak tamat SD. Hal tersebut dikarenakan perempuan desa yang datang ke kota tidak dibolehkan memiliki pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Bagi keluarga masyarakat desa di Jawa Barat, anak perempuan pasti akan kembali bekerja di dapur sehingga dirasa sangat cukup berpendidikan SD saja. Selain itu, anak perempuan di desa-desa segera dinikahkan jika telah mengalami pubertas karena bagi keluarganya hal tersebut dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Dalam soal waris, adat Sunda memberikan persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan. Pembagian harta warisan dibagikan berdasarkan kesepakatan dari orangtua yang membuat kebijakan agar setiap anak memperoleh keadilan dan dengan pertimbangan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

5. Anak perempuan jangkauan langkahnya pendek, karena akhirnya perempuan ke dapur dan mengabdi pada suaminya. Bersamaan dengan masalah ekonomi keluarga, maka orangtua tidak dapat menyekolahkan anaknya lebih tinggi, hanya cukup sampai sekolah dasar. Persoalannya tidak ada biaya dan perempuan dinilai pada akhirnya harus didapur, jadi tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Berdasarkan dari informasi orangtua partisipan menikahkan anak perempuannya karena tidak mampu membiayai sekolahnya. Selain itu mereka takut anaknya masuk dalam pergaulan yang tidak baik. Kalau anaknya segera dinikahkan, harapan orangtua, anaknya dapat membantu kebutuhan hidup bapak/ibu dan adik-adiknya. Pernikahan dengan pilihan orangtua dalam usia dini seringkali berakhir dengan perceraian. Status janda yang disandang, keadaan ekonomi keluarga yang tidak berubah selalu kekurangan, keterbatasan keahlian yang dimiliki, dan pergaulan, menyebabkan mereka terjerumus kedalam dunia prostitusi.

6. Nilai materialisme pada masyarakat
   Gaya hidup yang berkembang di kalangan remaja perkotaan saat ini, yang dapat mendorong anak memasuki dunia pelacuran antara lain: konsumerisme, penggunaan narkoba dan pengalaman seks dini

   Tradisi sikap materialistis di kalangan warga masyarakat Indramayu, sehingga terdapat kepuasan apabila mereka dapat memperlihatkan kepada orang lain kemampuan ekonomi, misalnya kebiasaan mempunyai hajatan besar-besaran, berlomba-lomba memberi sawer yang banyak kepada para penari ronggeng atau penyanyi, atau pada saat mereka mampu mengadakan pesta besar. Semakin besar pesta, semakin banyak hiburan yang disewa, makin meningkat kelas sosial mereka dalam masyarkat.

Studi Wibowo, dkk. (1989) menunjukkan, cara hidup boros dan suatu kecenderungan untuk memperlihatkan status melalui pengadaan upacara dengan biaya mahal melebihi kemampuannya ini mendorong suatu perilaku toleran ke arah cara mencari uang untuk menutupi berbagai biaya, termasuk melalui pelacuran.

Tradisi yang mempertemukan anak-anak muda untuk mencari jodoh, disuatu tempat, pada malam hari yang bebas dari kontrol sosial dan kontrol orangtua, dapat menjurus pada hal-hal yang tidak diinginkan bila standar moral yang dianut amat rentan terhadap penyimpangan. Kondisi ini juga sering dimanfaatkan pelacur untuk mencari pelanggan, sehingga pertemuan untuk mencari jodoh bercampur baur dengan transaksi seksual.

Tradisi kawin muda dan kawin cerai masih berlangsung pada masyarakat Kabupaten Indramayu, juga pesta-pesta yang dirayakan seperti khitanan dan perkawinan merupakan pola hidup boros. Di Kota Surakarta kawin muda dan kawin-cerai tidak terlihat nyata.

7. Nilai hubungan bonding antara orangtua dan anak. Orangtua dan anak mempunyai hubungan kasih sayang yang sangat kuat sejak anak masih dalam kandungan sampai anak tersebut dewasa dan menikah, serta membina rumah tangganya sendiri. Tradisi yang dilakukan keluarga dalam kaitannya dengan bonding orangtua dan anak adalah sebagai berikut:
   a. Pada masa kehamilan usia kandungan 4 (empat) bulan membuat ketupat dengan maksud agar anaknya dapat tumbuh sehat dalam kandungannya. Ketupat ini biasanya dibuat untuk dibagikan kepada sanak famili dan tetangga keluarga tersebut.
   b. Saat kandungan berusia 7 (tujuh) bulan melakukan acara tujuh bulanan dengan mengundang para bapak atau ibu-ibu untuk mengadakan doa bersama. Selesai doa bersama, biasanya seorang ibu yang mengandung dimandikan dengan air yang diisi bunga tujuh macam. Biasanya ibu yang

mengandung itu dalam kain penutup dan suaminya memasukan dua buah kelapa satu persatu sampai terjatuh. Telebih dahulu kulit nuah kelapa itu digambar seorang tokoh pewayangan, biasanya arjuna dan satu lagi dengan gambar Srikandi. Maksudnya pada usia kandungan 7 bulan itu kandungan sudah dapat terdeteksi jenis kelamin bayinya dan suaminya dapat memohon jenis kelamin anaknya.

c. Pada usia kandungan 8 bulan membuat kue yang halus berwarna coklat (kue lolos = bahasa Indramayu) dengan maksud agar keluarnya bayi akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Biasanya kue ini dibagikan kepada sanak famili terdekat dan tetangga rumah.

d. Ketika bayi sudah lahir berusia 40 hari, orangtua bayi ini biasanya mengumpulkan lagi ibu-ibu atau bapak-bapak untuk mengadakan doa bersama lagi. Mereka mendoakan bayinya agar menjadi anak yang baik menurut agama, berguna bagi bangsa dan negara. Pada acara ini biasanya ditandai dengan mencukur/memotong rambut kepala bayi sampai habis (gundul).

e. Acara pada bulan Bala (bulan Jawa). Bala berarti musibah. Masyarakat meyakini bahwa pada bulan tersebut banyak terdapat musibah yang akan terjadi. Biasanya para orangtua sebuah keluarga membuat sebuah kue cimplo (sebuah makanan/kue yang terbuat tepung beras, berbentuk segi empat dan dimakan dengan cairan gula). Kue cimplo ini dibuat untuk dimakan sendiri dan diberikan kepada tetangga. Ini dimaksudkan, katanya, untuk menghindari bencana/musibah.

Tradisi tersebut menunjukkan pentingnya anak dalam kehidupan sebuah keluarga. Biasnya sebuah keluarga melaksanakan upacara tersebut walaupun dengan kemampuan yang terbatas dan acara yang sederhana. Harapannya, anaknya akan menjadi orang yang baik, berguna bagi keluarga masyarakat, agama dan negara. Umumnya setiap orangtua menginginkan anaknya "cager (sehat jasmani—kesejahteraan fisik), bager (baik, budi pekerti luhur—kesejahteraan psiko-sosial-spiritual), pinter (cerdas, berpendidikan dan berpengetahuan – kesejahteraan kognitif)"

Orangtua pada umumnya berpikir bahwa laki-laki dan perempuan sama saja, hanya berbeda bentuk tubuh dan kodrat lahiriah saja. Semua itu titipan yang harus dipelihara dan dirawat dengan baik. Pada akhirnya setelah mereka menikah tidak harus tinggal dengan orangtua lagi.

Masih banyak pembatasan adat dan norma masyarakat pada perilaku perempuan, yang diawali dari pelabelan atau stereotipe atau sub-ordinasi (penomorduaan) terhadap perempuan, misalnya:

1. Peran perempuan adalah di sektor domestik; peran laki-laki adalah sebagai pemimpin dan pelindung keluarga, jadi bertanggung jawab dan berperan di sektor publik.
2. Stereotipe berdasarkan adat diidentikkan dengan peran sebagai berikut:
   a. Peran perempuan adalah di "Dapur/ Masak, Kasur/ manak, Pupur/ Macak" (Dapur untuk menyediakan makanan dan kegiatan domestik; kasur untuk memuaskan kebutuhan seksual dan untuk regeneratif keluarga, dan Pupur/ dandan untuk kebutuhan memuaskan kebutuhan seksual suami).
   b. Posisi perempuan sebagai "*konco wingking*" (orang belakang) dan orang nomor dua dalam pengambilan keputusan dalam keluarga.
   c. Peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan tulang punggung keluarga.
   d. Laki-laki tabu melakukan pekerjaan domestik seperti cuci piring, cuci baju dan memasak, karena itu "pekerjaan perempuan". Laki-laki yang bersedia melakukan pekerjaan perempuan dikhawatirkan dapat menurunkan derajat dan kewibawaan sebagai pemimpin dalam keluarga.
   c. Pendidikan diutamakan untuk laki-laki daripada perempuan, karena hal ini berkaitan dengan posisi laki-laki yang lebih utama dibandingkan perempuan. Adat menganggap perempuan tidak perlu sekolah terlalu tinggi karena "percuma saja, akhirnya toh ke dapur juga".
      i. Perempuan sering dilekatkan pada profesi tertentu seperti perawat, sekretaris, guru TK dan sejenisnya.
      ii. Laki-laki sering dilekatkan pada profesi Direktur, pilot, dokter dan lain-lain.

iii. Perempuan sering ditakut-takuti tidak boleh menempuh pendidikan terlalu tinggi karena takut akan menjadi perawan tua (disamping takut keasyikan menempuh dunia pendidikan dan pekerjaan profesional, juga dikhawatirkan laki-laki akan takut dan minder untuk mendekati perempuan yang pintar dan cerdas.

iv. Laki-laki tidak boleh mempunyai istri yang mempunyai pendidikan dan kedudukan sosial yang lebih tinggi dari dirinya.

Bagaimana Budaya Memposisikan Perempuan?

1. Perempuan adalah simbol dari eksistensi harmonisasi rumahtangga, keterjaminan kualitas SDM anak (kognitif, budi pekerti dan perilaku sosial), dan keterjaminan pengaturan rumah dan ketersediaan pangan keluarga.
2. Posisi perempuan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepemilikan aset, penentuan pendidikan anak, peminjaman kredit dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan suami adalah lemah. Posisi perempuan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaannya sendiri juga lemah.
3. Posisi perempuan dalam pembagian kerja juga lemah. Perempuan cenderung menerima dan berkompromi dengan suami dan keluarga besar untuk diberikan posisi dalam aspek domestik sesuai dengan anjuran budaya. Namun demikian, pengambilan keputusan dalam pekerjaan domestik seperti masak, dekorasi rumah, penataan rumah adalah dominan karena masih merupakan domain perempuan.
4. Posisi perempuan dalam manajemen keuangan keluarga (Perencanaan, penggunaan dan pengendalian keuangan) adalah lemah. Memang sudah diakui memang ada sebagian perempuan yang mempunyai posisi kuat dalam manajemen keuangan keluarga. Namun masih banyak perempuan yang tidak mempunyai posisi kuat. Biasanya perempuan yang tidak kuat posisinya adalah perempuan yang tidak bekerja dan pendidikannya rendah.
5. Pada umumnya rata-rata lama pendidikan yang ditempuh perempuan adalah lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lama pendidikan yang ditempuh laki-laki.

6. Posisi perempuan dalam melindungi kesehatan Reproduksi juga lemah. Hal ini tercermin dari banyaknya konseptor keluarga berencana (KB) masih didominasi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

6. Posisi perempuan dalam melindungi kesehatan Reproduksi juga lemah. Hal ini tercermin dari banyaknya konseptor keluarga berencana (KB) masih didominasi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

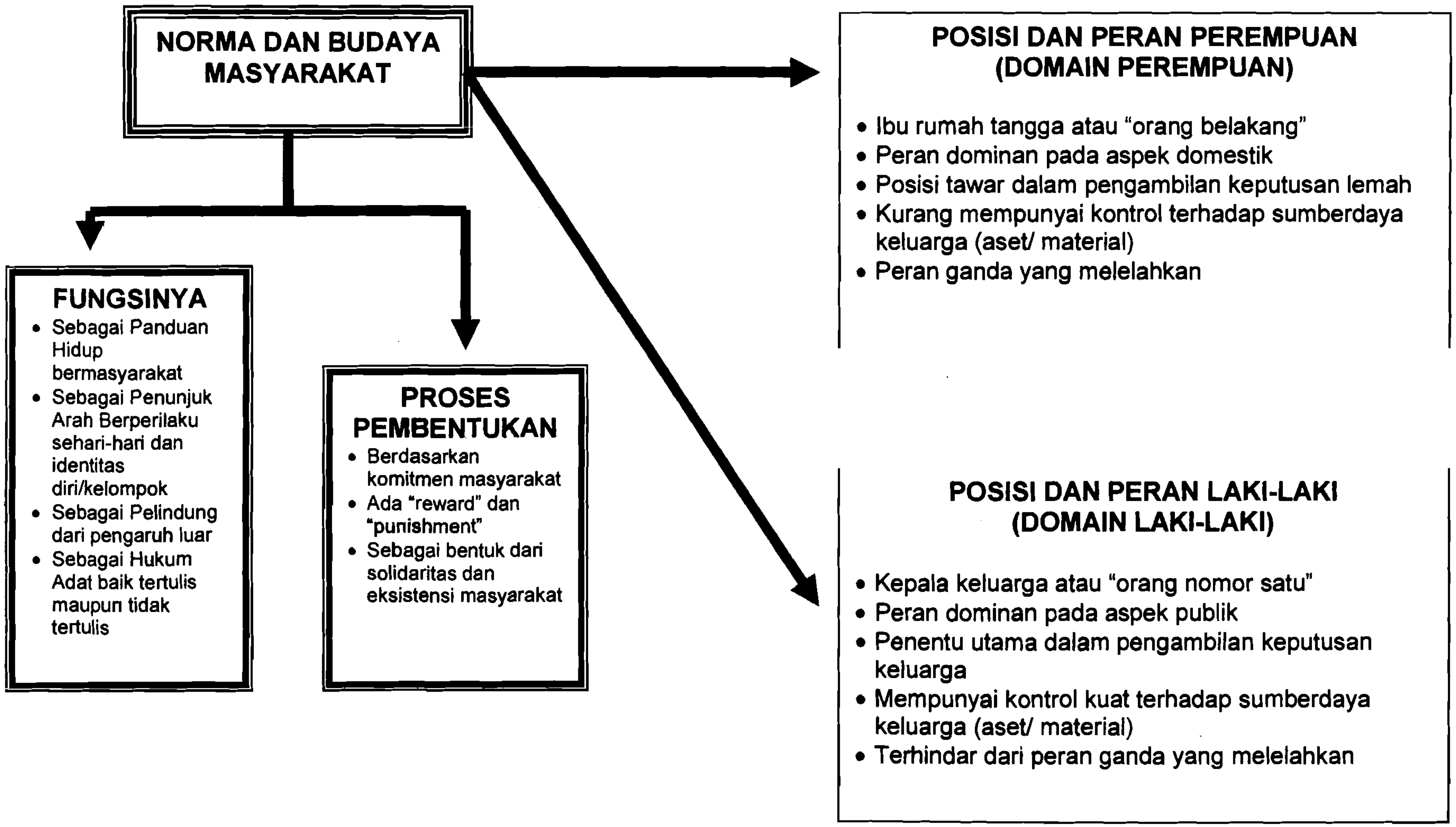

Gambar 20. Posisi dan Peran Laki-laki dan Perempuan Menurut Konteks Budaya

Konsekuensi dari Posisi Perempuan dalam Konteks Budaya

1. Karena perempuan disimbolkan sebagai eksistensi harmonisasi rumahtangga, maka kalau ada konflik rumahtangga yang akhirnya berujung pada perceraian, maka yang pertama kali disalahkan adalah perempuan, karena perempuan dinilai tidak dapat mengayomi rumahtangganya sehingga tidak dapat menciptakan harmonisasi keluarga. Seandainya secara kebetulan perempuannya bekerja dan kebetulan perempuan tersebut berprestasi, maka semakin kuatlah "*punishment*" dari budaya terhadap perbuatan perempuan akibat bekerja sehingga lupa akan "kodrati sebagai istri".
2. Karena perempuan disimbolkan sebagai pembentuk SDM anak (kognitif, budi pekerti dan perilaku sosial), maka kalau ada kejadian apakah anaknya terkena narkoba, menghamili anak orang lain atau dihamili anak orang lain, atau anak tidak naik kelas, ataupun anak terkena suatu penyakit, maka yang pertama kali disalahkan adalah perempuan, karena perempuan dinilai tidak dapat mendidik anak-anaknya menjadi anak yang "*bager, cager dan pinter*". Seandainya secara kebetulan perempuannya bekerja dan kebetulan perempuan tersebut berprestasi, maka semakin kuatlah "*punishment*" dari budaya terhadap perbuatan perempuan akibat bekerja sehingga lupa akan "kodrati sebagai ibu dari anak-anak".
3. Karena perempuan disimbolkan sebagai penjaga dan perawat rumah, maka kalau rumah itu kotor, bau, tidak terawat dan tidak ada makanan, maka yang pertama kali disalahkan adalah perempuan, karena perempuan dinilai tidak dapat mengelola rumah, padahal pengelolaan rumah tidak terlepas dari biaya perawatan yang juga merupakan tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin keluarga.

Pandangan Budaya Sunda Terhadap Pendidikan Anak

Apa Yang Menyebabkan Ketidakadilan Gender?

1. **Faktor Sosial Budaya dan Norma Masyarakat**
   a. Prinsip hidup bahwa laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga lebih penting dan berpotensi dari pada perempuan.

b. Perempuan sebagai ibu rumah tangga saja, langkah perempuan lebih terbatas, maka dari itu pendidikannya kurang diperhatikan.
c. Adanya diskriminasi pada perempuan dalam pendidikan.
d. Adanya perkawinan dini pada perempuan.
e. Adanya budaya patriarkhi yang dilaksanakan secara otoriter dan sepihak.
f. Adanya kegagalan pihak keluarga dalam melindungi dan mendidik anak-anaknya.

Kegagalan dan kelemahan keluarga dalam melaksanakan fungsi perlindungan keluarga dan fungsi afeksi berdampak terhadap penerapan fungsi edukasi dan sosialisasi. Sebab, dalam suasana keluarga yang kurang bahkan tidak harmonis dan sudah tercerai-berai, sangat sulit bagi seorang ibu atau seorang ayah untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anaknya serta membantu mempersiapkan mereka agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Sementara itu perkembangan anak tidak bisa ditunda. Pada usia pubertas, saat sedang mencari jati diri, mereka masih membutuhkan orang-orang yang dapat memberikan rasa aman bagi dirinya dalam mengurangi kehidupan.

2. **Faktor Ekonomi yang berhubungan dengan Tingkat Kemiskinan Masyarakat**

a. Faktor kemiskinan mengakibatkan ketersediaan biaya pendidikan terbatas sehingga menyebabkan keluarga lebih memprioritaskan pendidikan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan.
b. Dampak dari kemiskinan menyebabkan kasus-kasus keluarga yang meminta anak-anaknya bekerja baik sebagai anak jalanan, bekerja sebagai kuli dan bahkan sebagai pekerja seks komersial (PSK) pada sebagian anak perempuan di sebagian daerah di Jawa Barat.

Pelaksanaan fungsi ekonomi yang dipengaruhi oleh sistem nilai budaya di lingkungannya, juga dapat memberikan kontribusi terhadap lahirnya anak yang dilacurkan. Ini terjadi terutama pada masyarakat yang masih kental memegang tradisi yang sarat dengan bias gender, seperti tampak pada sebagian masyarakat Indramayu. Saat ini masih berkembang ungkapan pada sebagian mesyarakat Indramayu bahwa *anak laki-laki merupakan kebanggaan keluarga, sedangkan anak perempuan merupakan sumber* *rezeki.* Ungkapan ini menjadi bukti bahwa sebagian masyarakat Indramayu masih membedakan nilai anak laki-laki dengan anak perempuan. Penelitian Singarimbun dkk (1977) menyebutkan nilai instrumental anak memperoleh perhatian yang cukup kuat baik dalam masyarakat Jawa maupun Sunda, terutama dalam memberikan jaminan di hari tua. Di antara kedua komunitas tersebut tidak terdapat perbedaan yang mencolok terhadap preferensi jenis kelamin anak. Anak laki-laki lebih dihargai daripada anak perempuan karena masalah kepedulian orangtua mengenai hal-hal yang berhubungan dengan nama baik keluarga. Anak perempuan sangat dihargai karena kemampuan mereka membantu dirumah. Selanjutnya Singarimbun menyatakan, jika keadaan ekonomi keluarga menjadi menjadi sangat memprihatinkan, maka orangtua akan memandang anak-anak mereka sebagai beban, khususnya untuk perawatan kesehatan dan sekolah. Dalam keadaan seperti ini, maka anak perempuan, apalagi dari kecil sudah kelihatan cantik, akan memberikan harapan besar bahwa kemiskinan keluarga akan segera berakhir jika mereka sudah besar. Kecantikan anak perempuan dijadikan modal untuk mencari rezeki.

Lingkungan sosial-budaya dan sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi pemasok anak yang dilacurkan, yaitu daerah miskin dengan angka putus sekolah tinggi, kualitas sumberdaya manusia rendah serta tradisi kawin muda dan kawin cerai masih dianut masyarakat. Lingkungan tersebut terdapat banyak warung *wedang* atau warung remang-remang yang diantaranya dilayani oleh anak-anak perempuan putus sekolah. Forum warung *wedang* memberi peluang terhadap transaksi seksual mengingat jam kerja para pelayan dimulai dari pukul 21.000 WIB hingga 02.00 WIB dinihari dan para tamu yang umumnya laki-laki memperoleh kesempatan untuk melakukan tindakan yang menjurus ke arah perbuatan seksual.

Ada semacam kepercayaan dikalangan lelaki iseng tentang keperawanan seorang gadis belia yaitu keperawanan bisa membuat orang awet muda dan semakin jantan (Maria Hartiningsih, Kompas, 10 Juli 1997). Para lelaki iseng tidak keberatan membayar berapapun untuk itu. Kepercayaan ini mendorong para mucikari untuk berebut mencari "bibit-bibit" baru dari desa, terdiri dari perempuan yang masih lugu, dan kemudian dimasukkan kedalam jaringan prostitusi yang sebelumnya sama sekali tidak pernah mereka bayangkan.

Para pelacur belia ini merupakan aset berharga bagi para mucikari atau germo karena bisa mendatangkan keuntungan besar bagi wismanya. Mereka biasanya sangat disayangkan agar tidak pindah ketempat lain.

Menurut Suyanto dan Hariadi (2002:62), bagi para mucikari ada beberapa poin kelebihan yang dimiliki oleh pelacur belia, diantaranya: pelacur belia relatif disukai para tamu, punya prospek lebih lama untuk dipekerjakan sebelum usioa 30an tahun, dan bisa mengangkat citra wismanya menjadi semakin terkenal. Maria Hartiningsih (*Kompas,* 10 July 1997) mengemukakan, disamping itu, banyak konsumen juga merasa lebih aman bermain seks dengan anak-anak kecil karena anak-anak dianggap masih bersih dan tidak mempunyai kemungkinan menularkan virus HIV kepada pelanggan.

Kepercayaan lainnya menyangkut pandangan tentang seksualitas yang cenderung menekankan arti penting keperawanan sehingga tidak memberi kesempatan bagi perempuan yang sudah tidak perawqn, kecuali masuk kedalam peran yang diciptakan untuk mereka (Saptari, 1997:392).

Keadaan ini mendorong semakin berkembangnya penggunaan jasa anak dalam dunia prostitusi. Menurut catatan redaksi *Surabaya Post* (5 April 2000), saat ini jumlah anak perempuan yang dilacurkan telah mencapi 40-70 ribu. Keberadaan mereka bukan hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan atau Surabaya saja, melainkan sudah menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Catatan resmi tentang keberdaan mereka jarang ditemukan karena banyaknya di antaranya yang menggunakan umur palsu agar bisa memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Bagi mereka KTP merupakan barang yang sngat berharga karena dapat menyelamatkan diri mereka ketika diadakan razia terhadap para pekerja seks komersial.

3. **Faktor Kebijakan yang Belum Responsif Gender**
   a. Kebanyakan kebijakan-kebijakan yang ada masih netral gender, misalnya kebijakan di sektor ekonomi, ketenagakerjaan, dan perumahan.

b. Kebijakan yang masih netral gender atau bahkan bias gender ini tidak memberikan pemihakan yang baik pada kepentingan perempuan.

Kebijakan bidang Pendidikan yang sejak tahun 1990an sudah netral gender (artinya tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan), namun kesempatan kesetaraan akses ini hanya dapat dinikmati oleh golongan menengah keatas. Sementara golongan bawah, terutama di pedesaan dan kelompok marginal, masih terbatas gerak aktivitasnya karena adanya kendala budaya.

Sebabnya, lembaga pendidikan yang diharapkan sebagai media perubahan bagi kaum perempuan masih dirasakan mahal. Kebijakan pemerintah, apalagi pada era otonomi daerah saat ini, menuntut partisipasi masyarakat terutama orangtua, dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan.

Dampak Budaya Pantura terhadap Pendidikan Anak

Berkaitan dengan kesenjangan gender dalam hal akses di bidang pendidikan, sepertinya ada konsistensi kenyataan yang ada di lapangan, yaitu adanya keadaan dimana perempuan selalu menjadi prioritas kedua setelah laki-laki dan perempuan selalu tertinggal di bidang pendidikan dibandingkan dengan laki-laki. Bukti yang mendukung konsistensi ini adalah adanya data-data Komposisi penduduk yang bersekolah, Angka Partisipasi sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Data perolehan Ijazah, dan Data Buta Aksara, yang menunjukkan adanya disparitas gender yang selalu bertanda negatif, artinya bahwa perempuan selalu tertinggal dibandingkan dengan laki-laki dalam berpartisipasi ke sekolah.

Rendahnya **PARTISIPASI** perempuan pada berbagai jenjang pendidikan ini disebabkan oleh norma-norma masyarakat yang masih menganggap peran utama laki-laki adalah sebagai pencari nafkah utama (*main-breadwinner*) sehingga lebih penting dan diutamakan untuk memperoleh pendidikan daripada perempuan yang peran utamanya sebagai ibu rumahtangga (*housewife*). Peran laki-laki yang diberikan oleh masyarakat di sektor publik ini dianggap sangat bermartabat dan perlu dilakukan investasi sejak usia kecil. Posisi laki-laki dalam keluarga, sesuai dengan sistem patriarkhi ditempatkan sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab menopang ekonomi keluarga secara keseluruhan dan soliter. Dengan demikian laki-laki yang nantinya berkewajiban mencari nafkah, maka laki-laki harus lebih pandai dan lebih berpendidikan dibandingkan perempuan. Dengan adanya keterbatasan ekonomi keluarga, maka, kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga mempunyai konsekuensi lebih diutamakan untuk disekolahkan dibandingkan dengan perempuan. Keluarga pasti lebih memprioritaskan laki-laki dan mengesampingkan perempuan untuk sekolah. Apalagi dengan keadaan tempat tinggal yang jauh darti sarana pendidikan, maka secara otomatis perempuan semakin terpinggirkan. Oleh karena itu data menjelaskan adanya kekonsistenan kesenjangan gender dalam partisipasi sekolah pada ketertinggalan perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Perbedaan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi sangat erat hubungannya dengan pengambilan keputusan dalam keluarga. Perempuan dinilai kurang mempunyai **KONTROL** atas sumberdaya keluarganya sehingga kurang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat Jawa Barat pada umumnya adalah bahwa wewenang kepala keluarga (seorang ayah atau laki-laki) adalah sebagai pengambil keputusan (*decision maker*), sedangkan wewenang perempuan yang berperan sebagai ibu rumahtangga adalah sebagai penerima keputusan (*decision taker*). Nilai, sikap, pandangan, dan perilaku seorang ayah sebagai kepala keluarga sangat menentukan dalam pengambilan keputusan keluarga, khususnya kepada keputusan untuk menentukan apakah anak sekolah atau tidak, dan memilih jurusan atau keahlian. Sedangkan peran perempuan sebagai pemegang peran domestik, selalu diarahkan pada fungsi domestik, yaitu bertanggung jawab terhadap perawatan rumah dan pengasuhan anak di dalam rumah.

Faktor lain yang mempengaruhi akses antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan faktor kemiskinan yang mengakibatkan ketersediaan biaya pendidikan yang terbatas pada sebagian keluarga di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Barat pada khususnya. Hal ini juga dibuktikan oleh hasil survei pada tenaga pendidik dan aparat di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, bahwa kondisi ekonomi keluarga menyebabkan keluarga lebih memprioritaskan pendidikan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan karena dilatarbelakangi oleh norma masyarakat (dijawab oleh 25,81% peserta). Disamping itu, dampak dari kemiskinan menyebabkan keluarga tidak menyekolahkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk disuruh menjari pekerjaan sebagai anak jalanan atau sebagai pekerja seks komersial. Dilaporkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tentang adanya beberapa kasus siswa perempuan yang *drop out* dikarenakan kesulitan ekonomi dan kemusian diminta oleh orangtuanya untuk mencari nafkah menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor sosial budaya dan norma masyarakat berpengaruh pada kesenjangan gender di Bidang Pendidikan:

1. Prinsip hidup bahwa laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga lebih penting dan berpotensi dari pada perempuan.
2. Perempuan sebagai ibu rumah tangga saja, langkah perempuan lebih terbatas, maka dari itu pendidikannya kurang diperhatikan.
3. Adanya diskriminasi pada perempuan dalam pendidikan.
4. Adanya perkawinan dini pada perempuan.
5. Adanya anggapan lama bahwa laki-laki dilarang sekolah ke kejuruan putri dan perempuan dilarang ke sekolah teknik karena sekolah teknik adalah untuk laki-laki.
6. Perempuan belum bisa menunjukkan kompetensinya/ belum bisa bersaing; Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah pada pendidikan perempuan.

REKOMENDASI PENANGGULANGAN KESENJANGAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Bab ini merupakan suatu ajakan untuk meningkatkan prestasi pendidikan perempuan Indonesia dalam menyongsong era globalisasi. Ada beberapa *checklist* yang harus diperhatikan baik oleh pihak keluarga dan masyarakat, maupun oleh pihak pemerintah.

Pendekatan Sosial Budaya Di Tingkat Keluarga dan Masyarakat

1. Anak laki-laki dan perempuan adalah berbeda, namun jangan dibeda-bedakan (sesuai dengan Motto dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan-Republik Indonesia).
2. Nilai ekonomi anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan,
3. Mendidik anak baik laki-laki maupun perempuan harus berdasarkan asas keadilan gender dalam rangka memperoleh akses, manfaat, partisipasi, kontrol terhadap semua sumberdaya keluarga untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat jasmani dan rohani
4. Setiap anggota keluarga terbuka untuk berkomunikasi, dapat mendengarkan keluhan anggota keluarga, memecahkan masalah keluarga secara bersama, komunikasi terbuka dan jelas, saling berbagi dan empati, saling percaya dan menghargai.
5. Meluangkan waktu bersama; memiliki waktu luang bersama dan melakukan aktivitas bersama dengan seluruh anggota keluarga, dan mempunyai ikatan kuat antar anggota keluarga.
6. Pembagian peran yang jelas dan adil antar angggota keluarga; siapa yang bertanggung jawab melaksanakan peran instrumental (penyediaan sumberdaya dan kebutuhan anggota keluarga) dan peran afektif (pengasuhan, dukungan), serta komitmen/tanggung jawab yang baik terhadap peran tersebut.
7. Menjunjung tinggi prinsip harmonis dalam keluarga; menghindari konflik atau pertengkaran suami-istri terutama didepan anak-anak; saling menahan diri untuk tidak membentak/memaki saat terjadi konflik.

8. Anak perempuan boleh memilih bidang eksakta sejak sekolah menengah sampai ke Perguruan Tinggi (contohnya SMK-TI, SMK-Informatika, Fakultas Tehnik, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran, dll),
9. Anak perempuan boleh sekolah jauh dari rumahnya tanpa mengkuatirkan "keselamatannya sebagai perempuan",
10. Harus ada perubahan pandangan bahwa "Anak perempuan yang sekolah tinggi masih tetap 'laku' untuk mendapatkan suami",
11. Anak perempuan yang telah lulus kuliah dan masih punya potensi besar disarankan untuk melanjutkan kuliah ke pasca sarjana walaupun telah berkeluarga,
12. Anak perempuan yang telah lulus kuliah dan sudah berkeluarga disarankan untuk tetap berkarya (menjadi *home-based worker*), dan tidak melupakan hasil jerih payah kuliahnya,

13. Pengasuhan anak perempuan berperspektif gender:
    a. Ayah & Ibu harus memperhatikan personalitas anak yang masing-masing unik (introvert /feminin vs extrovert/maskulin)
    b. Cari pendekatan yg tepat pada anak perempuan, awas *mood*nya
    c. Pendekatan ayah dan ibu harus bijaksana dan hangat serta penuh pengertian
    d. Beri sosialisasi tentang sifat laki-laki dan cara respek dan menghargai laki-laki.
    e. Ayah mensosialisasikan apa yang diharapkan laki-laki terhadap perempuan.
    f. Ibu mensosialisasi bagaimana seorang perempuan memberi arahan dan nasehat pada laki-laki.
    g. Orangtua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.
    h. Tumbuhkan motivasi belajar, memilih program studi yang cocok dengan kompetensi dan minatnya.
    i. Tidak ada salahnya memberi kesempatan anak perempuan yang cakap untuk sekolah di luar kota dan ke perguruan tinggi dengan program studi tehnik dan ilmu eksakta.
    j. Beri cara kemandirian yang cocok untuk perempuan.

k. Anak perempuan harus bisa memahami listrik, kompor gas, kendaraan, dan *sense of dangerous* untuk keperluan "survival.

14. Pengasuhan anak laki-laki berperspektif gender:

b. Ayah & Ibu harus memperhatikan personalitas anak yang masing-masing unik (introvert /feminin vs extrovert/maskulin)

c. Cari pendekatan yg tepat pada anak laki-laki, awas *selebor*nya.

d. Pendekatan ayah dan ibu harus bijaksana dan hangat serta penuh pengertian.

e. Beri sosialisasi tentang sifat perempuan dan cara respek dan menghargai perempuan.

f. Ibu mensosialisasikan apa yang diharapkan perempuan terhadap laki-laki.

g. Ayah mensosialisasi bagaimana seorang laki-laki memberi perlindungan dan nasehat pada perempuan.

h. Orangtua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.

i. Tumbuhkan motivasi belajar, memilih program studi yang cocok dengan kompetensi dan minatnya.

j. Tidak ada salahnya memberi kesempatan anak laki-laki untuk sekolah dengan program studi ilmu sosial, keluarga, dan kerumahtanggaan.

k. Beri cara kemandirian yang cocok untuk laki-laki.

l. Anak laki-laki harus bisa memasak, mencuci, menyeterika, dan membersihkan tempat tidur sendiri untuk keperluan "survival".

Pendekatan Kebijakan Kesetaraan Gender di Bidang Pendidikan

Pendekatan kebijakan kesetaraan gender di bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan tercantum pada strategi kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2004, Gambar 3) sebagai berikut:

1. Kegiatan *Capacity Building*

a. Tujuan kegiatan *Capacity Building* adalah:

- Menata ulang kelembagaan, aturan dan mekanisme serta kebijakan agar kondusif terhadap pembangunan pendidikan responsif gender.

- Mendorong dikeluarkannya kebijakan dan program pembangunan pendidikan berwawasan gender di masing-masing propinsi dan kabupaten/ kota.
- Meningkatkan komitmen dan kualitas sumberdaya manusia sehingga memiliki:
  - Pemahaman dan sensitivitas gender di lingkungan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan pendidikan yang responsif gender.
  - Pemahaman dan sensitifitas gender para *stakeholders* pendidikan.
  - Pemahaman, sensitivitas gender dan kemampuan para perencana program untuk melaksanakan analisis situasi dan memahami isu-isu gender di bidang pendidikan sebagai dasar penyusunan perencanaan pendidikan responsif gender.
  - Komitmen pemerintah daerah yang terwujud dalam bentuk *Position Paper* dan Rencana Aksi Daerah untuk melaksanakan pembangunan pendidikan yang responsif gender.

b. Tahapan kegiatan *capacity building* mencakup:

- Pengembangan koordinasi antar dinas terkait di daerah dengan tim pusat untuk mendorong tersusunnya kebijakan dan program pembangunan pendidikan berwawasan gender.
- Advokasi, audiensi dan diskusi (*round table discussion*) agar tersedia aturan, kelembagaan dan mekanisme yang mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan.
- Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan di propinsi dan kabupaten kota yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pakar gender dan wakil-wakil lembaga pemerintah daerah (Dinas pendidikan, BPS, Bapeda, Lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan, Perguruan Tinggi (Pusat Studi Wanita/ Pusat Studi Gender) dan LSM.
- Pengembangan *tool kits* (bahan ajar) *capacity building* dengan memperhitungkan hasil analisis gender tentang situasi pendidikan provinsi dan atau kabupaten/kota.

- Penentuan kriteria dan identifikasi sasaran *Capacity Building*, baik lembaga, aturan, kebijakan maupun SDM.
- Penjadwalan kegiatan sesuai dengan tata urutan prioritas kegiatan, mulai dari pengembangan koordinasi antar dinas terkait, advokasi, audiensi, dan diskusi (*round table discussion*) antara tim pusat dengan daerah, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan, Pelatihan Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan untuk *Stakeholders*, Pelatihan Penyusunan Kebijakan Pendidikan Responsif Gender antara lain dengan menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Policy Outlook Plan of Action* (POP), Diskusi (*Round Table Discussion*) Pengarusutamaan Gender Bidang pendidikan.
- Pelaksanaan kegiatan.
- Evaluasi kegiatan.

2. Meningkatkan strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang responsive gender melalui analisis gender terhadap bahan ajar yang diberikan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, kemudian memberikan masukan kepada para penulis dan penerbit untuk menyusun bahan ajar dan materi pembelajaran yang tidak bias gender.
3. Meningkatkan kemitraan antara Departemen Pendidikan Nasional dengan berbagai pihak (*stakeholders*), diantaranya pihak perguruan tinggi, LSM dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerjasama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan. Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan adalah Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG), Program Pendidikan Perempuan Marjinal, dan Program Kolase Perempuan.

KERANGKA KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN

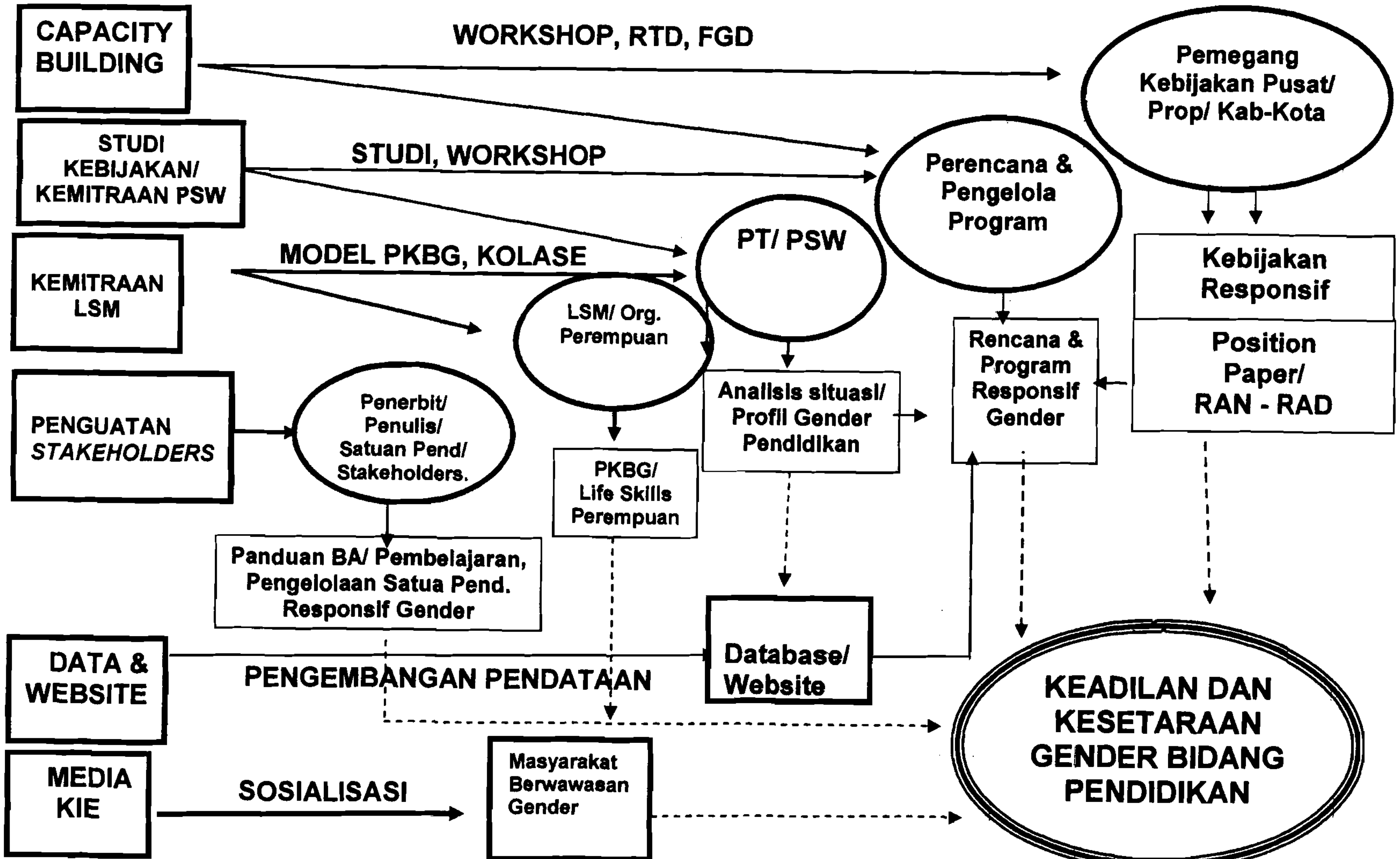

Gambar 21 . Strategi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pend...

<u>**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Berwawasan Gender**</u>

a. Meningkatkan jejaring kerja pengarusutamaan gender antar sektor di tingkat kabupaten dan provinsi.
b. Penyelenggaraan forum komunikasi yang memberi kesempatan bagi pelaku pendidikan untuk berbagi pengalaman dan praktik-praktik terbaiknya dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
c. Menjalin kerjasama dengan LSM, PSW dan organisasi perempuan/peduli pendidikan untuk memberikan fassilitas kepada keluarga/orang tua yang kurang mampu untuk memberikan hak setiap anak dalam memperoleh pendidikan.
d. Mengintensifkan penggunaan sistem informasi dan pendataan pendidikan terpilah jenis kelamin dan melakukan analisis terhadap data tersebut terutama untuk mengetahui kinerja dan perencanaan pendidikan yang berwawasan gender di tingkat provinsi, kabupaten/kota guna prumusan kebijakan dan program pendidikan yang berwawasan gender.
e. Pengembangan instrumen perencanaan pendidikan setara dan adil gender.
f. Pengembangan pesan-pesan standar tentang pendidikan setara dan adil gender.
g. Mengembanganakan pusat-pusat studi wanita baru atau memperluas cakupan pusat-pusat studi yang telah ada di tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan berwawasan gender di bidang pendidikan.
h. Meningkatkan peran pusat-pusat studi yang telah ada untuk melakukan berbagai studi masalah gender di bidang pendidikan.
i. Mengembangkan program studi gender dalam pembangunan pada jenjang sarjana, magister dan dokter pada perguruan tinggi yang memilki pusat studi wanita sebagai penyedia sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan gender dalam pembangunan yang kelak dapat menjadi peneliti, pengambil kebijakan, perencana dan pelaksana program pembangunan yang berwawasan gender.

j. Melakukan analisis kebijakan yang masih bias gender baik peraturan perundangan, kurikulum maupun bahan ajar.
k. Melakukan berbagai studi mengenai parktik-praktik yang menyebabkan terjadinya pendidikan yang tidak responsif gender dan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang diusulkan.
l. Menyempurnakan peraturan perundangan, kurikulum dan bahan ajar yang masih bias gender.
m. Monitoring terhadap pelaksanaan program pengarusutamaan gender di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
n. Evaluasi terhadap praktik-praktik yang dilaksnakan dan memberikan umpan balik untuk perbaikannya.

Peningkatan Penyebarluasan Pendidikan Berwawasan Gender

a. Mengembangkan strategi pendidikan kepada masyarakat tentang berbagai bidang teknologi, lingkungan dan informasi yang mungkin dapat diikuti kaum perempuan.
b. Melaksanakan program advokasi dan KIE tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga sedini mungkin.
c. Mensosialisasikan gender manstreaming kepada para pelaku dan pengambil kebijakan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
d. Membangunan komitmen para pengambil kebijakan di bidang pendidikan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mengoptimalkan pelaksanaan program-program yang responsif gender.
e. Mewujudkan adanya website dan jaringan internet bidang pendidikan di setiap dinas dan sub dinas pendidikan dengan data yang akurat dan terkini.
f. Meningkaatkan peran media untuk pendidikan sebagai alat bagi para pendidik, pemerintah, maupun LSM untuk memajukan perempuan dan pembangunan untuk dapat meningkatkan motivasi belajar.

Peningkatan Kekuatan Perempuan di Bidang Pendidikan

a. Seberapa luas perempuan memegang posisi pembuat keputusan dalam struktur pendidikan?

b. Norma dan praktek budaya seperti apa yang bertentangan dengan persamaan kesempatan bagi kaum perempuan dalam pendidikan?
c. Apa penyebab terjadinya perbedaan gender dalam penerimaan untuk bersekolah?
d. Apakah perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh kebijakan dan aktivitaspendaftaran atau karena kurangnya fasilitas sekolah (atau kurangnya asrama) untuk anak-anak perempuan?
e. Apakah biaya pendaftaran sekolah menjadi hambatan bagi kaum perempuan? Pada tingkat pendidikan yang mana?
f. Apakan kendala-kendala tersebut berkaitan dengan kemanan anak-anak perempuan pada saat menempuh perjalanan jauh dari rumah menuju sekolah?
g. Bagaimana sebaiknya proyek menghadapi norma budaya yang memisahkan antara kaum perempuan dengan laki-laki?
h. Apakah diperlukan infrastruktur yang terpisah untuk anak perempuan/ perempuan dewasa dengan anak laki-laki/laki-laki dewasa dengan nilai dan kualitas yang sama?
i. Apakah sekolah-sekolah yang bisa diakses oleh anak-anak perempuan memiliki guru-guru perempuan?
j. Apa saja implikasi finansial dan politik dari pertimbanganpertimbangan ini?
k. Dalam rumah tangga, siapakah yang memutuskan pengeluaran untuk biaya pendidikan?
l. Bagaimanakah pandangan mereka mengenai pengembalian investasi menyekolahkan anak perempuan dan anak laki-laki?
m. Apakah mendidik anak perempuan dianggap sebagai investasi yang baik untuk keluarga?
n. Apakah terdapat anggapan bahwa anak laki-laki kelak akan menanggung kehidupan orang tuanya, sehingga pendidikan untuk anak laki-laki
o. dianggap lebih penting daripada pendidikan untuk anak perempuan?
p. Apakah pendidikan bagi anak perempuan dianggap menguntungkan atau justru merintangi untuk menikah?

q. Bagaimana dampak pendidikan terhadap adat-istiadat seperti mas kawin atau mahar?
r. Apakah proyek memiliki mekanisme untuk mengukur dampaknya terhadap perempuan?
s. Apakah terdapat anggapan bahwa pendidikan menyebabkan anak perempuan menjadi tidak patuh terhadap rencana yang ditetapkan orang tua bagi masa depan mereka?
t. Apakah tenaga anak perempuan dianggap lebih diperlukan dalam rumah tangga dibanding tenaga anak laki-laki?
u. Apakah segregasi jenis kelamin dalam program pelatihan, sekolah, atau kolese
v. yang disebabkan oleh keyakinan-keyakinan sosial (seperti keyakinan bahwa anak perempuan/ kaum perempuan harus diajar oleh guru perempuan)?
w. Apakah pelajarpelajar perempuan diajari mata pelajaran yang sama dengan mata
x. pelajaran yang diberikan kepada pelajar laki-laki, atau apakah kurikulum
y. untuk pelajar perempuan berbeda dengan kurikulum untuk pelajar laki-laki?
z. Apakah terdapat keyakinan bahwa anak-anak perempuan harus mempelajari mata pelajaran tertentu?
å. Apakah mata pelajaran tersebut bisa diakses kaum perempuan (populasi klien)?
ä. Apakah buku-buku teks atau media pendidikan lainnya mempromosikan stereotype gender (misalnya gambar yang memperlihatkan perempuan sedang menggendong bayi dan laki-laki sedang membawa alat-alat pertanian)?
ö. Apakah proyek mencakup pelatihan untuk para guru perempuan?
aa. Apakah melalui konseling karier kaum perempuan didorong untuk berpartisipasi dalam seluruh bentuk pelatihan?
bb. Apakah kaum perempuan terlibat dalam manajemen sekolah, dalam perkumpulan guru dan orang tua murid?

cc. Berapa besar angka perempuan yang memegang posisi sebagai pengambil keputusan dalam kementrian pendidikan?

dd. Berapa besar komitmen badan pelaksana untuk melibatkan perempuan pada berbagai tingkatan dalam proyek pendidikan?

ee. Apakah proyek mensyaratkan adanya dana atau ketentuan khusus untuk memantau dan menganalisis dampak dan manfaat proyek terhadap gender, untuk memastikan bahwa kaum perempuan mendapatkan manfaat dari proyekproyek pendidikan tersebut?

ff. Apakah aspek-aspek gender terintegrasi secara memadai dalam proyek untuk memenuhi sasaran-sasaran strategis negara dari ADB dalam hal GAD atau tujuan DMC dalam hal GAD?

gg. Apakah sistem pemantauan dan evaluasi secara eksplisit mengukur dampak proyek terhadap kaum perempuan?

hh. Apakah sasaran proyek secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan perempuan?

Strategi Utama Di Bidang Pendidikan

1. Pilih lokasi yang sesuai bagi anak-anak perempuan maupun laki-laki.
2. Apakah sekolah memiliki fasilitas yang memadai (misalnya akomodasi asrama pelajar putri/perempuan yang aman, fasilitas belajar untuk mereka, kamar mandi yang terpisah dan pribadi) agar memungkinkan bagi anak perempuan untuk bersekolah?
3. Apabila jumlah perempuan yang mendaftar bersekolah masih sedikit, pertimbangkanlah untuk memasukan insentif dalam desain proyek (misalnya, bantuan uang, buku-buku, dan seragam sekolah) untuk meningkatkan jumlah perempuan yang mendaftar bersekolah.
4. Dalam proyek, pertimbangkan cara menghadapi norma budaya yang membuat perempuan tetap tertinggal, dengan memastikan tersedianya guru-guru perempuan, meningkatkan kepekaan masyarakat setempat mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan, atau cara-cara lainnya.
5. Secara khusus alokasikan dana untuk mengembangkan strategi peningkatan partisipasi anak –anak perempuan dan perempuan miskin.
6. Dalam proyek, masukan tindakantindakan spesifik untuk menghadapi kendala partisipasi perempuan yang teridentifikasi.

7. Pastikan bahwa proyek mancakup aspek-aspek kualitatif pengajaran dan lingkungan sekolah.
8. Pastikan bahwa kurikulum sesuai untuk masyarakat setempat, yaitu yang bisa memenuhi kebutuhan sosial dan sektor-sektor produktif dalam wilayah tersebut.
9. Pertimbangkan untuk meninjau dan mengubah gambar gambar yang memperkuat stereotype gender dalam kurikulum, buku-buku teks, dan media pendidikan lainnya.
10. Sebagai contoh, buku-buku teks dapat direvisi sedemikian rupa sehingga gambar dan ceritera di dalamnya menggambarkan perempuan maupun laki-laki sains, matematika, dan pertanian, serta kesehatan dan pendidikan.
11. Buat mekanisme khusus untuk memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sekolah, dan sebagainya.
12. Pertimbangkan untuk melibatkan Ornop dalam implementasi proyek.
13. Apabila perlu, alokasikan dana untuk pemantauan dan analisis dampak perbedaan gender, untuk memastikan bahwa anak-anak perempuan/perempuan dewasa mendapat manfaat dari proyek.

Pertanyaan Penting dalam Pendidikan Tinggi

1. Bagaimana distribusi mahasiswi pada berbagai bidang ilmu pada pendidikan tinggi?
2. Kendala apa yang dihadapi perempuan ketika memasuki pendidikan tinggi?
3. Apakah tersedia fasilitas yang layak (misalnya akomodasi asrama yang aman bagi perempuan, fasilitas belajar untuk perempuan apabila norma budaya memisahkan tempat belajar anak laki-laki dengan perempuan) dalam lembaga-lembaga pendidikan tinggi sehingga memungkinkan bagi kaum perempuan untuk bersekolah?
4. Apakah pada tingkat pendidikan tinggi ini tersedia pengajar-pengajar perempuan?

Strategi Utama Dalam Pendidikan Tinggi

1. Tetapkan sistem kuota bagi mahasiswi pada pendidikan tinggi.
2. Tetapkan sistem kuota bagi bagi kaum perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, dengan menawarkan dana dan insentif lainnya.

3. Tetapkan rencana tindakan dan program- program lain untuk mendorong mahasiswi untuk mengikuti kursus (mata kuliah) matematika dan sains.
4. Kembangkan peluang untuk menjadi staf dan pastikan bahwa proporsi tertentu disediakan untuk kandidat perempuan.
5. Sediakan dukungan (fasilitas pelatihan yang memadai, beasiswa dan dana dll) yang diperlukan bahwa terdapat tempat yang disediakan untuk kaum perempuan dalam rogram pengembangan staf.
6. Berikan pelatihan mengenai dasardasar menjadi pembimbing (counselor) dalam konseling peka-gender.

<u>Hal-Hal yang Layak Dipikirkan oleh Kita Semua</u>

1. **Perguruan Tinggi secara khusus memberikan pelatihan mengenai dasar-dasar wawasan peka gender kepada berbagai pihak, dimulai dari internal universitas (pihak rektorat, staf pengajar, dan para mahasiswa) melalui berbagai kegiatan baik pelatihan, ceramah, talk show atau bahkan mengintegrasikan isu gender ke dalam beberapa mata kuliah umum di tingkat persiapan bersama.**
2. Mengembangkan strategi peningkatan prestasi perempuan melalui pemberian beasiswa khusus bagi perempuan berprestasi atau pemberian dana penelitian khusus bagi siapapun yang tertarik untuk meneliti topik-topik yang berkaitan dengan perempuan.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas perempuan di era globalisasi, maka penting untuk dipikirkan pendidikan di dalam keluarga berwawasan gender agar generasi mendatang lebih sadar dan responsif gender dibandingkan dengan generasi sekarang. Pendidikan Keluarga yang Berwawasan gender ini dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata/ Kuliah Kerja Profesi mahasiswa dengan sistim pendampingan masyarakat dan melibatkan semua unsur kelembagaan di masyarakat diantaranya PKK dan Posyandu, Perkumpulan sosial-budaya, dll.

4. Dibutuhkan strategi untuk meningkatkan prestasi perempuan di bidang pendidikan pada khususnya dan di bidang-bidang lainnya dengan pendekatan berbagai cara, misalnya: .
   a. ***Women help Women.***
   Artinya bahwa:

- Kelembagaan dan organisasi perempuan harus meningkatkan kinerjanya untuk membantu sesama perempuan marjinal lainnya untuk meningkatkan SDMnya agar dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam berbagai bidang pembangunan.
- Pada tahapan individual, perempuan harus diberikan kesadaran tentang adanya perasaan emphati, solidaritas, dan pentingnya perjuangan perempuan secara bersama-sama dalam memajukan seluruh perempuan Indonesia dalam berbagai bidang menuju kesejajaran dan kemitraan dengan laki-laki.

b. ***Men help Women.***

Artinya bahwa:

- Laki-laki dengan kesadarannya mempunyai kemampuan untuk beremphati, bekerjasama, dan toleran terhadap kaum perempuan. Dengan adanya kemitraan di segala bidang pembangunan yang dilandasi atas rasa membutuhkan dan saling melengkapi (baik secara profesional maupun psikologis) menjadikan kaum laki-laki untuk lebih dapat membuka diri dan bersedia untuk membagi wilayah "*Public Spheren*ya" kepada kaum perempuan.
- Laki-laki bersedia untuk menolong kaum perempuan dalam meningkatkan kualitas SDMnya.

c. ***Families help Women.***

Artinya bahwa:

- Seluruh keluarga Indonesia meningkatkan peran dan fungsinya untuk mendidik dan melindungi anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, dengan memperhatikan kebutuhan khusus sesuai dengan faktor biologisnya, namun memberikan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan formalnya.

d. ***Goverment and Community Institusion help Women.***

Artinya bahwa:

- Semua rencana strategi pemerintah dilandasi oleh adanya wawasan gender, sehingga kebijakan yang dilaksanakan sudah responsif gender.

e. *Persyaratan* **Psiko-Sosial dan Mental yang Diperlukan oleh Seorang Pejabat Daerah Agar dapat "Responsif Gender"** dalam rangka meningkatkan kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan (mengingat UU otonomi daerah yang sudah berjalan di seluruh Indonesia):

- Selalu melihat semua masalah, perencanaan, analisis, dan tujuan suatu kebijakan dari dimensi lensa gender (*gender lense*), yaitu:
  - Pejabat secara otomatis harus melihat setiap aspek kebijakan yang berada dalam wilayah kerjanya (tupoksi) apakah ada kesenjangan (*disparitas*) gender.
  - Apabila ada kesenjangan gender, maka pejabat harus memutuskan bahwa setiap bentuk kesenjangan harus diakhiri. Disparitas tidak akan diterima lagi secara pasif.

- Selalu merubah *mind set* yang masih buta gender menjadi responsif gender:
  - *Mind-set* pejabat yang masih buta gender adalah kondisi / keadaan seseorang yang tidak memahami tentang pengertian atau konsep gender (bahwa ada perbedaan dan persamaan kepentingan antara laki-laki dan perempuan).
  - *Mind-set* pejabat yang masih bias gender adalah keadaan seseorang yang memihak pada salah satu jenis kelamin (biasanya jenis kelamin yang sama dengan dirinya) dan berlaku tidak adil terhadap kepentingan jenis kelamin lainnya.
  - *Mind-set* pejabat yang mulai netral gender adalah keadaan seseorang yang sudah tidak memihak pada salah satu jenis kelamin apapun, dan berusaha adil dalam memandang kepentingan individu.
  - *Mind-set* pejabat yang sudah sensitif gender adalah kondisi kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek

kehidupan lainnya dari perspektif gender (disesuaikan dengan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan).

- *Mind-set* pejabat yang sudah responsif gender adalah keadaan seseorang yang sudah memperhitungkan kepentingan laki-laki dan perempuan dan sudah bertindak sesuatu dengan melaksanakan kebijakan di wilayah kerjanya yang responsif gender.

- Mempunyai kepribadian yang bijaksana dan adil tanpa ada bias terhadap apapun, termasuk bias terhadap jenis kelamin.
    - Menghilangkan sifat bias gender, dan berburuk sangka (*prejudice*) terhadap seseorang, baik karena perbedaan jenis kelamin, maupun karena perbedaan sosial-ekonomi dan budayanya.
    - Merasa berdosa apabila tidak dapat berlaku adil pada salah satu jenis kelamin.
    - Merasa berdosa apabila menjadi pejabat daerah namun tidak berbuat apa-apa yang berkaitan dengan perjuangan kesetaraan dan keadilan gender.
    - Merasa berdosa apabila menjadi pejabat daerah namun tidak melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pegawai perempuan dalam rangka memotivasi dan memberikan kesempatan dalam meningkatkan ketrampilan dan karir serta posisi jabatan.
- Memelihara sifat yang responsif gender, yaitu:
    - Menghargai Keragaman Pluralistis, yaitu menerima keragaman etnis budaya, agama dan adat istiadat (pluralistis).
    - Memperjuangan gender melalui pendekatan yang harmonis, dan bukan melalui pendekatan dikotomis.
    - Memperjuangan gender melalui proses mekanisme sosialisasi dan advokasi secara bertahap dan berkesinambungan.

- Memperjuangan gender dengan sekaligus menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi, bukan melalui pertentangan-pertentangan dan penekanan-penekanan sehingga ada kelompok-kelompok yang merasa dirugikan yang tidak diterima oleh lapisan masyarakat.

- Bersedia untuk bekerjasama dengan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan dengan sikap saling toleransi dan saling menghormati dengan tulus:
  - Seorang pejabat daerah harus rela dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab untuk diperintah oleh atasannya seorang perempuan (seorang laki-laki harus rela menjadi bawahan seorang perempuan).
  - Seorang pejabat daerah harus berlaku adil dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab dalam mempertimbangkan untuk mempromosikan bawahan laki-laki dan perempuan.
  - Seorang pejabat harus bersedia menciptakan suasana yang cair dengan komunikasi yang efektif antara laki-laki dan perempuan. Pejabat harus menyadari bahwa semakin sering ada dialog antara laki-laki dan perempuan untuk diundang ke ruang pimpinan, maka dialog akan semakin sering terjadi. Hanya melalui komunikasi, laki-laki dan perempuan mengenal berbagai gagasan, sumbangan dan keterampilan yang dimiliki jenis kelamin lain. Hanya dengan "berbagi ruang yang sama", perempuan dan laki-laki saling menghargai secara setara. Itulah esensi kesetaraan gender.

f. Persyaratan Kompetensi Seorang Pejabat Daerah yang Responsif Gender

- Pejabat harus mempunyai pengetahuan tentang konsep gender, yaitu:
  - Gender bisa menjadi pemikiran semua pihak.

- Mampu memasukkan permasalahan gender dalam program pembangunan.
- Mampu mengintegrasikan permasalahan gender dalam agenda pembangunan.
- Mampu melakukan suatu usaha untuk memasukkan kerangka gender ke dalam disain, pelaksanaan rencana dan program sektoral.
- Mampu memadukan isu gender ke dalam arus utama (*mainstream*), dan sekaligus mengubah arus utama agar lebih tanggap dan kondusif terhadap tujuan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

- Pejabat harus mempunyai kemampuan untuk menganalisis kesenjangan (disparitas) gender:
  - Kerangka berpikir harus secara otomatis berlandaskan analisis kesenjangan gender.
  - Kesenjangan gender harus dianalisis dan dibuktikan secara obyektif dan disajikan dalam bentuk bukti kuantitatif dan kualitatif. Data gender inilah digunakan sebagai bukti untuk membuat para pengambil kebijakan lainnya bersedia untuk berubah.
- Pejabat harus mampu mempunyai komitmen dalam memperjuangan Pengarusutamaan Gender (PUG), dengan ciri-ciri:
  - Mempunyai perangkat/ struktur organisasi yang menampung aspirasi gender, yaitu lembaga (baik badan, dinas, maupun kantor) yang membidangi pemberdayaan perempuan di daerahnya minimal Eselon III (sesuai dengan Surat Edaran Mendagri dan Kementerian Pemberdayaan perempuan).
  - Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) atau *Gender Focal Point* yang sifatnya membantu terselenggaranya kebijakan yang responsif gender, mulai dari tingkatan SKPD (Tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sampai dengan tingkatan regional, dan nasional). Seorang pejabat harus

mengusahakan agar Pokja ini disahkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati atau Walikota.

- Melakukan sosialisasi dan advokasi secara rutin dan berkesinambungan baik dalam internal Pokja maupun dengan pihak lain yang terkait dengan penanggulangan permasalahan gender.

- Mempunyai kemampuan mengintegrasikan konsep gender ke dalam kebijakan di wilayah kerjanya, yaitu:
  - Dalam rangka mewujudkan rasa keadilan gender, maka mekanismenya melalui perubahan perundang-undangan yang mengatur pemerintah lokal dalam merespon isu gender yang merugikan baik perempuan maupun laki-laki.
  - Semua ini dalam rangka menciptakan struktur yang terbuka dan lingkungan resmi bagi laki-laki dan perempuan untuk memainkan peran yang sama dan mempunyai hak yang sama. Namun demikian, mekanisme keadilan tidak dengan sendirinya langsung dapat menuju kesetaraan gender. Mekanisme itu hanya merupakan langkah pertama dalam proses yang diperlukan untuk menengarai hambatan yang sebenarnya.
  - Realitas sosial, budaya, ekonomis dan/atau politis perlu diubah. Jika masalah kesenjangan gender terdapat di dalam suatu organisasi/struktur, maka pejabat yang berwenang harus secara tuntas menganalisis dengan teknik analisis yang peka gender. Analisis yang benar akan mengetahui "siapa" yang perlu dilibatkan sebagai sekutu untuk perubahan. Analisis gender juga akan menemukenali berbagai mekanisme pelibatan untuk membawa serta para stakeholder tersebut itu. Mekanisme pelibatan itu sering mencakup: pementoran, penjalinan jejaring, pemekaan, pengenalan, kerja sama, penerbitan dan pembelaan.

- Keberhasilan dalam melibatkan cukup banyak orang yang tepat dan berpengaruh akan memicu suatu perubahan yang gradual dan kontinyu menuju kesetaraan dan kadilan gender.

Hal-hal tersebut di atas sangat diperlukan untuk mempercepat transformasi "kemitraan gender" di segala bidang pada semua lapisan masyarakat. Memang terasa berat dan kompleks untuk mewujudkan semua ini, namun kalau kita semua sepakat dalam meyakini bahwa "Kemitrasejajaran Laki-laki dan Perempuan" merupakan suatu yang layak diperjuangkan dalam mewujudkan kesejahteraan Bangsa Indonesia, maka kita mulai melangkah pasti dengan meningkatkan "Kualitas Prestasi Perempuan di Bidang Pendidikan" secara berkesinambungan.

Uraian di atas menguraikan secara detil bagaimana proses pembentukan sosial budaya terhadap nilai-nilai yang melandasi kehidupan keluarga yang berkaitan dengan peran dan nilai gender yang akhirnya berkontribusi terhadap kesenjangan gender bidang pendidikan di masyarakat pantai utara Jawa Barat. Selain faktor-faktor sosial budaya yang menjadi kendala perempuan dalam mengakses pendidikan, faktor keterbatasan kemampuan ekonomi juga secara simultan berkontribusi pada kesenjangan gender bidang pendidikan.

PENUTUP

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SisDikNas), maka disebutkan pada Bab II Pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu hal yang paling prioritas (*crucial*) harus dilakukan adalah kesepakatan dan komitmen bersama antar stakeholders (Pemda, sekolah Satgas, pelajar, keluarga, pendidik, kelompok masyarakat) dalam mengatasi akar permasalahan kenakalan pelajar. Tujuan dan sistem pendidikan harus dikembalikan lagi pada dasar dan sifat dari pendidikan itu sendiri (*back to basic and back to nature of education*). Harus ada perubahan cara pandang (*mind set*) yang sama pada semua komponen bangsa akan tujuan pendidikan formal di sekolah dan pendidikan non formal di dalam keluarga dan masyarakat bagi generasi muda. Hal ini dimaksudkan agar generasi muda baik laki-laki maupun perempuan dapat mengisi pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

Dalam satu dekade terakhir, Perempuan sudah menunjukkan berbagai peningkatan prestasi di bidang pendidikan, meskipun secara makro masih relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan prestasi laki-laki. Namun demikian, masih banyak kendala yang dialami oleh sebagian perempuan terutama yang tinggal di pedesaan dan pada masyarakat golongan sosial ekonomi kelas bawah. Untuk itu perlu strategi yang tepat yang dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi pendidikan perempuan dalam menyongsong era globalisasi.

Sebagai penutup dari bab ini adalah perlunya penerapan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan yang responsif gender dengan memfokuskan lebih besar kepada kondisi perempuan. Jadi peran dan fungsi institusi-institusi pemerintah harus dioptimalkan agar pembangunan dapat terwujud dengan maksimal bagi kesejahteraan Bangsa Indonesia baik laki-laki maupun perempuan melalui pendekatan budaya yang tepat dan bijak.

DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank. 1996. Education of Women in Asia. Proceedings of the Regional Seminar, 30 May-2 June, Manila, Philippines.

AusAID. 1997. Guide to Gender and Development.

Checchi,D. 1999. Inequality in Income and Access to Education: A Cross-Country Analysis. World Institute for Development. Economics Research.

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). 2004. Pesan Standar: Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. 2005. Profil Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2005. Pemerintah Propinsi Jawa Barat:` Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2005. SUSEDA (Survei Sosial Ekonomi Daerah).

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2005. Profil Pendidikan Jawa Barat Tahun 2005.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Subang. Mengenal Museum Daerah Kabupaten Subang.

Filmer,D. 1999. The Structure of Social Disparities in Education: Gender and Wealth. Gendernet, World Bank.

Grinjs, M., S. Machfud., P. Sayogyo., I. Smyth, & A.V. Velzen. 1992. Gender, Marginalisasi dan Industri Pedesaan :Pengusaha, Pekerja Upahan dan Pekerja Keluarga Wanita di Jawa Barat. Pusat Studi Wanita, Pusat Studi Pembanguanan Pedesaan dan Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

International Labour Organization (ILO). 1997. Apa itu Gender: Buku Panduan Untuk Buruh. Jakarta: ILO.

Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu. 2003. Data Kebudayaan dan Pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Indramayu-Kantor Kebudayaan dan Pariwisata. 2005. Data Penduduk, Kesenian Tradisional, Bahasa Daerah, dan jenis Kerajinan Daerah Kabupaten Indramayu.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). 2005. Panduan dan Bunga Rampai: Panduan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI-BKKBN-UNFPA.

Koentjaraningrat. 1994. Antropologi. Mutiara Sumber Widya.

Koentjaraningrat. 2002. Pengantar Ilmu Antropologi. Penerbit Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. 2005. Pengantar Antropologi: Pokok-Pokok Etnografi II. Penerbit Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. 2007. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Penerbit Djambatan.

Kuntjara, Esther. 2006. Penelitian Kebudayaan: Sebuah Panduan Praktis. Penerbit Graha Ilmu.

Moser, C and Levy, C. 1993. Training Materials Developed for Training in Gender Planning for Development. In Caroline O.N. Moser Gender and Development: Jender Planning and Development: Theory, Practice and Training. Routledge. London.

Overholt, Cloud and Austin. 1985. Gender Roles in Development Projects. Kumarian Press, Connecticut.

Puspitawati, H. 2006. Pengaruh Faktor keluarga, Lingkungan Teman dan Sekolah Terhadap kenakalan Pelajar di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kota Bogor. Disertasi Doktor yang tidak Dipublikasikan. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

Rosalin, LN. 2007. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIKDASMEN YANG RESPONSIF GENDER. BAPPENAS. Disampaikan pada Workshop Pengarusutamaan Gender, Diselenggarakan oleh Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, Hotel Safari Garden, Bogor, 23 Mei 2007

Subdis Dikmenti Disdik Prov. Jawa Barat, 2006.

Sub-Dinas PLS-Dinas Pendidikan Tahun 2005.

Sugiah, M *at.al.* 1996. Peranan Wanita dalam Pertanian Lahan Kering. Lembaga Penelitian, Institut Pertanian Bogor.

The Oxfam. 1994. The Oxfam Gender Training Manual. Oxfam United Kingdom and Ireland.

Unicef. 2003. Penelitian Partisipatif: Anak Yang Dilacurkan di Surakarta dan Indramayu.

UNESCO.1998. Gender-Sensitive Education Statistics and Indicators.

UNESCO. 2005. Education For All: The Quality Imperative. EFA Global Monitoring Report.

USAID. 1998. Promoting Education for Girls in Nepal.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Jawa Barat

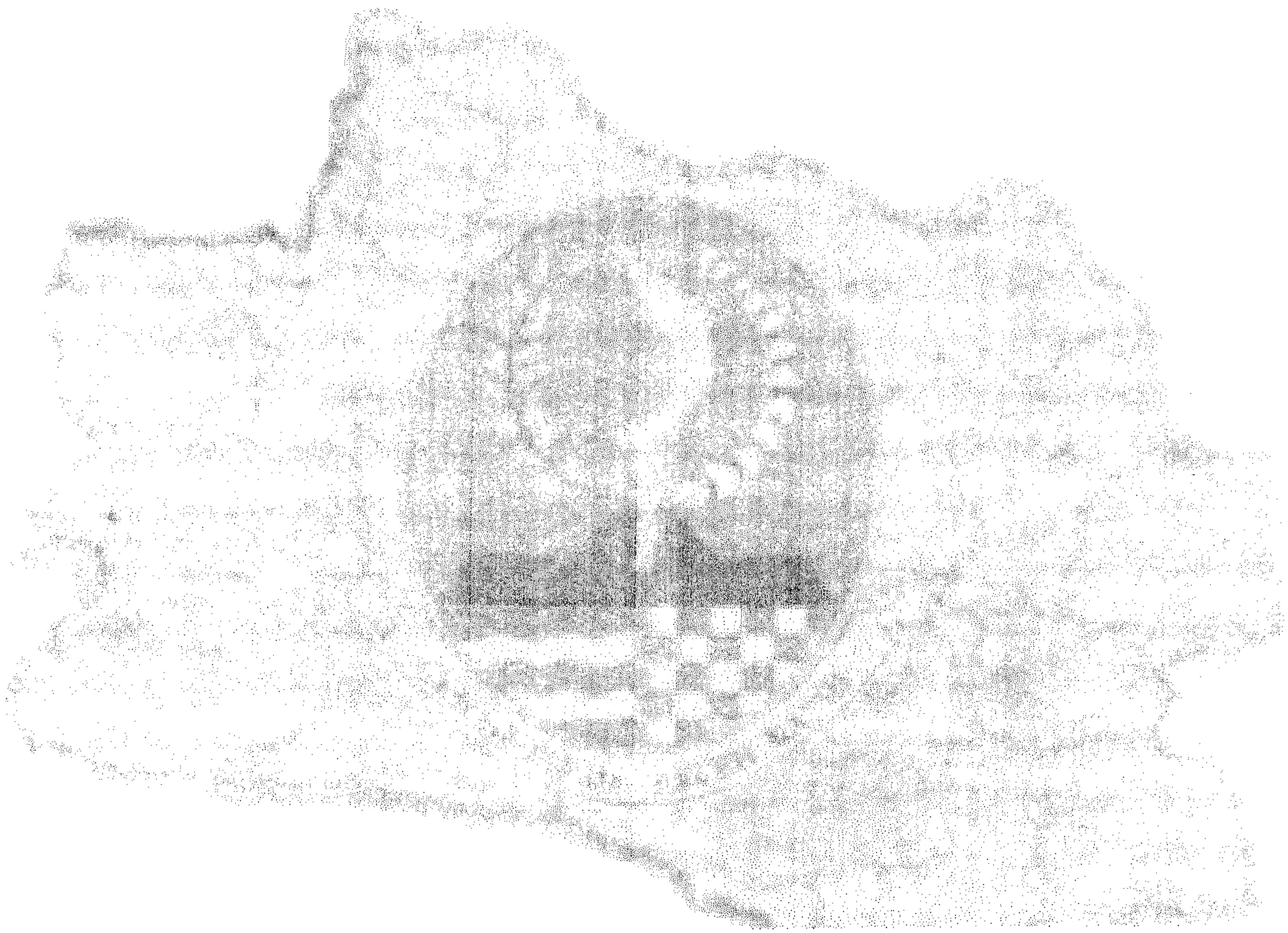

Lampiran 2. Rekapitulasi Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat TK sampai SM Menurut Kabupaten/ Kota

		APK TK			APK SD			APK SMP			APK SM	
KAB/KOTA	**TK L**	**TK P**	**D TK**	**SD L**	**SD P**	**D SD**	**SMP L**	**SMP P**	**D SMP**	**SM L**	**SM P**	**D SM**
Kab. Karawang	6.4	7.8	1.4	107.21	105.16	-2.05	65.23	62.04	-3.19	36.11	22.24	**-13.87**
Kab. Subang	5.1	6.6	1.5	134.58	97.33	**-37.25**	92.82	72.74	**-20.08**	40.28	24.29	**-15.99**
Kab. Indramayu	8.9	11.8	2.9	104.05	94.81	-9.24	60.53	78.08	17.55	33.87	19.77	-14.1
JAWA BARAT	10.1	11.4	1.3	113.37	102.42	-10.95	72.71	67.94	-4.77	37.32	33.9	-3.42

(Sumber: Profil Pendidikan Jawa Barat Tahun 2005, Tabel 2.2)

Lampiran 3. Penduduk Usia 7-12 Tahun keatas yang Tidak/ Belum Sekolah dan yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Kabupaten/Kota

		Tidak/Blm sekolah					Tidak bersekolah lagi				
		L		P		D	L		P		D
No	KAB/KOTA	n	%	n	%		n	%	n	%	
1	Kab. Karawang	3.371	2,44	4.213	4,03	**1,59**	842	0,61	842	0,81	**0,20**
2	Kab. Subang	579	0,81	833	0,95	**0,14**	0	0,00	1.493	1,70	**1,70**
3	Kab. Indramayu	1.884	1,68	1.884	1,71	**0,03**	942	0,84	4.500	4,08	**3,24**
	Jawa Barat	57.055	2,15	45.570	1,77	**-0,38**	36.134	1,36	49.884	1,94	**0,58**

(Sumber: SUSEDA Jawa Barat Tahun 2005, Hal. 138-139)

Lampiran 4. Penduduk Usia 13-15 Tahun keatas yang Tidak/ Belum Sekolah dan yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Tidak/Belum Sekolah					Tidak Bersekolah Lagi				
		L		P		D	L		P		D
		n	%	n	%		n	%	n	%	
	Kab. Karawang	0	0	0	0	**0**	18.533	26,18	7.593	14,76	**-11,42**
	Kab. Subang	0	0	833	2,65	**2,65**	3.332	11,40	4.652	14,82	**3,42**
12	Kab. Indramayu	942	1,83	0	0	**-1,83**	15.804	30,70	13.602	23,34	**-7,36**
	Jawa Barat	1.263	0,11	4.850	0,44	**0,33**	267.584	22,38	238.124	21,59	**-0,79**

(Sumber: SUSEDA Jawa Barat Tahun 2005, Hal. 141-142)

Lampiran 5. Penduduk Usia 16-18 Tahun keatas yang Tidak/ Belum Sekolah dan yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Tidak/Blm sekolah					Tidak bersekolah lagi				
		L		P		D	L		P		D
		n	%	n	%		n	%	n	%	
1	Kab. Karawang	0	0	0	0	**0**	35.400	54,54	30.342	53,73	**-0,81**
2	Kab. Subang	0	0	0	0	**0**	23.779	52,01	13.155	52,78	**0,77**
3	Kab. Indramayu	0	0	0	0	**0**	45.210	78,41	17.892	51,66	**-26,75**
	Jawa Barat	927	0,08	6.532	0,66	**0,58**	621.166	52,63	556.822	56,37	**3,74**

(Sumber: SUSEDA Jawa Barat Tahun 2005, Hal. 144-145)

Lampiran 6. Penduduk Usia 19 - 24 Tahun keatas yang Tidak/ Belum Sekolah dan yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Tidak/Belum Sekolah					Tidak bersekolah lagi				
		L		P		D	L		P		D
		n	%	n	%		n	%	n	%	
1	Kab. Karawang	1.684	1,58	0	0	**-1,58**	90.235	84,92	94.421	94,91	**9,99**
2	Kab. Subang	0	0	0	0	**0**	54.709	93,75	71.369	93,71	**-0,04**
3	Kab. Indramayu	0	0	942	1,13	**1,13**	86.118	95,03	78.582	93,99	**-1,04**
	Jawa Barat	10.108	0,47	8.402	0,38	**-0,09**	1.907.478	88,38	2.075.237	92,65	**4,27**

(Sumber: SUSEDA Jawa Barat Tahun 2005, Hal. 147-148)

Lampiran 7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Buta Aksara Menurut Kab/Kota Tahun 2006

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	APBN	APBD
KAB/KOTA	N	%	N	%	N	(RP 000)	(RP 000)
Kab. Karawang	59390	34,78	111396	65,23	170786	548410	387000
Kab. Subang	37091	33,48	73692	66,52	110783	519880	342000
Kab. Indramayu	78658	31,56	170585	68,44	249243	580110	417000
JAWA BARAT	**479337**	31,68	1033562	68,32	1512899	11392980	6000000

(Sumber: Sub-Dinas PLS-Dinas Pendidikan Tahun 2005)

Lampiran 8. Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Umur Perkawinan Pertama Menurut Kabupaten/ Kota

	≤ 15 TAHUN		16 TAHUN		17-18 TAHUN		≤ 18 TAHUN	
	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
Kab. Karawang	112.088	18,99	107.884	18,28	177.012	29,99	396.984	67,26
Kab. Subang	47.071	10,06	69.357	14,83	181.793	38.87	298.221	63,76
Kab. Indramayu	107.472	19,96	120.552	22,39	182.184	33,84	410.208	76,19
JAWA BARAT	**1.861.991**	**16,28**	**1.436.987**	**12,57**	**3.355.037**	**29,34**	6.654.015	58,19

(Sumber: SUSEDA Jawa Barat Tahun 2005, Hal. 213-214)

Lampiran 9. Biodata Penulis

1. **Herien Puspitawati, Dr. Ir., M.Sc., M.Sc.**
   - Adalah salah satu Tim Pakar Gender Pusat- Departemen Pendidikan Nasional RI yang juga staf pengajar pada Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK)-Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor.
   - Adalah Ketua Program Studi Program Master pada Program Studi Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak-Institut Pertanian Bogor.
   - Mempunyai pengalaman kerja di Bidang Gender dan Keluarga:
     - January 1886 – sekarang: Staf pengajar di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
     - 1999- sekarang: Peneliti di Pusat Studi Wanita- Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat.
     - 1996-1998: *Graduate Research Assistant* di *Dept. of Sociology, College of Agricultue, Iowa State University, USA.*
     - 1989-1992: *Graduate Research Assistant* di *Dept. of Human Development and Family Studies, Colege of Home Economics, Iowa State University, USA.*
   - Bidang Penelitiannya adalah:
     - Gender dan Keluarga
     - Metode penelitian Keluarga
     - Ekonomi Rumahtangga dan Kesejahteraan Keluarga

2. **Tin Herawati, SP., M.Si.**
   - Adalah staf pengajar pada Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK)-Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor.
   - Saat ini sedang menempuh Pendidikan Program Doktor pada Program Studi Penyuluhan Pertanian-IPB.

3. **Hanny Harashani, Dra.**
   - Adalah staf pengajar pada Fakultas Sastra, Universitas Pakuan-Bogor.